



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

[LPPD]

KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Kabupaten Batang
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 telah diterjemahkan dan dilaksanakan sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, maka seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang Tahun 2024 tersebut, maka sesuai dengan amanat regulasi Pemerintah Kabupaten Batang perlu untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 yang merupakan laporan atas kinerja pembangunan selama satu tahun sebagaimana termuat dalam RKPD Kabupaten Batang 2024 yang mengacu pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 semoga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Batang ini diharapkan dapat memperoleh masukan dari pemerintah baik pusat maupun Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang.

Batang, Maret 2025

BUPATI BATANG

M. FAIZ KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUANI-i

1.1. LATAR BELAKANG..... I-1

 A. *Penjelasan Umum*..... I-1

 B. *Perencanaan Pembangunan Daerah*..... I-10

 C. *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*..... I-20

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHII-1

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO..... II-1

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN II-10

 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran II-10

 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil II-49

 2.2.3. Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang II-83

2.3. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH II-88

 2.3.1. Akuntabilitas Kepala Daerah II-88

 2.3.2. Akuntabilitas Perangkat Daerah II-175

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUANIII-1

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMALIV-1

4.1. URUSAN PENDIDIKAN IV-1

4.2. URUSAN KESEHATAN IV-7

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG..... IV-15

4.4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV-18

4.5. URUSAN KETERNTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 IV-21

4.6. URUSAN SOSIAL..... IV-26

BAB V PENUTUPV-1

DAFTAR TABEL

		Luas Wilayah dan Jumlah Desa / Kelurahan Per Kecamatan di Kabupaten	
Tabel	1.1	Batang Tahun 20204	I-2
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Batang 2024	I-4
Tabel	1.3	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	I-5
Tabel	1.4	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat Dan Golongan	I-5
Tabel	1.5	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara Menurut Eselon Jabatan	I-6
Tabel	1.6	APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Batang 2024	I-9
Tabel	1.7	Garis Besar Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Batang 2024	I-18
Tabel	2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Batang	II-1
		Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Konstan	
Tabel	2.2	2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024	II-2
		Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Konstan	
Tabel	2.3	2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024	II-7
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pendidikan	II-11
Tabel	2.5	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kesehatan	II-15
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	
Tabel	2.6	Ruang	II-17
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	
Tabel	2.7	Permukiman	II-22
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum	
Tabel	2.8	dan Perlindungan Masyarakat	II-24
Tabel	2.9	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Sosial	II-26
Tabel	2.10	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Tenaga Kerja	II-28
Tabel	2.11	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pangan	II-33
Tabel	2.12	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanahan	II-35
Tabel	2.13	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Lingkungan Hidup	II-36
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan dan	
Tabel	2.14	Catatan Sipil	II-38
Tabel	2.15	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perhubungan	II-39
Tabel	2.16	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Komunikasi dan Informatika	II-40
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil	
Tabel	2.17	Menengah	II-43
Tabel	2.18	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Penanaman Modal	II-45
Tabel	2.19	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemuda dan Olahraga	II-46
Tabel	2.20	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik	II-47
Tabel	2.21	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Persandian	II-48
Tabel	2.22	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan	II-49
Tabel	2.23	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kearsipan	II-50
Tabel	2.24	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kelautan dan Perikanan	II-51
Tabel	2.25	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pariwisata	II-52
Tabel	2.26	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanian	II-53
Tabel	2.27	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perdagangan	II-54
Tabel	2.28	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perindustrian	II-55
Tabel	2.29	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Transmigrasi	II-56
Tabel	2.30	Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Pendidikan	II-57
Tabel	2.31	Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Kesehatan	II-59
		Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Pekerjaan umum dan	
Tabel	2.32	Penataan Ruang	II-62
		Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Perumahan Rakyat	
Tabel	2.33	dan Kawasan Permukiman	II-65

		Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Ketenteraman,	
Tabel	2.34	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-67
Tabel	2.35	Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Sosial	II-69
Tabel	2.36	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Tenaga Kerja	II-70
		Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	
Tabel	2.37	Perlindungan Anak	II-72
Tabel	2.38	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pangan	II-73
Tabel	2.39	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanahan	II-74
Tabel	2.40	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Lingkungan Hidup	II-76
		Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan dan	
Tabel	2.41	Catatan Sipil	II-77
Tabel	2.42	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-79
		Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pengendalian Penduduk dan	
Tabel	2.43	Keluarga Berencana	II-80
Tabel	2.44	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perhubungan	II-81
Tabel	2.45	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Komunikasi dan Informatika	II-83
Tabel	2.46	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	II-85
Tabel	2.47	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Penanaman Modal	II-86
Tabel	2.48	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-87
Tabel	2.49	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Statistik	II-89
Tabel	2.50	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Persandian	II-90
Tabel	2.51	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kebudayaan	II-91
Tabel	2.52	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perpustakaan	II-92
Tabel	2.53	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kearsipan	II-93
Tabel	2.54	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanian	II-95
Tabel	2.55	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pariwisata	II-96
Tabel	2.56	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perindustrian	II-97
Tabel	2.57	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perdagangan	II-99
Tabel	2.58	Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan kelautan dan Perikanan	II-100
Tabel	2.59	Indikator Kinerja Kunci Hasil Perencanaan Keuangan	II-101
Tabel	2.60	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pengadaan	II-102
Tabel	2.61	Indikator Kinerja Kunci Hasil Kepegawaian	II-103
Tabel	2.62	Indikator Kinerja Kunci Hasil Manajemen Keuangan	II-104
Tabel	2.63	Indikator Kinerja Kunci Hasil Transparansi dan Partisipasi Publik	II-105
Tabel	2.64	Evaluasi Capaian Tujuan Sasaran RPD Kabupaten Batang Tahun 2024	II-107
Tabel	2.65	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-110
		Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan	
Tabel	2.66	target RPD dan tahun sebelumnya	II-110
Tabel	2.67	Program dan Kinerja Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-112
Tabel	2.68	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan	II-114
		Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan dengan target RPD dan	
Tabel	2.69	tahun sebelumnya	II-114
Tabel	2.70	Program dan Kinerja Program Dinas Kesehatan	II-116
Tabel	2.71	Perjanjian Kinerja RSUD Batang	II-117
Tabel	2.72	Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Batang tahun sebelumnya	II-117
Tabel	2.73	Program dan Kinerja Program RSUD Batang	II-118
Tabel	2.74	Perjanjian Kinerja RSUD Limpung	II-119
Tabel	2.75	Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Limpung tahun sebelumnya	II-119
Tabel	2.76	Program dan Kinerja Program Limpung	II-120
Tabel	2.77	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-121

Tabel	2.78	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target RPD dan tahun sebelumnya	II-121
Tabel	2.79	Program dan Kinerja Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-123
Tabel	2.80	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-124
Tabel	2.81	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-124
Tabel	2.82	Program dan Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-126
Tabel	2.83	Perjanjian Kinerja Satpol PP	II-127
Tabel	2.84	Perbandingan Capaian Kinerja Satpol PP dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-127
Tabel	2.85	Program dan Kinerja Program Satpol PP	II-129
Tabel	2.86	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol	II-130
Tabel	2.87	Program dan Kinerja Program Badan Kesbangpol	II-131
Tabel	2.88	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-132
Tabel	2.89	Perbandingan Capaian Kinerja BPBD dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-132
Tabel	2.90	Program dan Kinerja Program BPBD	II-134
Tabel	2.91	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial	II-135
Tabel	2.92	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-135
Tabel	2.93	Program dan Kinerja Program Dinas Sosial	II-137
Tabel	2.94	Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Target RPD dan Tahun Sebelumnya	II-138
Tabel	2.95	Perbandingan Indikator Ketenagakerjaan	II-139
Tabel	2.96	Program dan Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan	II-140
Tabel	2.97	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-142
Tabel	2.98	Perbandingan Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-143
Tabel	2.99	Program dan Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Batang	II-144
Tabel	2.100	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	II-145
Tabel	2.101	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup target RPD dan tahun sebelumnya	II-145
Tabel	2.102	Program dan Kinerja Program Lingkungan Hidup	II-147
Tabel	2.103	Perjanjian Kinerja Dukcapil	II-149
Tabel	2.104	Program dan Kinerja Program Disdukcapil	II-150
Tabel	2.105	Perjanjian Kinerja Dispermades	II-151
Tabel	2.106	Perbandingan Capaian Kinerja Dispermades dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-151
Tabel	2.107	Program dan Kinerja Program Dispermades	II-153
Tabel	2.108	Perjanjian Kinerja Dishub	II-154
Tabel	2.109	Perbandingan Capaian Kinerja Dishub dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-154
Tabel	2.110	Program dan Kinerja Program Dishub	II-156
Tabel	2.111	Perjanjian Kinerja Diskominfo	II-157
Tabel	2.112	Perbandingan Capaian Kinerja Diskominfo dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-158
Tabel	2.113	Program dan Kinerja Program Diskominfo	II-160
Tabel	2.114	Perjanjian Kinerja Dinas PERINDAGKOP DAN UKM	II-161

		Perbandingan Capaian Kinerja PERINDAGKOP DAN UKM dengan target	
Tabel	2.115	RPD dan tahun sebelumnya	II-161
Tabel	2.116	Program dan Kinerja Program PERINDAGKOP DAN UKM	II-163
Tabel	2.117	Perjanjian Kinerja Dislutkannak	II-166
		Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan	
Tabel	2.118	target RPD tahun sebelumnya	II-167
Tabel	2.119	Program dan Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan	II-168
Tabel	2.120	Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian	II-173
		Perbandingan Capaian Kinerja Dispaperta Batang dengan tahun	
Tabel	2.121	sebelumnya	II-173
Tabel	2.122	Program dan Kinerja Program Dinas Pangan dan Pertanian	II-175
Tabel	2.123	Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	II-177
		Perbandingan Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan	
Tabel	2.124	Pengembangan dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-177
		Program dan Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan	
Tabel	2.125	Pengembangan	II-179
Tabel	2.126	Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-181
		Perbandingan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan	
Tabel	2.127	Pelatihan dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-182
		Program dan Kinerja Program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	
Tabel	2.128	Pelatihan	II-183
		Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset	
Tabel	2.129	Daerah	II-185
		Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan,	
Tabel	2.130	dan Aset Daerah dengan target RPD dan tahun sebelumnya	II-185
		Program dan Kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	
Tabel	2.131	dan Aset Daerah	II-187
Tabel	2.132	Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	II-189
		Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dengan target RPD dan	
Tabel	2.133	tahun sebelumnya	II-189
Tabel	2.134	Program dan Kinerja Program Sekretariat DPRD	II-191
Tabel	2.135	Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	II-193
		Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dengan target RPD dan	
Tabel	2.136	tahun sebelumnya	II-194
Tabel	2.137	Program dan Kinerja Program Sekretariat Daerah	II-196
Tabel	2.138	Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	II-199
		Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah dengan target RPD dan	
Tabel	2.139	tahun sebelumnya	II-199
Tabel	2.140	Program dan Kinerja Program Inspektorat	II-201
		Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi	
Tabel	3.1	Jawa Tengah Yang Dilaksanakan Kabupaten Batang 2024	III-2
		Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Pendidikan	
Tabel	4.1	dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-3
		Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan	
Tabel	4.2	Pendidikan Tahun 2024	IV-4
Tabel	4.3	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV-6
		Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Kesehatan	
Tabel	4.4	dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-7
		Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan	
Tabel	4.5	Kesehatan Tahun 2024	IV-8
Tabel	4.6	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	IV-14
		Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan	
Tabel	4.7	Umum dan Penataan Ruang serta Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-15
		Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan	
Tabel	4.8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	IV-16

Tabel	4.9	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	IV-17
Tabel	4.10	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-18
Tabel	4.11	Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	IV-19
Tabel	4.12	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	IV-20
Tabel	4.13	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-21
Tabel	4.14	Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Tahun 2024	IV-23
Tabel	4.15	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Tahun 2024	IV-25
Tabel	4.16	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Sosial dan Alokasi Anggaran Tahun 2024	IV-26
Tabel	4.17	Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Urusan Sosial Tahun 2024	IV-28
Tabel	4.18	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2024	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Administrasi Kabupaten Batang	I-1
Gambar	1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2024	I-3
Gambar	2.1	Perbandingan IPM Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-2
Gambar	2.2	Perbandingan IPM Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-3
Gambar	2.3	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-3
Gambar	2.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-4
Gambar	2.5	Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-5
Gambar	2.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-5
Gambar	2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II-6
Gambar	2.8	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	II-7
Gambar	2.9	Sektor-sektor Penyumbang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024	II-8
Gambar	2.10	PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2019-2024 (juta rupiah)	II-9
Gambar	2.11	Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2019-2024	II-9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

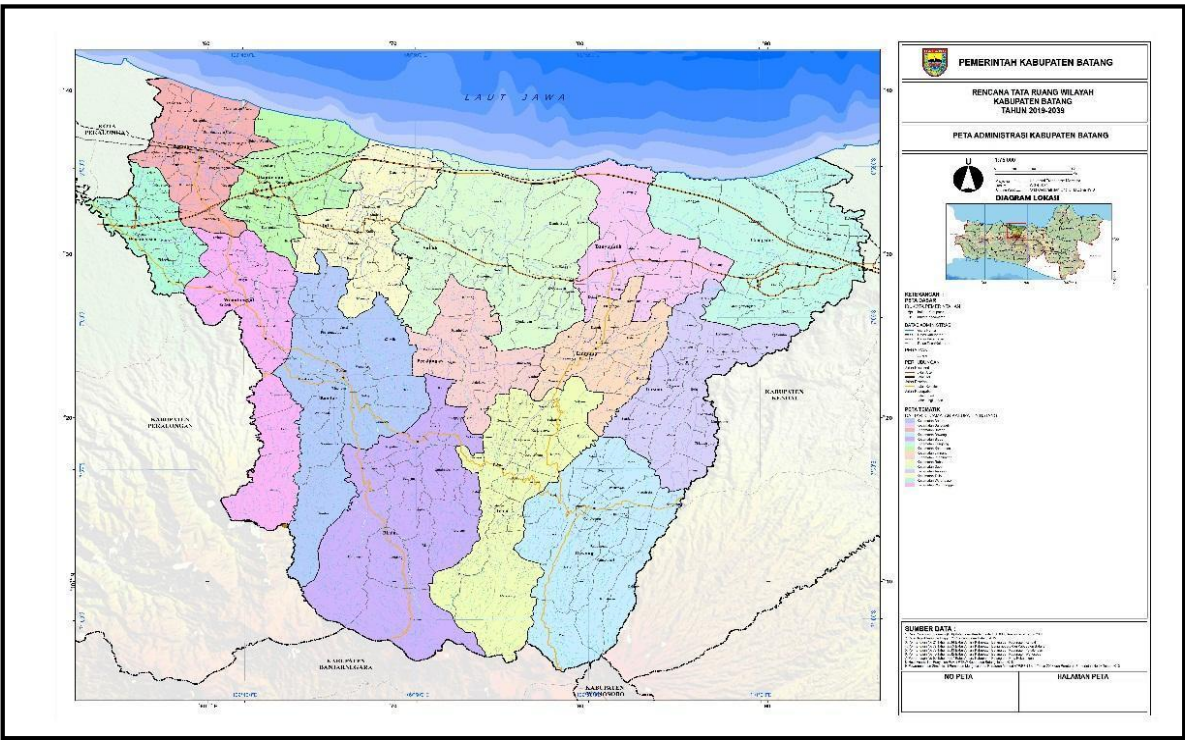
A. Penjelasan Umum

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut Kabupaten Batang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757. Secara geografis, Kabupaten Batang terletak antara 6° 51' 46' dan 7° 11' 47' Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19' dan 110° 03' 06' Bujur Timur dengan luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administrasif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Batang



Letak geografis tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pekalongan : 9 km
- 2) Pemalang : 43 km
- 3) Tegal : 72 km
- 4) Brebes : 85 km
- 5) Cirebon : 144 km
- 6) Jakarta : 392 km
- 7) Kendal : 64 km
- 8) Semarang : 93 km
- 9) Surabaya : 480 km

Secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan dengan perincian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/ Kelurahan Per Kecamatan di
Kabupaten Batang Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (ha)
1	Wonotunggal	15	5.543
2	Bandar	17	7.937
3	Blado	18	9.645
4	Reban	19	6.947
5	Bawang	20	7.679
6	Tersono	20	5.136
7	Gringsing	15	7.974
8	Limpung	17	3.272
9	Banyuputih	11	4.233
10	Subah	17	9.143
11	Pecalungan	10	3.342
12	Tulis	17	4.405
13	Kandeman	13	4.064
14	Batang	12 Desa/ 9 Kelurahan	3.939
15	Warungasem	18	2.445
	Total	248	85.721

Sumber: RTRW Kab Batang 2021

Luas wilayah Kabupaten Batang tercatat 85.721 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri a) kawasan hutan produksi dengan luasan 15.340,10 Ha; b. kawasan hutan rakyat dengan luasan 1.134 Ha; c. kawasan pertanian dengan luasan 41.210 Ha; d. kawasan perikanan dengan luasan 283 Ha; e. kawasan

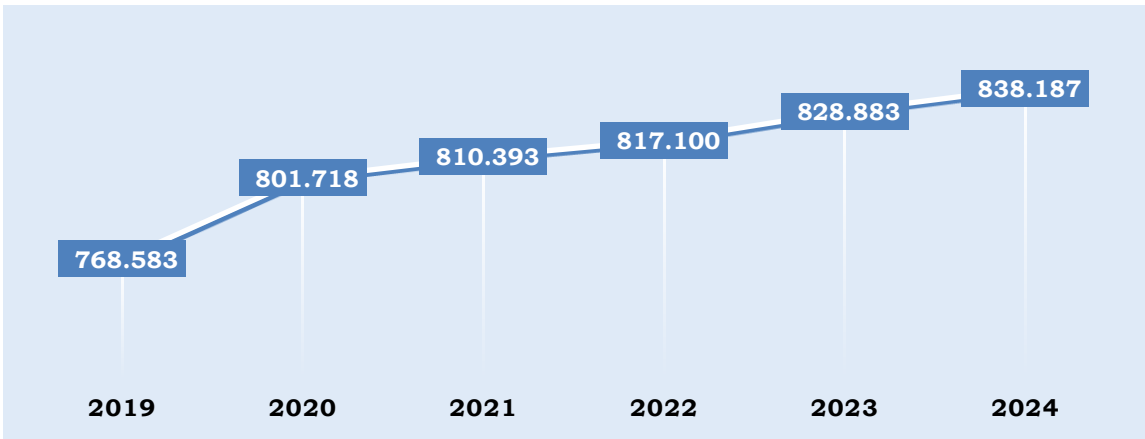
pertambangan dan energi dengan luasan 208 Ha; f. kawasan peruntukan industri dengan luasan 3.310 Ha; g. kawasan pariwisata; h. kawasan permukiman dengan luasan 17.233,00; dan i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 2.000 m, yaitu:

- a. Gunung Prau : tinggi 2.565 mdpal
- b. Gunung Sipandu : tinggi 2.241 mdpal
- c. Gunung Gajah Mungkur : tinggi 2.101 mdpal
- d. Gunung Alang : tinggi 2.239 mdpal
- e. Gunung Butak : tinggi 2.222 mdpal

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 838.187 jiwa, dengan komposisi 422.237 jiwa penduduk laki-laki dan 415.950 jiwa penduduk Perempuan dengan lajut pertumbuhan di tahun 2024 sebesar 1,44%, dimana jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 hingga 2024 sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2019-2024
Sumber: Kab.Batang Dalam Angka, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2024 mencapai 1.051 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sejumlah 4.018 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Blado sejumlah 597 jiwa/km2. Selanjutnya, dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Batang 2024

No	Kecamatan	Jumlah Total
1	Wonotunggal	40.669
2	Bandar	74.883
3	Blado	47.139
4	Reban	42.211
5	Bawang	57.460
6	Tersono	42.360
7	Gringsing	65.730
8	Limpung	45.874
9	Banyuputih	38.177
10	Subah	54.860
11	Pecalungan	33.415
12	Tulis	40.896
13	Kandeman	58.426
14	Batang	139.492
15	Warungasem	56.595
2024		838.187
2023		828.883
2022		817.100
2021		810.393
2020		801.718
2019		768.583

Sumber: Kab.Batang Dalam Angka, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Batang sangat dominan dari total penduduk yang ada dengan jumlah 139.492, dibandingkan dengan kecamatan lainnya sementara Kecamatan Pecalungan dengan jumlah paling sedikit dengan jumlah 33.415.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang pada Bulan Desember Tahun 2024 sejumlah 7.823 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4.998 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2.826 orang. Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari PNS laki- laki 2.212 orang dan perempuan 2.786 orang, utk PPPK laki – laki 956 orang dan perempuan 1.870 orang.

Adapun rekapitulasi PNS menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Menurut Tingkat Pendidikan

STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN										
	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jmlh
PNS	48	101	529	5	59	825	125	2.945	357	4	4.998

Sumber : BKD Kabupaten Batang

Rekapitulasi ASN berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Menurut Pangkat Dan Golongan

Golongan	Pangkat	PNS		PPPK		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
I/c	Juru	5	1	0	0	6
I/d	Juru Tingkat I	43	5	0	0	48
II/a	Pengatur Muda	37	2	40	2	81
II/b	Pengatur Muda Tingkat I	54	4	0	0	58
II/c	Pengatur	156	52	52	99	359
II/d	Pengatur Tingkat I	190	97	0	0	287
III/a	Penata Muda	280	406	853	1.753	3.292
III/b	Penata Muda Tingkat I	362	487	11	16	876
III/c	Penata	231	500	0	0	731
III/d	Penata Tingkat I	368	682	0	0	1.050
IV/a	Pembina	177	220	0	0	397
IV/b	Pembina Tingkat I	239	287	0	0	526
IV/c	Pembina Utama Muda	69	43	0	0	112
	Jumlah	2.212	2.786	956	1.870	7.823

Sumber : bkd Kabupaten Batang

Rekapitulasi ASN berdasarkan eselon jabatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara
Menurut Eselon Jabatan

JENIS JABATAN	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Jabatan Fungsional Tertentu	Non	2.165	4.137	6.303
Jabatan Fungsional Umum	Non	750	371	1.121
Jabatan Struktural	II.b	22	1	23
Jabatan Struktural	III.a	41	8	49
Jabatan Struktural	III.b	59	38	97
Jabatan Struktural	IV.a	95	70	165
Jabatan Struktural	IV.b	35	31	66
		3.167	4.656	7.823

Sumber : BKD Kabupaten Batang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun 2024 menunjukkan dinamika keuangan yang menarik, dengan pencapaian realisasi yang mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Dari hasil analisis terhadap anggaran dan realisasi yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah ini cukup baik meskipun terdapat beberapa variabel yang mengalami defisit maupun surplus dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 1.944.219.139.590,-. Namun, realisasi yang berhasil dicapai justru lebih tinggi, yaitu Rp 1.958.338.899.659,30,- atau mengalami surplus sebesar Rp 14.119.760.069,30,- dengan persentase pencapaian sebesar 100,73%. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi pendapatan yang cukup baik oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber utama yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari anggaran sebesar Rp 335.410.556.590,- realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp 359.778.837.359,30,- atau meningkat sebesar Rp 24.368.280.769,30,- dengan persentase pertumbuhan mencapai 107,27%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya lokal, termasuk peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.

Di sisi lain, pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat sedikit mengalami penurunan dari anggaran sebesar Rp 1.608.328.583.000,- menjadi Rp 1.598.080.062.300,-. Terdapat selisih negatif sebesar Rp 10.248.520.700,- atau pencapaian hanya mencapai 99,36% dari target yang ditetapkan. Sedangkan, lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sesuai anggaran, yaitu sebesar Rp 480.000.000,- atau 100%.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya manajemen pendapatan yang cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa komponen yang tidak mencapai target secara maksimal.

Dari sisi belanja daerah, anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.080.435.986.668,- dengan realisasi sebesar Rp 1.942.886.362.996,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah masih di bawah target dengan selisih Rp 137.549.623.672,- atau hanya mencapai 93,39% dari anggaran yang telah direncanakan.

Komponen belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial, menunjukkan realisasi yang cukup baik meskipun masih di bawah anggaran yang telah dialokasikan. Dari anggaran sebesar Rp 1.517.175.243.513,- realisasi belanja operasi hanya mencapai Rp 1.395.297.308.693,- atau 91,97%.

Belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang mengalami deviasi terbesar, dengan anggaran sebesar Rp 911.809.331.087,- namun realisasi hanya Rp 808.924.356.457,- atau mencapai 88,72%. Selisih sebesar Rp 102.884.974.630,- ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pengeluaran pegawai yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penundaan perekrutan tenaga baru atau penghematan dalam tunjangan dan honorarium.

Belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar Rp 492.930.165.390,- mengalami realisasi sebesar Rp 476.784.495.553,- atau 96,72%. Sementara itu, belanja hibah yang dianggarkan sebesar Rp 100.577.222.036,- mengalami realisasi sebesar Rp 98.128.650.683,- atau mencapai 97,57%. Belanja bantuan sosial juga mengalami penurunan dari anggaran sebesar Rp 11.858.525.000,- menjadi Rp 11.459.806.000,- atau sekitar 96,64% dari target yang ditetapkan.

Pada kategori belanja modal, yang dialokasikan untuk pembangunan aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, realisasi mencapai Rp 176.258.634.060,- dari anggaran sebesar Rp 181.898.933.963,- atau mencapai 96,90%. Beberapa sektor belanja modal yang mengalami penurunan adalah belanja tanah yang sama sekali tidak terealisasi dari anggaran Rp 20.000.000,- serta belanja aset lainnya yang hanya mencapai Rp 537.234.942,- dari target Rp 655.000.000,- atau 82,02%.

Belanja tidak terduga mengalami realisasi yang sangat rendah, hanya mencapai Rp 1.257.261.878,- dari anggaran Rp 7.669.716.371,- atau hanya sekitar 16,39%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah cukup stabil, sehingga tidak banyak pengeluaran untuk keperluan mendesak dan darurat.

Dari sisi belanja transfer, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, realisasi mencapai Rp 370.073.158.365,- dari anggaran sebesar Rp 373.692.092.821,- atau sekitar 99,03%. Belanja bagi hasil mengalami realisasi yang lebih rendah, hanya mencapai Rp 11.185.892.973,- dari anggaran Rp 14.653.167.421,- atau 76,34%. Sementara itu, belanja bantuan keuangan hampir mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp 358.887.265.392,- dari anggaran Rp 359.038.925.400,- atau 99,96%.

Salah satu pencapaian penting dalam APBD Kabupaten Batang tahun 2024 adalah perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan anggaran awal, APBD Kabupaten Batang diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 136.216.847.078,-. Namun, realisasi justru menghasilkan surplus sebesar Rp 15.452.536.663,30,-. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana realisasi pendapatan melebihi belanja yang dilakukan.

Dari sisi pembiayaan daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencapai Rp 143.716.847.078,43,- atau sedikit lebih tinggi dari estimasi awal sebesar Rp 143.716.847.078,-. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah juga memberikan tambahan Rp 2.721.472,-. Sementara itu, penyertaan modal daerah tetap sesuai rencana, yakni Rp 7.500.000.000,-.

Dengan adanya realisasi pendapatan yang lebih tinggi dari belanja serta adanya surplus pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 mencapai Rp 151.672.105.213,73,-. Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Batang berada dalam kondisi keuangan yang stabil, dengan ruang fiskal yang lebih baik untuk menghadapi tahun anggaran berikutnya.

APBD Kabupaten Batang Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam hal realisasi pendapatan yang melampaui target serta efisiensi belanja yang menghasilkan surplus. Meskipun terdapat beberapa komponen yang tidak mencapai target anggaran, namun keseluruhan struktur keuangan daerah tetap dalam kondisi yang sehat dan terkendali. Dengan pencapaian ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

Tabel 1.6.
APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Batang 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
1	PENDAPATAN	1.944.219.139.590	1.958.338.899.659,30	14.119.760.069,30	100,73
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.410.556.590	359.778.837.359,30	24.368.280.769,30	107,27
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.608.328.583.000	1.598.080.062.300	(10.248.520.700)	99,36
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	480.000.000	480.000.000	-	100
	Jumlah Pendapatan	1.944.219.139.590	1.958.338.899.659,30	14.119.760.069,30	100,73
2	BELANJA	2.080.435.986.668	1.942.886.362.996	(137.549.623.672)	93,39
2.1	BELANJA OPERASI	1.517.175.243.513	1.395.297.308.693	(121.877.934.820)	91,97
2.1.1	Belanja Pegawai	911.809.331.087	808.924.356.457	(102.884.974.630)	88,72
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	492.930.165.390	476.784.495.553	(16.145.669.837)	96,72
2.1.5	Belanja Hibah	100.577.222.036	98.128.650.683	(2.448.571.353)	97,57
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.858.525.000	11.459.806.000	(398.719.000)	96,64
2.2	BELANJA MODAL	181.898.933.963	176.258.634.060	(5.640.299.903)	96,90
2.2.1	Belanja Tanah	20.000.000	-	(20.000.000)	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.882.061.249	44.895.586.594	(986.474.655)	97,85
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.439.954.682	55.266.619.898	(3.173.334.784)	94,57
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.534.428.142	62.829.046.044	(705.382.098)	98,89
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.367.489.890	12.730.146.582	(637.343.308)	95,23
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	655.000.000	537.234.942	(117.765.058)	82,02
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.669.716.371	1.257.261.878	(6.412.454.493)	16,39
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.669.716.371	1.257.261.878	(6.412.454.493)	16,39
	Jumlah Belanja	1.706.743.893.847	1.572.813.204.631	(133.930.689.216)	92,15
2.4	BELANJA TRANSFER	373.692.092.821	370.073.158.365	(3.618.934.456)	99,03
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.653.167.421	11.185.892.973	(3.467.274.448)	76,34
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	359.038.925.400	358.887.265.392	(151.660.008)	99,96
	Jumlah Belanja dan Tranfer	2.080.435.986.668	1.942.886.362.996	(137.549.623.672)	93,39
	Surplus/Defisit	(136.216.847.078)	15.452.536.663,30	151.669.383.741,30	- 11,34
3	PEMBIAYAAN DAERAH				-
3.1	PENERIMAAN				-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	143.716.847.078	143.716.847.078,43	0,43	100
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.721.472	2.721.472	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.716.847.078	143.719.568.550,43	2.721.472,43	100
3.2	PENGELUARAN				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	-	100
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000	7.500.000.000	-	100
	Pembiayaan Netto	136.216.847.078	136.219.568.550,43	2.721.472,43	100
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	-	151.672.105.213,73	151.672.105.213,73	-

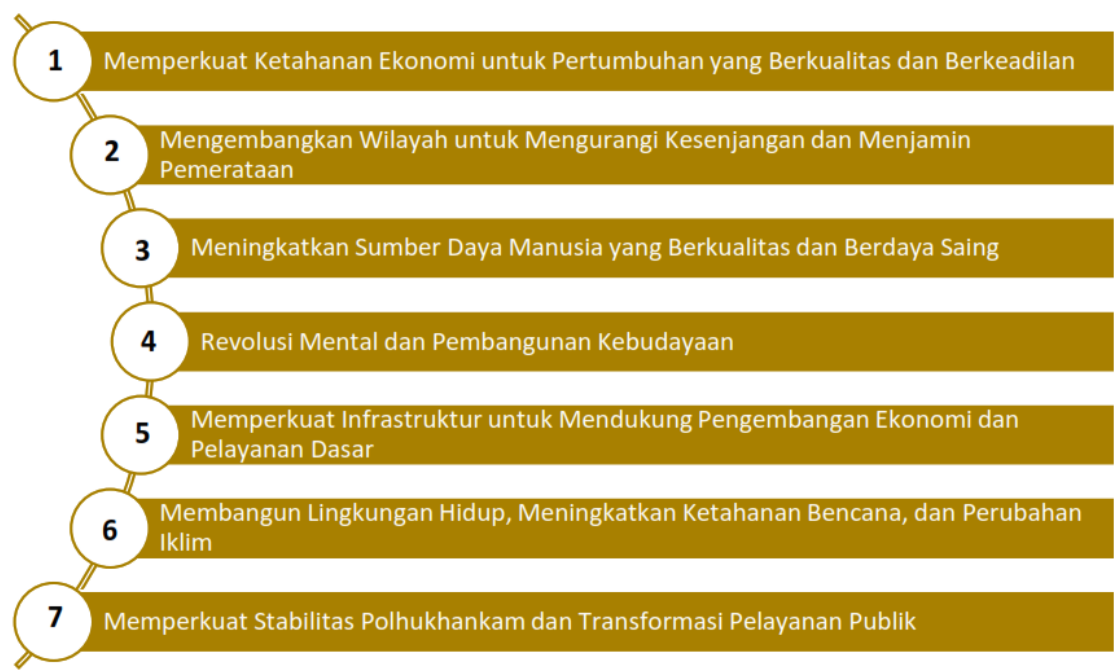
Sumber : DPKPAD Kab. Batang 2025 *Un Audited*

B. *Perencanaan Pembangunan Daerah*

I. **Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP 2024**

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2024 ini merupakan pedoman perumusan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat nasional yang mengacu pada dokumen jangka menengah yakni RPJMN Tahun 2019 – 2024. Keberhasilan pembangunan diukur dari tingkat pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun berjalan.

Dengan mendasari Visi Misi Presiden Indonesia, penyusunan RPJMN Tahun 2019 – 2024 ini diterjemahkan dalam 7 Agenda Pembangunan Yakni:



Tema RKP Tahun 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 arah kebijakan yang ditetapkan yakni :



Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 %
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7 %
4. Rasio Gini sebesar 0,374-0,377 (nilai)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 – 74,02
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sebesar 27,27 %
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 – 110
8. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 – 108

II. Kebijakan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

- a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”, dengan prioritas dan fokus pembangunan yang diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44 – 8,52 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,372;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;

7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

III. Kebijakan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024

Dengan menyongsong tema pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah” dengan fokus sebagai berikut :

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui:
 - 1) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - 1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - 2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - 3) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
 - 1) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - 2) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - 3) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - 4) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - 5) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:

- 1) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - 2) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait Upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - 3) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
- 1) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - 2) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - 3) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi melalui :
- 1) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - 2) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - 4) Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat;
 - 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan;
 - 6) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - 7) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, difokuskan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan

sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.

- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - 1) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - 2) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - 1) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - 2) Penyediaan Rumah Layak Huni pada Masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - 3) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - 4) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - 5) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - 1) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
 - 2) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - 3) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - 5) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - 6) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - 1) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;

- 2) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - 3) Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir;
 - 4) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
1. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
 - 1) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan system informasi terintegrasi;
 - 2) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai Research Based Policy;
 - 3) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
 - m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - 1) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun Masyarakat melalui Krenova;
 - 2) Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan;
 - 3) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - 4) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - 5) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - 6) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - 7) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
 - o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;

- 2) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
- 3) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari Tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Arah kebijakan dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024 yaitu :

1. PDRB Per Kapita (ADHK) sebesar 22,3
2. Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,507
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,04
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,98
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 63,93
6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,20
7. Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan sebesar 9,803 ribu rupiah per tahun
8. Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) sebesar 21,6
9. Persentase Penduduk Miskin sebesar 8,34-7,90
10. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 5,6
11. Indeks Infrastruktur sebesar 197,04
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,04
13. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,66
14. Nilai SAKIP Skor 70,5
15. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar Level 3
16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79
17. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,45
18. Indeks Risiko Bencana (IRBI) sebesar 155
19. Indeks Rasa Aman sebesar 4,2
20. Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,81
21. Indeks Demokrasi sebesar 72
22. Angka Kriminalitas sebesar 0,015 persen

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk Penguatan Kolaborasi dalam pemenuhan pelayanan dasar serta pengurangan beban pengeluaran pada masyarakat

misikin, Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi, Pengendalian Penduduk, Penguatan sistem kesehatan masyarakat (pemenuhan layanan dasar, penurunan stunting dan ODF) serta upaya promotif dan preventif (GERMAS, PHBS), Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, serta Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan.

2. Penciptaan nilai tambah sektor unggulan serta penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mendorong iklim investasi masuk ke Kabupaten Batang, Pengembangan Kawasan Industri yang berkualitas, Pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Meningkatkan ketahanan pangan, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat Kabupaten Batang.

3. Mewujudkan Pembangunan berbasis Green Infrastructure

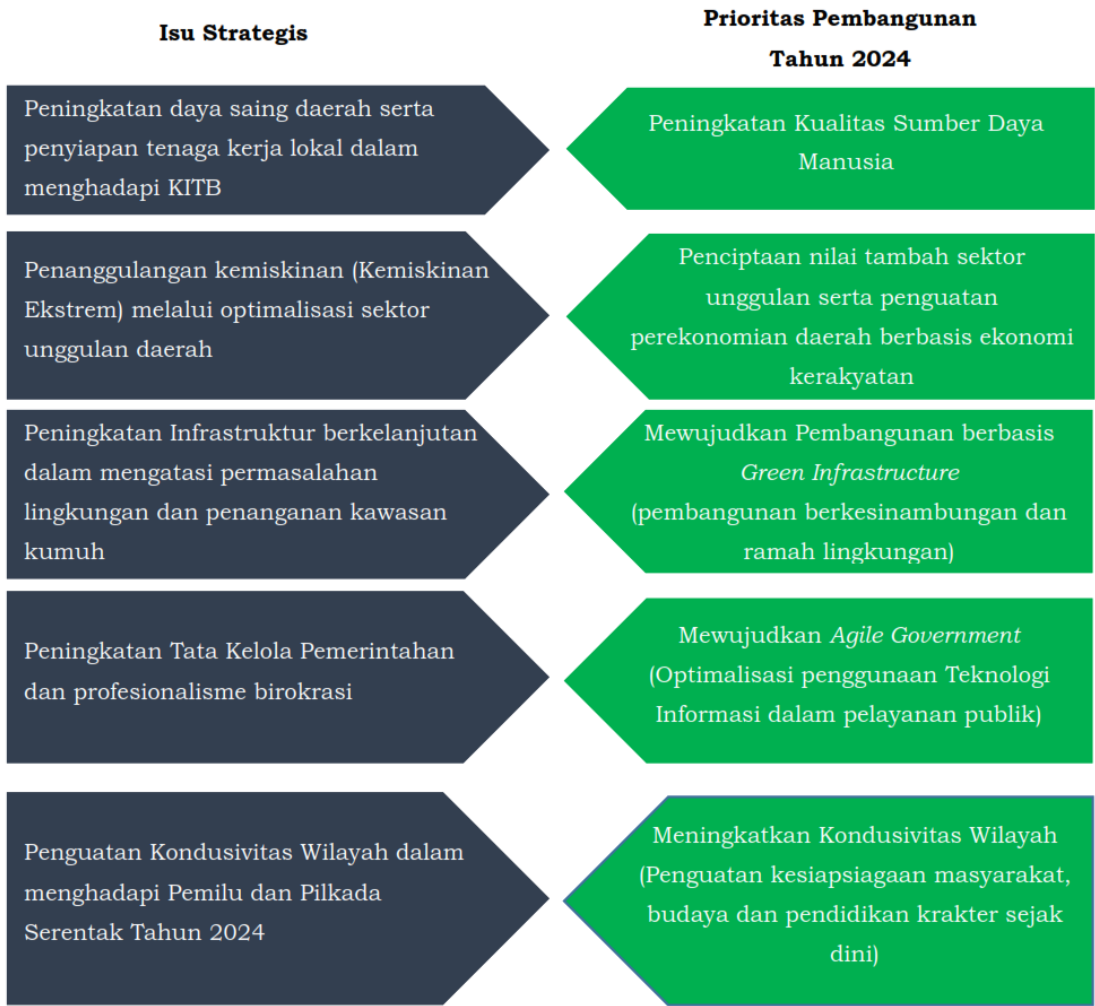
Prioritas ini ditetapkan untuk Pembangunan infrastruktur di wilayah strategis, pengembangan konektivitas wilayah, Peningkatan Pengelolaan lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan kumuh, Peningkatan kualitas permukiman padat, serta Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis.

4. Mewujudkan Agile Government

Prioritas ini ditetapkan untuk optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan, pengembangan dan peningkatan budaya inovasi di pemerintahan dan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sumber daya aparatur, serta peningkatan kualitas data informasi.

5. Meningkatkan kondusivitas wilayah

Prioritas ini ditetapkan untuk menjaga kondusivitas wilayah menuju pemilu serentak di tahun 2024, Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini, serta Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan.



IV. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 178 yang menyatakan bahwa pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prinsip pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dalam memberikan usulan pikir, anggota dewan menangkap aspirasi dari masyarakat melalui beberapa kegiatan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Batang. Adapun garis besar pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang tahun 2024 yang dikelompokkan menjadi beberapa sub unsur yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.7.

Garis Besar Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Batang 2024

No	Saran dan Pendapat Pokok Pokok Pirkiran DPRD	Keterangan
1	Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi Masyarakat	• Pengadaan Sarana prasarana teknologi informasi (CCTV, Komputer, Laptop, dll) • Pelatihan Penggunaan prasarana teknologi informasi

No	Saran dan Pendapat Pokok Pokok Pirkiran DPRD	Keterangan
2	Peningkatan Potensi Wisata Daerah	• Pengembangan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasiskan kemasyarakatan; • Penyediaan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti: pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata;
3	Pembangunan Konektivitas Pusat-Pusat Ekonomi	• Pembangunan dan perbaikan jalan utama dan jalan lingkungan serta bangunan pendukungnya secara menyeluruh sampai pedesaan;
4	Pemantapan Pelayanan Publik	• Pembuatan dan perbaikan jembatan; • Pemeliharaan/pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Batang;
5	Penanggulangan pengangguran	• Pemberian pelatihan keterampilan dan managerial kepada masyarakat, Lembaga masyarakat, wirausaha mikro, industri kecil dan tenaga kerja mandiri; • Pemberdayaan ekonomi pemuda;
6	Penanggulangan Kemiskinan	• Pemberian bantuan modal; • Pelaksanaan kegiatan padat karya; • Pemberian bantuan sosial;
7	Peningkatan Kualitas Pendidikan	• Pembangunan/pemeliharaan/pengadaan sarana prasarana pendidikan guna peningkatan pelayanan kependidikan;
8	Peningkatan Layanan Kesehatan	• Peningkatan keterjangkauan fasilitas kesehatan oleh seluruh masyarakat; • Pemeliharaan dan pengadaan sarpras kesehatan;
9	Penanggulangan Bencana Banjir, Rob dan bencana alam lainnya	• Normalisasi sungai dan drainase di wilayah perkotaan; • Optimalisasi sarana prasarana persampahan;
10	Peningkatan	• Pemberdayaan Bumdes;

No	Saran dan Pendapat Pokok Pokok Pirkiran DPRD	Keterangan
	Kapasitas dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa	• Pemberian bantuan usaha untuk petani dan peternak; • Pengadaan prasarana penerangan; • Penataan area pemukiman dan persawahan; • Pembuatan perbaikan dan normaslisasi saluran air/drainase dan plengsengan saluran, talud dan tebing; • Pengadaan prasarana air bersih; • Pemberian bantuan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); • Pembangunan sarana dan prasarana pertanian untuk irigasi dan bendungan.

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan dan Urusan Sosial.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam rencana penerapan dan pencapaina standar pelayanan minimal tertuang dalam dokumen perencanaan di masing masing perangkat daerah, yang juga merujuk pada dokumen RPJMD

Kabupaten Batang Tahun 2017-2022. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 061/43/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Batang yang terdiri dari Tim Pengarah (Bupati, Sekda dan Asisten Pemerintahan dan Kesra) dan Tim Teknis yang di ketuai oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang dimana uraian tugasnya meliputi:

1. Mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional.
2. Menyiapkan database profil pelayanan dasar berdasarkan masing masing jenis pelayanan dan indikator yang telah ditetapkan.
3. Menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan target yang telah ditetapkan secara nasional.
4. Menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Beberapa langkah kebijakan sektoral yang ditempuh diantaranya, Kebijakan dalam SPM Pendidikan ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Kebijakan dalam SPM Kesehatan ditempuh melalui standarisai pelayanan kesehatan dimana kegiatan diarahkan pada Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan di 15 kecamatan; Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah; Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Batang. Program diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase Puskesmas Terakreditasi sebesar 100%.

D. *Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024*



BUPATI BATANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. LANI DWI REJEKI, M.M
Jabatan : Pj. BUPATI BATANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batang, Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,

Ttd

Dra. LANI DWI REJEKI, M.M

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98
		3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,93
2	Menguatkan perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi	5,01 – 5,10
		2	Tingkat Pengeluaran Per Kapita	Rp.9.803,00/ Tahun
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	21,6
		2	Presentase Penduduk Miskin	8,34 – 7,92
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6
4	Meningkatnya Penyediaan dan pemerataan infrastuktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi	1	Indeks Infrastuktur	197,04
5	Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
6	Meningkatnya efektivitas dan efesiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	Nilai SAKIP	70
		2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 3
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui <i>agile governance</i>	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45
8	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	0,81
9	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hokum masyarakat	1	Indeks Demokrasi	72
10	Berkurangnya angka kriminalitas di kabupaten Batang	1	Angka Kriminalitas	0,015

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
1	Program Pengelolaan Pendidikan	166.155.665.994,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.750.000.000,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.300.000.000,00
4	Program Pengembangan Kebudayaan	430.000.000,00
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.375.000.000,00
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000,00
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.194.849.074,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.537.331.500,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	632.031.000,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.847.383.000,00
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.164.317.936,00
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.507.786.378,00
13	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	801.000.000,00
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.639.279.900,00
15	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.239.363.936,00
16	Program Pengembangan Pemukiman	484.550.000,00
17	Program Penataan Bangunan Gedung	11.674.296.204,00
18	Program Penyelenggaraan Jalan	56.933.470.276,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	75.000.000,00
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.922.338.400,00
21	Program Pengembangan Perumahan	217.500.000,00
22	Program Kawasan Pemukiman	9.484.623.640,00
23	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.111.564.980,00
24	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	32.000.000,00
25	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.893.761.760,00
26	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.791.345.600,00
27	Program Penanggulangan Bencana	1.407.327.400,00
28	Program Pemberdayaan Sosial	568.034.400,00
29	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.500.000,00
30	Program Rehabilitasi Sosial	319.976.300,00
31	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.597.030.400,00
32	Program Penanganan Bencana	623.075.100,00
33	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	87.980.200,00
34	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.259.745.850,00
35	Program Penempatan Tenaga Kerja	298.404.399,00
36	Program Hubungan Industrial	230.479.730,00
37	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	108.786.500,00
38	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	129.535.000,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
39	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	59.565.000,00
40	Program Perlindungan Khusus Anak	47.450.000,00
41	Program Pengendalian Penduduk	602.116.000,00
42	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.760.853.528,00
43	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.613.700.000,00
44	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000,00
45	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.850.000,00
46	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.000.000,00
47	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.152.855.000,00
48	Program Pengawasan Keamanan Pangan	37.510.000,00
49	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.522.450.968,00
50	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	245.000.000,00
51	Program Penyuluhan Pertanian	697.959.950,00
52	Program Penanganan Kerawanan Pangan	276.500.000,00
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.581.449.747,00
54	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	200.395.500,00
55	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	417.042.700,00
56	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	83.522.400,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
57	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.849.900,00
58	Program Pengelolaan Persampahan	1.896.626.100,00
59	Program Pendaftaran Penduduk	468.326.000,00
60	Program Pencatatan Sipil	414.808.000,00
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.032.507.799,00
62	Program Penataan Desa	35.000.000,00
63	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.612.902.7800,00
64	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.777.608.400,00
65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.777.574.050,00
66	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.304.244.000,00
67	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.511.178.600,00
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	327.137.950,00
69	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.000.000,00
70	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
71	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000,00
72	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	188.827.950,00
73	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.375.700,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
74	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	209.265.650,00
75	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	208.613.400,00
76	Program Pengembangan UMKM	29.624.300,00
77	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	22.400.000,00
78	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.511.013.148,00
79	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	109.725.000,00
80	Program Pengembangan Ekspor	66.905.000,00
81	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	102.166.500,00
82	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	7.179.500.000,00
83	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	87.200.000,00
84	Program Promosi Penanaman Modal	84.000.000,00
85	Program Pelayanan Penanaman Modal	540.718.760,00
86	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.547.000,00
87	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89.746.400,00
88	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.835.000.000,00
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.141.041.922,00
90	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.459.518.056,00
92	Program Pemasaran Pariwisata	248.198.210,00
93	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175.270.105,00
94	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	87.330.000,00
95	Program Pembinaan Perpustakaan	523.071.579,00
96	Program Pengelolaan Arsip	341.006.350,00
97	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.923.400,00
98	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.715.307.800,00
99	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	300.000.000,00
100	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	38.000.000,00
101	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verteriner	888.725.100,00
102	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000,00
103	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.658.193.350,00
104	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,164,245,960,00
105	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.006.559.247.156,00
106	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.750.052.423,00
107	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.263.300,00
108	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.638.093.400,00

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
109	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	826.000.000,00
110	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	357.997.488.190,00
111	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.264.005.150,00
112	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.584.565.500,00
113	Program Kepegawaian Daerah	2.282.933.947,00
114	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.356.750,00
115	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.394.936.198,00
116	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	778.069.700,00
117	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	295.425.800,00
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.041.962.550,00
119	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	101.102.000,00
120	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.616.000,00
121	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	209.398.000,00
122	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.164.963.764,00
123	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.138.114.833,00
124	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	43.280.000,00
125	Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan	

NO 1	PROGRAM 2	ANGGARAN 3
	Ekonomi, Sosial dan Budaya	203.544.950,00
126	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	994.064.000,00

Batang, Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG

Ttd

Dra. LANI DWI REJEKI, M.M

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Batang Tahun 2024 dilihat dari enam indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Batang

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja Tahun 2024	Perubahan	Sumber Data	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,20	70,73	0,53	BPS	Naik
2.	Angka Kemiskinan	8,92	8,73	0,19	BPS	Turun (positif)
3.	Angka Pengangguran	6,06	5,67	0,39	BPS	Turun (positif)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,53	6,03	0,50	BPS	Naik
5.	Pendapatan perkapita	33,64 juta pertahun	36,26 juta pertahun	2,62 juta/thn	BPS	Naik
6.	Ketimpangan pendapatan	0,333	0,312	0,021	BPS	Turun (positif)

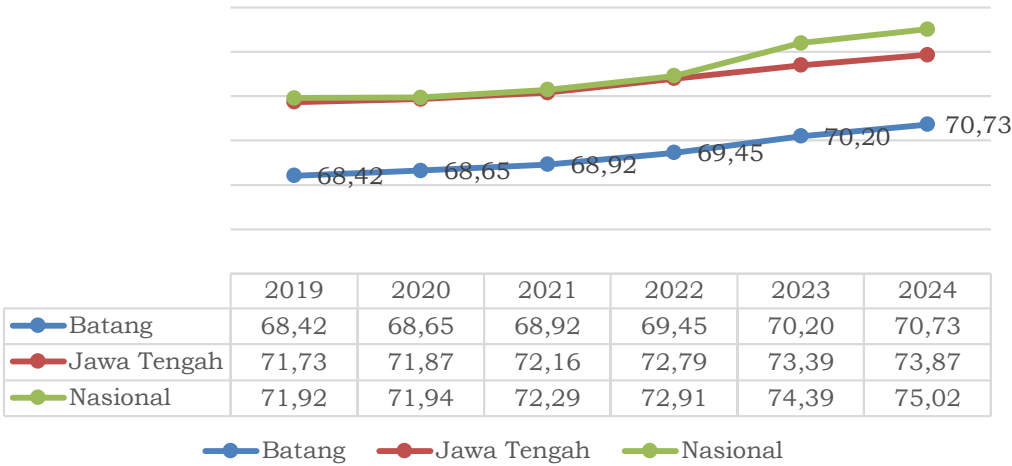
Sumber: BPS Batang, 2025

Yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan usia harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 68,42 mengalami *trend* peningkatan tiap tahunnya menjadi menjadi 70,73 di tahun 2024. Perkembangan IPM Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini:

Gambar 2.2
Perbandingan IPM Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Capaian IPM Kabupaten Batang pada Tahun 2024 berdasarkan pada empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (tahun) 75,01, Rata – rata Lama Sekolah (tahun) 7,08, Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,17, dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta rupiah/tahun) 10,919, yang selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

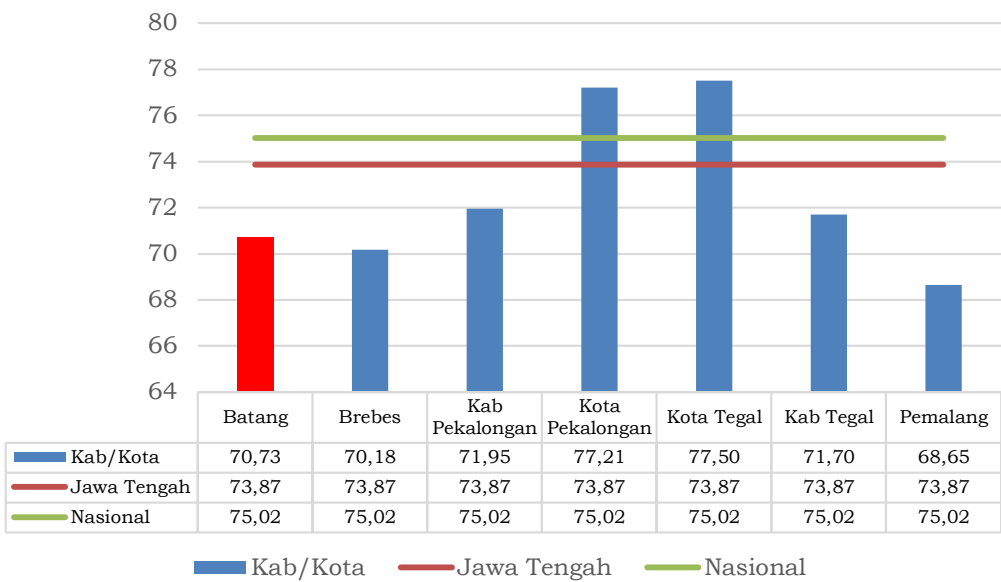
Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

Indikator Pembentuk IPM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,59	74,69	74,74	74,79	74,85	75,01
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,00	12,01	12,13	12,14	12,15	12,17
Rata Rata lama Sekolah (tahun)	6,63	6,87	6,88	6,90	7,07	7,08
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah/ orang/ tahun)	9.573	9.431	9.524	9.972	10.470	10.919

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2025

IPM Kabupaten Batang apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Pemalang (68,65) dan Kabupaten Brebes (70,18) namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah IPM (73,87) dan nasional (75,82).

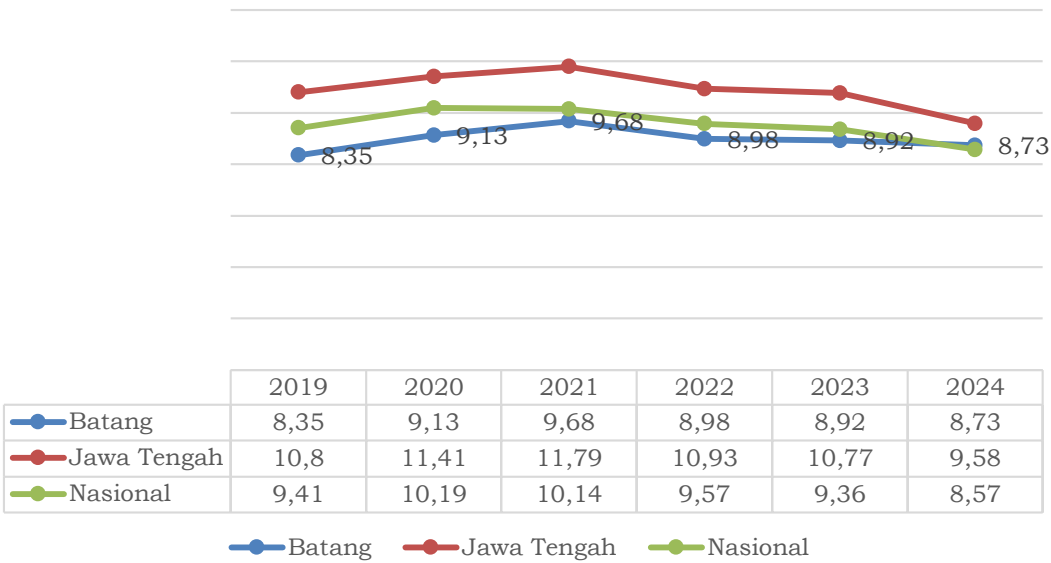
Gambar 2.4
Perbandingan IPM Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Batang mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir setelah di Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan akibat pandemi Covid 19 yang mempengaruhi segala sektor kehidupan Masyarakat namun kemudian mengalami perbaikan penurunan di tahun 2022 hingga 2024 menjadi 8,73% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 68,85 ribu jiwa capaian ini lebih baik dari capaian provinsi Jawa Tengah (9,58%) namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,57%. Perkembangan persentase penduduk miskin dengan Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.5
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024



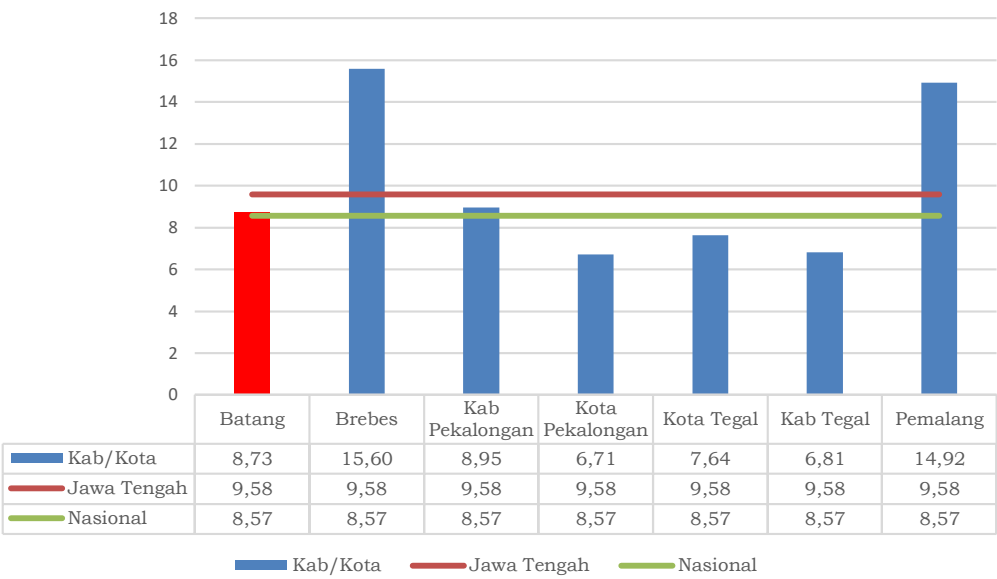
Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Batang hanya lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Brebes (15,60), Kabupaten Pemalang

(14,92) dan Kabupaten Pekalongan 8,95 namun masih lebih tinggi dari Kota Pekalongan dengan persentase penduduk miskin sebesar (6,71%) dan Kabupaten Tegal sebesar (6,81%) dan Kota Tegal (7,64%). Persentase penduduk miskin Kabupaten Batang sebesar 8,73% juga lebih baik dari Jawa Tengah sebesar 9,58% dan namun lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,57%.

Selengkapnya perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

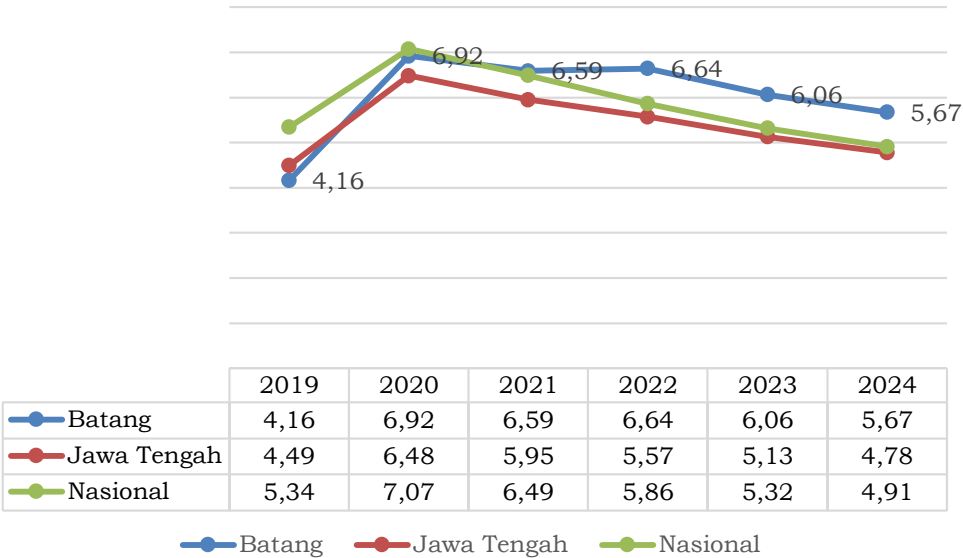
Gambar 2.6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data Sakernas tahun 2024, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Batang mencapai 488.737 orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,67% sementara Provinsi Jawa Tengah 4,78% dan Nasional 4,91% yang selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.7
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

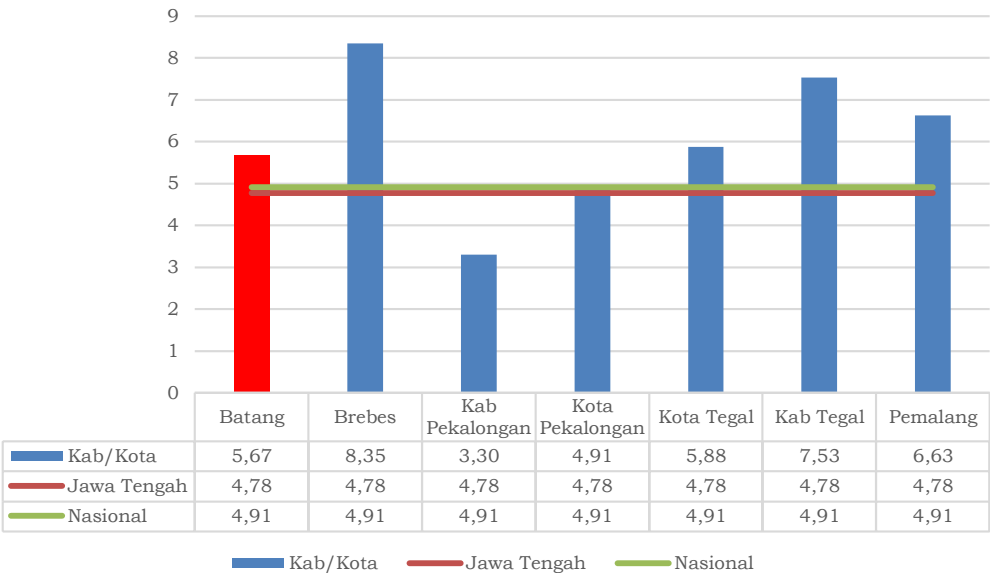


Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Menurut data tahun 2024 dari Dinas Ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2024 mencapai 3.376 orang. Jumlah tersebut meliputi pencari kerja laki-laki sebanyak 1.782 orang dan pencari kerja perempuan sebanyak 1.594 orang. Di Kabupaten Batang, lowongan kerja yang tersedia tahun 2024 sebesar 2.762 orang.

Selanjutnya, Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang lebih baik dari Kabupaten Brebes (8,35), Kabupaten Tegal (7,53), Kabupaten Pemalang (6,63) dan Kota

Tegal 5,88, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan serta capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024 mencapai angka 6,03%. Lapangan Usaha yang menopang struktur perekonomian Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14.69%, Sektor Konstruksi sebesar 13,22%, dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,36%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

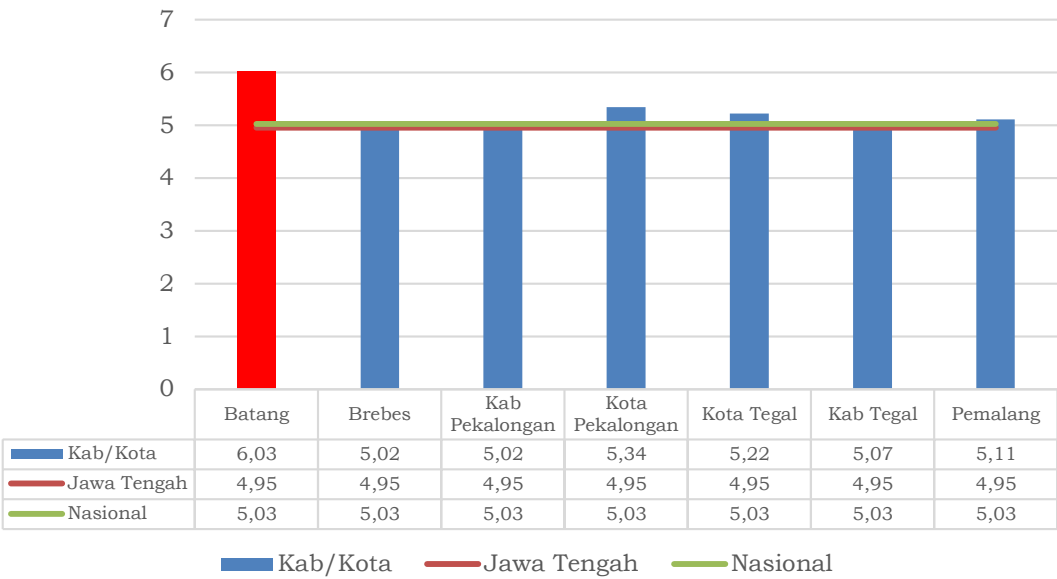
Gambar 2.9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Selanjutnya, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dengan kab/kota disekitar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Kab/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS RI, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kab Batang 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang cukup signifikan tumbuh diatas capaian kab/kota sekitar termasuk dengan capaian provinsi dan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Batang sebesar 6,03% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,95% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03% lebih tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) tidak terlepas dari sumbangan masing masing sektor perekonomian. Berikut sektor-sektor penyumbang PDRB Kabupaten Batang Tahun 2019-2024:

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024

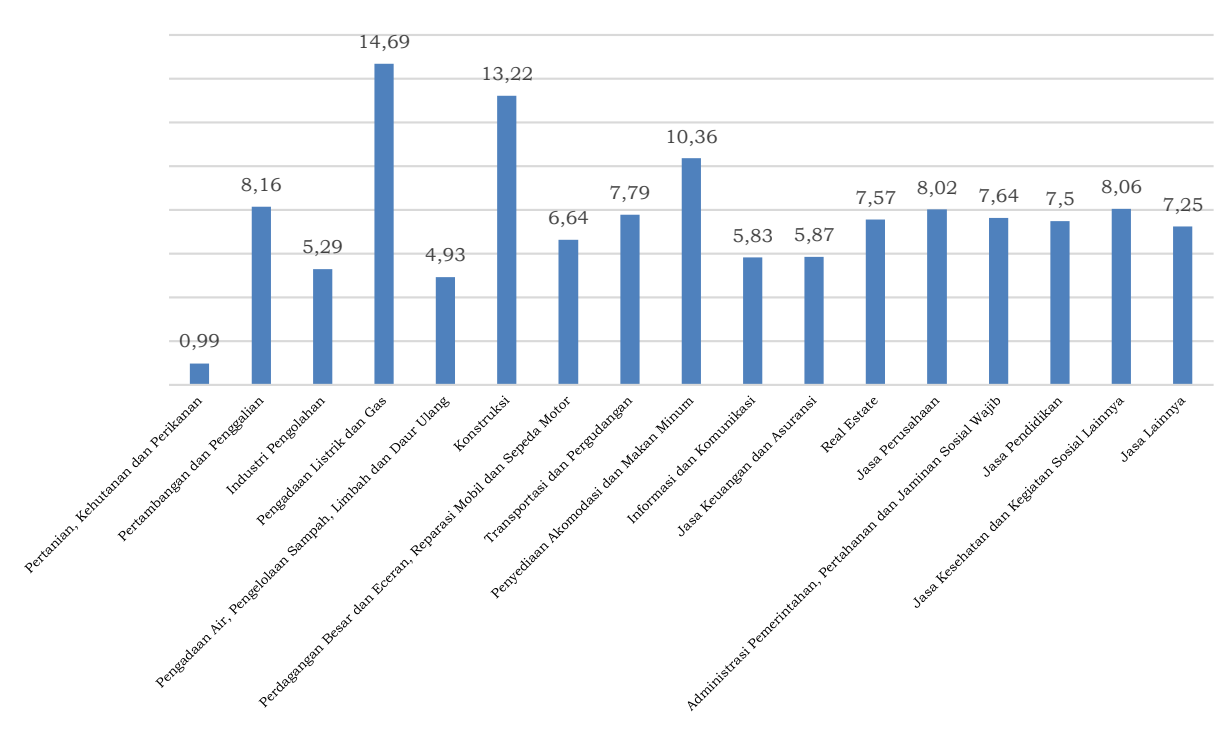
Sektor PDRB	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.24	4,06	-0,47	1,77	-0,29	0,99
B. Pertambangan dan Penggalian	0.9	-0,18	5,83	-0,76	3,19	8,16
C. Industri Pengolahan	5.45	-2,82	4,38	5,46	5,28	5,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.61	6,13	9,89	5,42	3,41	14,69
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.57	2,38	1,22	2,33	8,49	4,93

Sektor PDRB	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F. Konstruksi	1.09	-1,03	35,78	4,36	13,01	13,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.49	-4,23	5,95	3,65	6,26	6,64
H. Transportasi dan Pergudangan	8.39	-26,81	1,68	77,42	8,11	7,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.1	-6,48	5,31	20,32	14,31	10,36
J. Informasi dan Komunikasi	10.49	17,13	4,54	3,02	7,25	5,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.77	0,66	2,35	0,56	3,17	5,87
L. Real Estate	5.42	-1,26	1,33	4,67	9,23	7,57
M,N. Jasa Perusahaan	9.03	-6,74	2,65	6,56	5,14	8,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.11	-1,20	-0,74	1,79	-0,01	7,64
P. Jasa Pendidikan	7.82	-0,10	0,07	2,13	6,31	7,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	6.87	9,14	2,94	3,82	7,59	8,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10.8	-5,65	1,96	12,68	9,27	7,25
Produk Domestik Regional Bruto	5.39	-1,29	4,88	5,97	5,53	6,03

Sumber: Kab.Batang Dalam Angka, 2025

Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2024 berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14.69%, Sektor Konstruksi sebesar 13,22%, dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,36% yang masing masing sektor pada tahun 2024 tersaji pada gambar berikut:

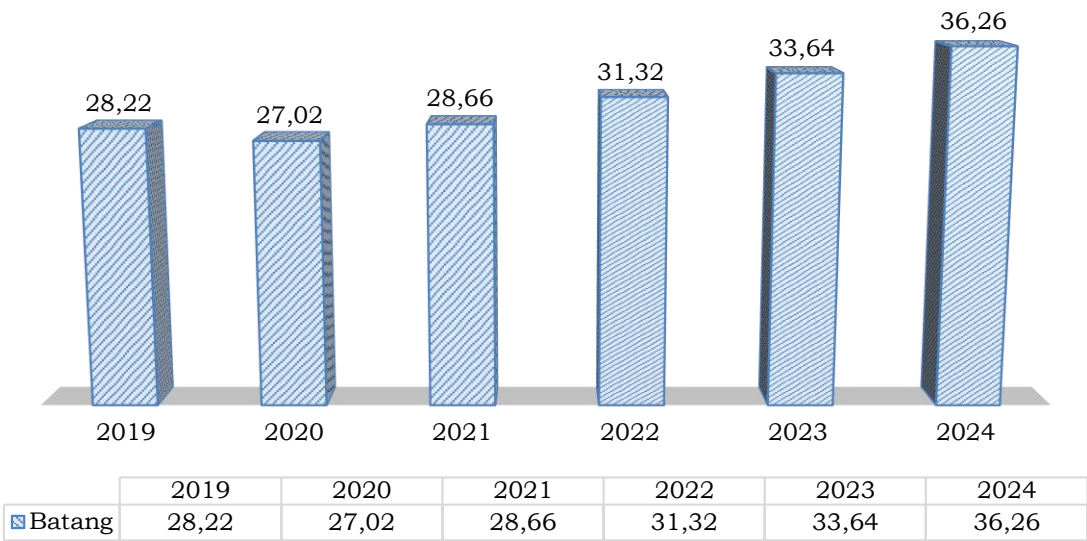
Gambar 2.12
Sektor-sektor Penyumbang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024



Sumber: BPS Kab Batang, 2025

PDRB Perkapita. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di Batang didekati dengan komponen PDRB perkapita dimana selama enam tahun terakhir PDRB perkapita mengalami perkembangan positif dari 28,22 juta tahun 2019, dan meningkat di tahun 2024 menjadi 36,26 juta. Selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

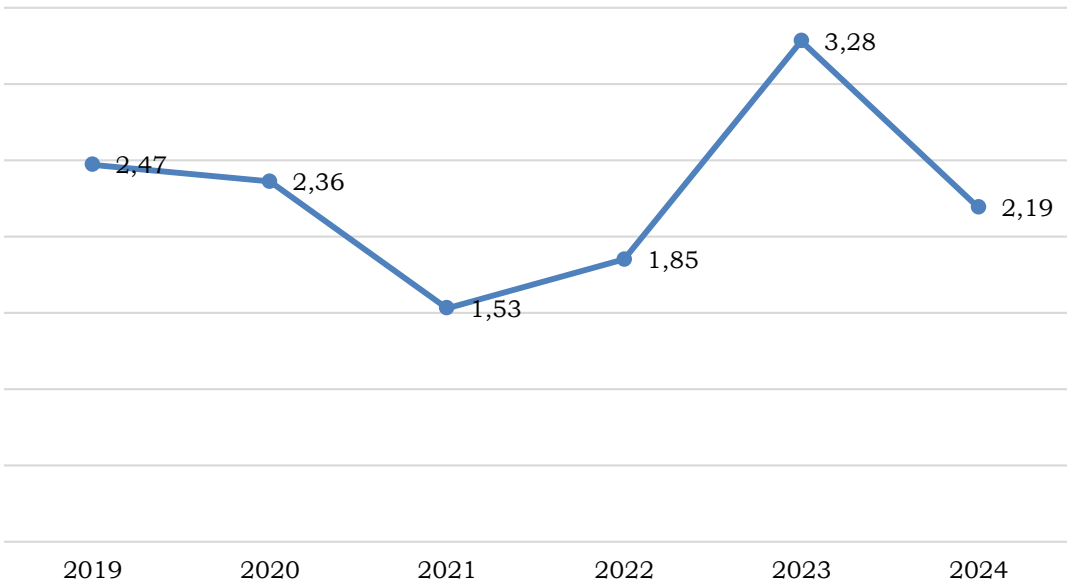
Gambar 2.13
PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2019-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2025

Laju inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju Laju inflasi Kabupaten Batang tahun 2019-2024 tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Jateng, 2025

Laju inflasi Kabupaten Batang tahun 2024 adalah sebesar 2,19 yang merupakan hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota *sampling*. Angka inflasi Kabupaten Batang diambil dari kabupaten/Kota terdekat yaitu Kota Tegal. Angka inflasi Kabupaten Batang (Kota Tegal) paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah seperti di Cilacap sebesar 1,82, Purwokerto sebesar 1,51, Kota Semarang sebesar 1,69, Kota Surakarta sebesar 1,50, Kabupaten Kudus sebesar 1,71, Kabupaten Wonogiri sebesar 1,77, Kabupaten Rembang sebesar 1,54 dan Kabupaten Wonosobo sebesar 1,52. Dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan gabungan dari 6 (enam) kota di Jawa Tengah tersebut dan inflasi nasional juga paling tinggi dimana laju inflasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 1,67 dan nasional sebesar 2,75.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

A. Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pendidikan

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
PENDIDIKAN PAUD				
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	588	lembaga	Disdikbud
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	24.157	Orang	Disdikbud
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.362	Orang	Disdikbud
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.928	Orang	Disdikbud
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.517	Orang	Disdikbud
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	320	Orang	Disdikbud
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	147	Orang	Disdikbud
PENDIDIKAN DASAR				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	525	Unit	Disdikbud

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	59.900	Orang	Disdikbud
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21.889	Orang	Disdikbud
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	57.797	Orang	Disdikbud
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.825	Orang	Disdikbud
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.381	Orang	Disdikbud
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.535	Orang	Disdikbud
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.769	Orang	Disdikbud
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.328	Orang	Disdikbud
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	908	Orang	Disdikbud
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	519	Orang	Disdikbud
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	585	Orang	Disdikbud
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	494	Orang	Disdikbud
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.046	Orang	Disdikbud
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.313	Orang	Disdikbud
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	346	Orang	Disdikbud
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	74	Orang	Disdikbud

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	3	Orang	Disdikbud
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	368	Orang	Disdikbud
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	525	Unit	Disdikbud
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	59.900	Orang	Disdikbud
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21.889	Orang	Disdikbud
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	57.797	Orang	Disdikbud
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.825	Orang	Disdikbud
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4.381	Orang	Disdikbud
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.535	Orang	Disdikbud
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.769	Orang	Disdikbud
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.328	Orang	Disdikbud
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	908	Orang	Disdikbud
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	519	Orang	Disdikbud
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	585	Orang	Disdikbud
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	494	Orang	Disdikbud
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.046	Orang	Disdikbud
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.313	Orang	Disdikbud
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda	346	Orang	Disdikbud

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	74	Orang	Disdikbud
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	3	Orang	Disdikbud
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	368	Orang	Disdikbud
PENDIDIKAN KESETARAAN				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	19	lembaga	Disdikbud
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.919	Orang	Disdikbud
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.919	Orang	Disdikbud
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	46	Orang	Disdikbud
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	182	Orang	Disdikbud
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	145	Orang	Disdikbud
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	1	Orang	Disdikbud
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	19	Orang	Disdikbud

Sumber: Disdikbud Kab. Batang, 2025 (diolah)

B. **Urusan Kesehatan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kesehatan

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Rasio Daya Tampung RS Rujukan				
1	Jumlah RS rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	545	Unit	Dinkes
Persentase RS rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi				
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3	unit	Dinkes
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	972.237.500	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	9.664	Orang	Dinkes
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	249.194.000	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	9.153	Orang	Dinkes
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	159.508.000	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	9.146	Orang	Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	87.469.500	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	46.311	Orang	Dinkes
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	368.606.000	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	116.503	Orang	Dinkes
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.050.000	Rupiah	Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	470.849	Orang	Dinkes
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan				

No IKK	IKK Output	DATA LPPD			
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data	
sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	24.985.000	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	109.299	Orang	Dinkes	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15.090.000	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	157.008	Orang	Dinkes	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.085.179.000	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	17.446	Orang	Dinkes	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.525.000	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.096	Orang	Dinkes	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	879.680.750	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	8.885	Orang	Dinkes	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	287.065.000	Rupiah	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	14.973	Orang	Dinkes	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Batang tahun 2025 (Diolah)

C. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	246,41	ha	DPUPR
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	12300	m	DPUPR
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WSkewenangan kota (ha)	5,58	ha	DPUPR
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	600	m	DPUPR
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/kota	Ada	ada/tidak	DPUPR
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	246,41	ha	DPUPR
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	12.300	m	DPUPR
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	5,58	ha	DPUPR
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	600	m	DPUPR
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	ada	ada/tidak	DPUPR
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	40,00	%	DPUPR

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	39,65	%	DPUPR
3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	0	%	DPUPR
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota				
1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	tidak ada	ada/tidak	DPUPR
2	Tersusun dan ditetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	tidak ada	ada/tidak	DPUPR
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM	1	BUMD/UPTD	DPUPR
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Izin	DPUPR
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	9	kerjasama	DPUPR
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	998	rumah	DPUPR
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	rumah	DPUPR
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	998	rumah	DPUPR
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	593	rumah	DPUPR
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	593	rumah	DPUPR
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	187.796	rumah	DPUPR
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	3,71	%	DPUPR
8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	84,71	%	DPUPR
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	16,69	%	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	3,71	%	DPUPR
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50	%	DPUPR

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	76,50	%	DPUPR
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	78,10	%	DPUPR
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	98,83	%	DPUPR
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	67,50	%	DPUPR
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	160	Izin	DPUPR
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	ada/tidak	DPUPR
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	tidak	ada/tidak	DPUPR
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	tidak	bangunan	DPUPR
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota	0	bangunan	DPUPR
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	5112	bangunan	DPUPR
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	200	bangunan	DPUPR
Rasio Kemantapan Jalan Kab/Kota				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota	540,45	km	DPUPR
2	Panjang jalan yang dibangun	7,83	km	DPUPR
3	Panjang jembatan yg dibangun	0	m	DPUPR
4	Panjang jalan yang ditingkatkan	0	km	DPUPR
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	m	DPUPR
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	11,7	km	DPUPR
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	136,7	m	DPUPR
8	Panjang jalan yang dipelihara	22,86	km	DPUPR
9	Panjang jembatan yang dipelihara	1,20	km	DPUPR
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	orang	DPUPR
2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/ analis yang terlatih di wilayah kota	89	orang	DPUPR
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota	89	orang	DPUPR
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	0	ada/tidak	DPUPR

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	tidak	ada/tidak	DPUPR
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	tidak	ada/tidak	DPUPR
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	tidak	ada/tidak	DPUPR
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	tidak	ada/tidak	DPUPR
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	tidak	ada/tidak	DPUPR
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota	tidak	orang	DPUPR
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	tidak	orang	DPUPR
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	orang	DPUPR
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUPR
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUPR
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki	tidak	ada/tidak	DPUPR

No IKK	IKK Output	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	TDUP di wilayah kota			
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	tidak	ada/tidak	DPUPR
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	tidak	ada/tidak	DPUPR
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUPR
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUPR
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUPR

Sumber: DPUPR Kab. Batang, 2025 (diolah)

D. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota				
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanggulangannya	3.377	unit	DPRKP
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2	unit	DPRKP
3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2 RT, 2 KK, 10 jiwa	orang	DPRKP
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2	unit	DPRKP
5	Jumlah rumah unit rumah korban yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	unit	DPRKP
6	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun baru/rehabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	unit	DPRKP
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	unit	DPRKP
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 RT, 2 KK, 10 jiwa	orang	DPRKP
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Ha	DPRKP
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota				
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	DPRKP
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	DPRKP
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	DPRKP
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	DPRKP
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	DPRKP

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Ha	DPRKP
Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				
1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh	105,38	Ha	DPRKP
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	14.612	Unit	DPRKP
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	40,56	Ha	DPRKP
Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
1	Jumlah rumah di Kab. /kota	193.767	Rumah	DPRKP
2	Jumlah Unit PK RTLH	14.612	Rumah	DPRKP
3	Jumlah Rumah tidak layak huni	36.589	Rumah	DPRKP
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Rumah	DPRKP
5	Rasio Rumah dan KK = Jumlah KK (268.197) / Jumlah total unit rumah (193.767)	138,412	%	DPRKP
6	Jumlah rumah pembangunan baru	28	Rumah	DPRKP
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
1	Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU	91	perumahan	DPRKP
2	Jumlah Unit Rumah yang sudah difasilitasi air minum	7550	rumah	DPRKP
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	7550	rumah	DPRKP
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	7550	rumah	DPRKP
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	91	perumahan	DPRKP
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	7550	rumah	DPRKP
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	pengembang	DPRKP
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	36	pengembang	DPRKP
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	76	pengembang	DPRKP

Sumber: DPRKP Kab. Batang, 2025 (diolah)

E. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	172	kasus	Satpol PP
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	7.197	orang	Satpol PP
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	17	perda	Satpol PP
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	orang	Satpol PP
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	14	SOP	Satpol PP
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	309	unit	Satpol PP
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	507	layanan	Satpol PP
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	pos	Satpol PP
3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Ada/tidak	Satpol PP
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	pos	Satpol PP
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	277	sarpras	Satpol PP
6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	5	orang	Satpol PP
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	118	orang	Satpol PP

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	kegiatan	Satpol PP
Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan informasi Rawan Bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRP sampai dengan dinyatakan sah/legal	50	%	BPBD
2	Persentase jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
2	Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
3	Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	%	BPBD
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	%	BPBD
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	%	BPBD
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	%	BPBD
2	Persentase kecepatan responkurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	%	BPBD
3	Persentase jumlah petusah yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	BPBD

Sumber: Satpol PP & BPBD Kab. Batang, 2025 (diolah)

F. **Urusan Sosial**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Sosial

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	905	layanan	Dinsos
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.937	orang	Dinsos
3	Jumlah Tim Rekasi Cepat yang dibentuk	1	Tim	Dinsos
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng yang dijangkau	1.937	orang	Dinsos
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	unit	Dinsos
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	32	orang	Dinsos
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	rumah	Dinsos
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang	32	orang	Dinsos
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima alat bantu	44	orang	Dinsos
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	jml/jenis	Dinsos
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	paket	Dinsos
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	32	orang	Dinsos
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	orang	Dinsos
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang sediakan	386	orang	Dinsos
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,	0	orang	Dinsos

No IKK	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/selter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	48	keg	Dinsos
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	31	orang	Dinsos
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.667	orang	Dinsos
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	26	orang	Dinsos
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi keluarga	26	orang	Dinsos
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	31	orang	Dinsos
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	3.241	orang	Dinsos
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	12	orang	Dinsos
3	Jumlah penampungan pengungsi yang dimiliki	1	penampungan	Dinsos
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	250	paket	Dinsos
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	122	orang	Dinsos
6	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan social yang tersedia	148	orang	Dinsos

Sumber: Dinsos Kab. Batang, 2025 (diolah)

G. **Urusan Tenaga Kerja**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan tenaga kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Tenaga Kerja

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	NA	%	Sekretariat/ Disnaker
1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota	NA	Dokumen	Penta/ Disnaker
1.2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	NA	%	Penta/ Disnaker
1.3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	NA	Perusahaan	HI/Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.4	Persentase LPK yang terakreditasi	NA	%	Penta/ Disnaker
2.5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	NA	%	Penta/ Disnaker
2.6	Jumlah penganggur yang dilatih	NA	Orang	UPTD BLK/ Disnaker
2.7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.8	Persentase penyerapan lulusan	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker
2.9	Lulusan bersertifikat kompetensi	NA	%	UPTD BLK/ Disnaker

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
2.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	NA	%	Penta/ Disnaker
2.11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	NA	Keg. Pelatihan	Penta/ Disnaker
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	NA	%	Penta/ Disnaker
3.1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan	NA	%	Penta/ Disnaker
3.2	Data tingkat produktivitas total	NA	%	Penta/ Disnaker
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	NA	%	HI/ Disnaker
4.1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	NA	%	HI/ Disnaker
4.2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	NA	%	HI/ Disnaker
4.3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	NA	SP/SB	HI/ Disnaker

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
4.4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	NA	%	HI/ Disnaker
4.5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	NA	%	HI/ Disnaker
4.6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	NA	%	HI/ Disnaker
4.7	Jumlah mogok kerja	NA	Mogok	HI/ Disnaker
4.8	Jumlah penutupan perusahaan	NA	perusahaan	HI/ Disnaker
4.9	Jumlah perselisihan kepentingan	NA	perselisihan	HI/ Disnaker
4.10	Jumlah perselisihan antar SP/SB dalam 1 perusahaan	NA	Perselisihan	HI/ Disnaker
4.11	Jumlah perselisihan PHK	NA	Perselisihan	HI/ Disnaker
4.12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	NA	Pekerja	HI/ Disnaker
4.13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	NA	Perselisihan	HI/ Disnaker
4.15	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	NA	LKS	HI/ Disnaker
4.16	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	NA	%	HI/ Disnaker
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu)	NA	%	PENTA/ Disnaker

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	daerah dalam wilayah kab/kota			
5.1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kota	NA	Lowongan	PENTA/ Disnaker
5.2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	NA	Orang	PENTA/ Disnaker
5.3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	NA	BKK	PENTA/ Disnaker
5.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota	NA	11	PENTA/ Disnaker
5.5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	NA	Orang	PENTA/ Disnaker
5.6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	NA	Lembaga	PENTA/ Disnaker
5.7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	NA	Perjanjian	HI/ Disnaker
5.8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	NA	Orang	PENTA/ Disnaker
5.9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	NA	Orang	PENTA/ Disnaker
5.10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	NA	Orang	PENTA/ Disnaker

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
5.11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	NA	%	PENTA/ Disnaker
5.12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	NA	%	PENTA/ Disnaker
5.13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	NA	%	PENTA/ Disnaker
5.14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	NA	%	PENTA/ Disnaker

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

H. **Urusan Pangan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pangan

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan lainnya	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Ada/tidak penanganan daerah rawan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

I. **Urusan Pertanahan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan pertanahan tahun 2024 menggunakan surat pernyataan karena memang tidak tersedia. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanahan

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	NA	N/A	N/A
2	SK Bupati/Walikota tentang penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum dan daftar subjek	NA	N/A	N/A
3	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum	NA	N/A	N/A
4	Dokumen Izin membuka tanah	NA	N/A	N/A
5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kota	NA	N/A	N/A

Sumber: PRKP Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

J. **Urusan Lingkungan Hidup**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan lingkungan hidup tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Lingkungan Hidup

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota a) Indeks Kualitas Air b) Indeks Kualitas Udara c) Indeks Tutupan Hutan	17,10 25,38 27,42	 % % %	IKPLHD IKPLHD IKPLHD
2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	77,99	%	Data Sampah
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan daerah Kab/Kota	-	N/A	N/A
3.1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	-	%	DLH
3.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	-	%	DLH
3.3	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	-	%	DLH
3.4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	%	N/A
3.5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	%	N/A
3.6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin	100	%	DLH

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kab/ kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

K. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase KTP Elektronik				
1	Persentase akta perkawinan	57,89	%	Disdukcapil
2	Persentase akta perceraian	58,3	%	
3	Penertiban akta kematian	99,75	%	
4	Penyajian data kependudukan	100	%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

L. **Urusan Perhubungan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perhubungan

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Ketersediaan konektivitas	NA		
1.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang	NA	%	Dishub Batang

	angkutan jalan Tipe C			
1.2	Terlaksananya pelayanan uji Berkala	NA	%	Dishub Batang
1.3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonom	NA	Kali	Dishub Batang
2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	NA	%	Dishub Batang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

M. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi				
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	Instansi Penyelenggaraan Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara			
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	75	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kota				
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, 2025 (Diolah)

N. **Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota	26,31	%	Dinas Koperasi dan UKM

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0	%	Dinas Koperasi dan UKM
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	50,24	%	Dinas Koperasi dan UKM
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	64,39	%	Dinas Koperasi dan UKM
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	100	%	Dinas Koperasi dan UKM
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	56,06	%	Dinas Koperasi dan UKM
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	0.028	%	Dinas Koperasi dan UKM
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1,5	%	Dinas Koperasi dan UKM
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	62,78	%	Dinas Koperasi dan UKM
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	0.015	%	Dinas Koperasi dan UKM
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	0	%	Dinas Koperasi dan UKM
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	68,57	%	Dinas Koperasi dan UKM

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kota	0,0047	%	Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,0019	%	Dinas Koperasi dan UKM
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	%	Dinas Koperasi dan UKM
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	%	Dinas Koperasi dan UKM
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,0003	%	Dinas Koperasi dan UKM
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,0021	%	Dinas Koperasi dan UKM
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,0019	%	Dinas Koperasi dan UKM
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0	%	Dinas Koperasi dan UKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

O. **Urusan Penanaman Modal**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan penanaman modal tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
Persentase peningkatan investasi di kota			
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	NA	DPMPTSP
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	NA	DPMPTSP
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	NA	DPMPTSP
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	NA	DPMPTSP
5	Kegiatan penerimaan misi penanaman	NA	DPMPTSP

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	modal		
6	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	7	DPMPTSP
7	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	28.324	DPMPTSP
8	Laporan realisasi penanaman modal	7.560.059.80 Trilyun	DPMPTSP
9	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	2	DPMPTSP
10	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	64 investor	DPMPTSP
11	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kota	Ada	DPMPTSP

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

P. Urusan Pemuda dan Olahraga

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemuda dan Olahraga

No	IKK Output			
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	NA	Orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	NA	Orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	NA	Orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	NA	Orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Prestasi Olahraga				
1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan	NA	Orang	Dinas Pariwisata Kepemudaan

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	pendidikan			dan Olahraga
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	NA	Event	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Q. Urusan Statistik

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan statistik tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	1	Jumlah Survey	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	Jumlah Kompilasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Jumlah Survey	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	3	Jumlah Kompilasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

R. **Urusan Persandian**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan persandian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Persandian

No	IKK Output	Data LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Tingkat keamanan informasi pemerintah				
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

S. **Urusan Perpustakaan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan perpustakaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan

No	IKK Output			
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	76,95	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	8,27	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,14	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40,59	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	IKK Output			
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di Masyarakat	-	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	-	Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	Koleksi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang, 2025 (Diolah)

T. Urusan Kearsipan

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan kearsipan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tahun 2024				
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	52,47%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	77,36%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	100%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	90,73%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

U. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	5348	KK	DISLUTKANNAK
2	Presentase tempat pelelngan Ikan yang operasional	100	%	DISLUTKANNAK
3	Jumlah IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam sati daerah kabupaten kota yang diterbitkan	bukan kewenangan	Izin	DISLUTKANNAK
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dab pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaaan	86	Pembudidaya	DISLUTKANNAK
5	Jumlah benih budidaya	26.133.000	Benih	DISLUTKANNAK

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	air tawar dan air payau yang di produksi			

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

V. **Urusan Pariwisata**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Pariwisata tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	135/35	%	DISPARPORA
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	135/35	%	DISPARPORA
3	jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	1651	TDUP	DISPARPORA
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	701	Orang	DISPARPORA
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6	Kegiatan	DISPARPORA
6	Jumlah wisatawan Nusantara per kebangsaan	991.759	Orang	DISPARPORA
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	15	Industri	DISPARPORA
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	40	%	DISPARPORA
9	Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan sektor	50	Orang	DISPARPORA
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	4	Lokasi	DISPARPORA

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

W. **Urusan Pertanian**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Pertanian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	254	Unit	Dinas Pangan Dan Pertanian
2	Prasarana Pertanian yang digunakan	18	Unit	Dinas Pangan Dan Pertanian
3	Penerbitan izin usaha pertanian	172	Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
4	Persentase sarana pertanian yang digunakan	100	%	Dinas Pangan Dan Pertanian
5	Persentase jumlah usulan usaha izin usaha pertanian	100	%	Dinas Pangan Dan Pertanian

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Batang, 2025 (diolah)

X. **Urusan Perdagangan**

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada Urusan Perdagangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
1	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	121	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
2	umlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	121	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
1	Realisasi pupuk	19.254.885	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
2	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	27.639.435	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
1	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	1893	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
2	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	2254	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM

Sumber : Disperindagkop & UKM Kab.Batang, 2025 (diolah)

Y. Urusan Perindustrian

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Perindustrian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	13,09	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
2	Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	100	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Kinerja realisasi sasaran Pembangunan industry tahun 2024 (110)	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100	%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	tersedia	dokumen	DISPERINDAGKOP DAN UKM

Sumber : Disperindagkop & UKM Kab. Batang, 2025 (diolah)

X. Urusan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja kunci keluaran (IKK Output) pada urusan Pertanian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	DATA LPPD		
		Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	Kawasan	Dinas Ketenagakerjaan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1	Pemukiman	Dinas Ketenagakerjaan
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi difasilitasi yang pembinaannya	1	Pemukiman	Dinas Ketenagakerjaan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

A. Urusan Pendidikan

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Pendidikan

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	27.549	100	%	Disdikbud
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan	27.549			Disdukcapil
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	82.475	100	%	Disdikbud
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan	82.475			Disdukcapil
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	39.732	100	%	Disdikbud
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	39.732			Disdukcapil
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	8.527	5,52	%	Disdikbud
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab. yang bersangkutan	154.586			Disdikbud

Sumber : Disdikbud Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan pendidikan terdapat 4 indikator, pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi

warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan pada indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan capaian kinerja sebesar 5,52%.

B. Urusan Kesehatan

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Kesehatan

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Rasio daya tampung RS rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kab/Kota	545	0,06	%	Dinkes
		Jumlah penduduk di Kab/Kota	849.686			disdukcapil
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3	100	%	Dinkes
		Jumlah RS di kab/kota	3			Dinkes
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9.664	105,58	%	Dinkes
		Jumlah ibu hamil di kab/kota	9.153			Dinkes
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	9.153	100	%	Dinkes
		Jumlah ibu bersalin di kab/kota	9.153			Dinkes
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.146	100	%	Dinkes
		Jumlah bayi baru lahir di kab/kota	9.146			Dinkes
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai	46.311	100	%	Dinkes

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
	standar	standar				
		Jumlah balita di kab/kota	46.311			Dinkes
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan standar	116.503	95,33	%	Dinkes
		Jumlah anak pendidikan dasar di kab/kota	122.207			Dinkes
8	Persentase orang usia 15- 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	470.849	86,20	%	Dinkes
		Jumlah orang usia 15-59 di kab/kota	546.248			Disdukcapil
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	109.229	96,10	%	Dinkes
		Jumlah orang usia 60 tahun keatas di kab/kota	113.728			Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlh penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	157.008	100	%	Dinkes
		Jumlah penderita hipertensi di kab/kota	157.008			Dinkes
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	17.446	100	%	Dinkes
		Jumlah penderita DM di kab/kota	17.446			Dinkes
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.096	100	%	Dinkes
		Jumlah penderita ODGJ di kab/kota	2.096			Dinkes

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	8.885	100	%	Dinkes
		Jumlah penderita TBC di kab/kota	8.885			Dinkes
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar	14.973	100	%	Dinkes
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kab/kota	14.973			Dinkes

Sumber: Dinkes Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan kesehatan terdapat 14 indikator dimana seluruhnya sudah terisi. terdapat 9 indikator yang mendapat capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan pada indikator lain seperti daya tampung RS rujukan nilai capaian kinerja sebesar 0,06%, Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 95,33%, Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 86,20% dan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 96,10%.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	88,90	36,08	%	DPUPR
		Luas kawasan permukiman rawan	246,41			DPUPR

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
	kabupaten/kota	banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/ kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	0,00	%	DPUPR
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	5,58			DPUPR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksistting	13.912,53	68,43	%	DPUPR
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	20.329,90			DPUPR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	103.278	43,88	%	DPUPR
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	235.357			DPUPR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	187.796	79,79	%	DPUPR
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	235.357			DPUPR
6	Rasio kepatuhan IMB	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai	160	100	%	DPUPR

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
	kabupaten/ kota	peruntukannya				
		Jumlah IMB yang berlaku	160			DPUPR
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap	461,04	85,31	%	DPUPR
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	540,45			DPUPR
8	Rasio tenaga operator/teknis i/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	89	83,96	%	DPUPR
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	106			DPUPR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	95	100	%	DPUPR
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	95			DPUPR

Sumber : Dinas PUPR Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 9 indikator dimana seluruhnya sudah terisi. 2 indikator mendapat capaian kinerja sebesar 100% yaitu Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota dan Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi. Sedangkan capaian kinerja indikator lain yang perlu mendapat sorotan yaitu Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota sebesar 85,31%, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 79,79%, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 68,43%, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 43,88%, Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota sebesar 36,08% dan Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota dengan capaian kinerja 0%.

D. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2024	2	100	%	DPRKP
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2024	2			DPRKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan lahan dan atau bangunan+rumahh tangga penerima subsidi uang sea rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0	%	DPRKP
		Jumlah total rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0			DPRKP
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	40,56	38,49	%	DPRKP
		Luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha	105,38			DPRKP
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	36.589	18,88	%	DPRKP
		Jumlah totoal unit rumah di kab/kota	193.767			DPRKP
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	7550	30,96	%	DPRKP
		Jumlah unit perumahan di kab/kota	24388			DPRKP

Sumber: DPRKP Kab, Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat 5 indikator dimana semuanya terisi. Terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja 100% yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

kabupaten/kota. Sedangkan beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani sebesar 38,49%, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar 18,88% dan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 49,10%. Sementara itu pada indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota capaian kinerja 0% karena memang tidak ada rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	172	100	%	Satpol PP
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	172			Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	17	100	%	Satpol PP
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	17			Satpol PP
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	54	80,60	%	Satpol PP
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	67			Satpol PP
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	12,22	Menit	Satpol PP

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	213.987	100	%	BPBD
		Jumlah warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai targer yang ditetapkan	213.987			BPBD
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	213.987	100	%	BPBD
		Jumlah warganegara ynag berada di kawasan rawan bencana	213.987			BPBD
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	14			BPBD

Sumber: Satpol PP & BPBD, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat 7 indikator dimana seluruh indikator telah terisi. Terdapat 5 indikator yang telah mendapat capaian kinerja sebesar 100% sedangkan 1 indikator lainnya yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran medapatkan capaian kinerja sebesar 80,60%. Adapun untuk indikator Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran capaian kinerja telah melampaui standar yaitu dengan waktu 12,22 menit.

F. Urusan Sosial

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Capaian indikator kunci hasil (IKK Outcome) urusan Sosial

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.937	100	%	Dinsos

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.937			Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	3.375	100	%	Dinsos
		populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	3.375			Dinsos

Sumber: Dinsos Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan sosial terdapat 2 indikator dimana seluruh indikator telah terisi dan mencapai kinerja sebesar 100%.

G. Urusan Tenaga Kerja

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan tenaga kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	8	28,57	%	Disnaker
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	28			Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki	198	0,63	%	Disnaker

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
	Bersertifikat Kompetensi	sertifikat kompetensi				
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	31638			Disnaker
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		-	%	Disnaker
		Jumlah tenaga kerja	31638			Disnaker
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	145	36,25	%	Disnaker
		Jumlah perusahaan	400			Disnaker
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	6361	97,20	%	Disnaker
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar	6544			Disnaker

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2025 (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan tenaga kerja terdapat lima indikator dimana ada empat indikator yang telah terisi dan satu indikator lainnya belum terisi. Capaian IKK outcome pada indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah sebesar 28,57%. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 0,63%. Indikator tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar

0%. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 36,25% dan persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota tercapai sebesar 97,20%.

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	47.688.771.235,00	2,81	%	DP3AP2KB
		Jumlah seluruh belanja operasi dan modal di APBD	1.699.074.177.476,00			
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	25	100	%	DP3AP2KB
		Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang Menjadi kewenangan kabupaten kota	25			
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	13	0,0031	%	DP3AP2KB
		Jumlah penduduk perempuan	421.290			

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
	100.000 penduduk perempuan)					

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 3 indikator.

I. Urusan Pangan

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Pangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	123,023	206,1	%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah Kebutuhan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	59,69			Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan pangan hanya terdapat satu indikator. Capaian IKK outcome pada indikator persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan adalah sebesar 206,1%.

J. Urusan Pertanahan

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan tenaga pertanahan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah yang sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	801.549 rb m ²	100	%	Pertimbangan
		Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	801.549 rb m ²			Teknis Pertanahan
2		Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	28.440 rb m ²	100	%	Pertimbangan
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	28.440 rb m ²			Teknis Pertanahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukkannya di atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	675003,05	100	%	Pertimbangan
		Luas tanah di atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	675003,05			Teknis Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan	Jumlah penerima tanah Landreform dengan luasan tanah lebih besar sama dengan 0,5 ha	NIHIL	0	%	Pertimbangan
		Jumlah penerima tanah obyek Landreform				Teknis Pertanahan
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	NIHIL	0	%	Pertimbangan
		Luas izin membuka tanah yang diterbitkan				Teknis Pertanahan
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	6	100	%	Mediasi
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	6			Pengaduan

Sumber: DPRKP Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Penunjang Urusan Pertanahan terdapat 6 indikator dimana terdapat 3 indikator yang telah terisi.

K. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan lingkungan hidup tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Air	57	69.91	%	DLH
		Indeks Kualitas Udara	84.61			
		Indeks Tutupan Hutan	68.56			
2.	Terlaksananya Pengadaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	144,082	77.99	%	DLH
		Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	184,871			
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	100	100%	%	DLH
		usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	100			

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan lingkungan hidup terdapat tiga indikator dimana seluruhnya sudah terisi.

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Perekaman KTP-elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP	633.242	99,54	%	Disdukcapil
		Jumlah Penduduk berumur 17 tahun	636.149			
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki KIA	123.168	57,18	%	Disdukcapil
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	215.404			
3	kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki akta lahir	218.986	96,66	%	Disdukcapil
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	226.550			
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	7	25,92	%	Disdukcapil

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
	perjanjian kerjasama	Jumlah OPD	27			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK *Outcome* urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil terdapat empat indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator pengurusan E-KTP adalah sebesar 99,54%. Persentase KIA sebesar 57,18%. Kepemilikan akta kelahiran sebesar 96,66 atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%) dan pemanfaatan data oleh OPD sebesar 25,92%.

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53

Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1.	Persentase Pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasar kan Indeks Desa Desa Membangun per tahun	0	100	%	Dispermades
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0			
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa	31	18,90	%	Dispermades

		Membangun per tahun				
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	164			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat dua indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal terdapat dua indikator dengan capaian sebesar 100% Kedua, Kemudian pada persentase peningkatan status desa mandiri, terdapat dua indikator dengan capaian sebesar 18,90%.

N. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		1,32	%	DP3AP2KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	96.328	71,06	%	DP3AP2KB
		Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	135.552			
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.908	8,05	%	DP3AP2KB
		Jumlah Pasangan Usia Subur	135.552			

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK *Outcome* urusan pengendalian penduduk dan perlindungan anak terdapat tiga indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator TFR (Angka Kelahiran Total) adalah sebesar 1,32%. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) sebesar 71,06% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$) dan indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 8,05% atau masuk dalam kategori sangat rendah ($\leq 50\%$).

O. **Urusan Perhubungan**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK\ 1 \times$ bobot angkutan jalan) + $(IK2 \times$ Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan	1,2	2,46	%	Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
		yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)	3			

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan perhubungan terdapat satu indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator rasio konektivitas kabupaten/kota adalah sebesar 2,46%.

P. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	42	100%	%	DISKOMINFO
		Jumlah OPD	42			
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	28	100%	%	DISKOMINFO
		Jumlah layanan publik	28			
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	547,404	94,76%	%	DISKOMINFO
		Jumlah penduduk	577,694			

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan komunikasi dan informatika terdapat tiga indikator dimana ketiga indikator sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo adalah sebesar 100%. Capaian indikator persentase

layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 100% dan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 94,76%.

Q. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	103	78,03	%	Disperindagkop
		Jumlah seluruh koperasi aktif	132			
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	165	0.20	%	Disperindagkop
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	84451			

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan koperasi dan usaha kecil menengah terdapat dua indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator meningkatnya koperasi yang berkualitas adalah sebesar 78,03% dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 0,20%.

R. Urusan Penanaman Modal

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan penanaman modal tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kab/Kota	6.389.043.817.635 – 6.175.695.295.783	3,5	%	Disperindagkop
		Jumlah investasi tahun n-1 di Kab/Kota	6.175.695.295.783			

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan penanaman modal hanya terdapat satu indikator dimana sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota mengalami angka minus yaitu sekitar 3,5%.

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	1899	0,005	%	Disparpora
		Jumlah pemuda (umur 16-30	370.668			

		tahun) di kabupaten/kota				
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	1674,34	0,45	%	Disparpora
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	370.668			
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	71	71	medali	Disparpora

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan kepemudaan dan olahraga terdapat tiga indikator sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah sebesar 0,005%. Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 0,45% dan peningkatan prestasi olahraga sebesar di tahun 2024 sebesar 71 medali.

T. Urusan Statistik

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan statistik tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam	42	100	%	Diskominfo

	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		Jumlah OPD	42			
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	42	100	%	Diskominfo
		Jumlah OPD	42			

Sumber: Diskominfo Kab. Batang 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan statistik terdapat dua indikator dimana seluruhnya indikator sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dan indikator OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebesar 100%.

U. Urusan Persandian

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan persandian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	645	100	%	Diskominfo
		Jumlah Area Penilaian	645			

Sumber: Diskominfo Kab. Batang 2024 ((Diakses pada 2 Maret 2024 Pukul 09.00)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan persandian hanya terdapat satu indikator dimana capaian untuk indikator tingkat keamanan informasi pemerintahan sebesar 100%.

V. **Urusan Kebudayaan**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan kebudayaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9	100,00	%	Disdikbud
		Jumlah cagar budaya yang terdata	9			

Sumber: Disdikbud Kab. Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan kebudayaan hanya terdapat satu indikator dimana capaian untuk terlestarikannya cagar budaya sebesar 100,00%.

W. **Urusan Perpustakaan**

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan perpustakaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Kategori Tinggi	73,95	Indeks	Disperpuska
2	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode	UPLM 1 sampai UPLM 7	65,78	Indeks	Disperpuska

		sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)				
--	--	---	--	--	--	--

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan perpustakaan terdapat dua indikator dimana seluruhnya sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 73,95 (Indeks) tahun 2024 dan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 65,78 (Indeks).

X. Urusan Kearsipan

Capaian indikator Kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan kearsipan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ $T =$ tingkat ketersediaan arsip $a =$ persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip 100 $i =$ persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip 100 $s =$ persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 $j =$ persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam	100 + 100 + 100 + 0,11% / 4	75,03	%	Disperpuska

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
		SIKN melalui JIKN 0,37				
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip liasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat	52,47 + 77,36 + 100 + 90,78 + 0+ 0 / 6	53,43	%	Disperpuska

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Data LPPD			
			Elemen Data	Capaian Kinerja	Satuan	OPD dalam Urusan
		tertutup dengan NSPK				

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada IKK Outcome urusan kearsipan terdapat dua indikator dimana semua indikator sudah terisi. Capaian IKK outcome pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah sebesar 75,03%. Sedangkan capaian indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 53,43%.

Y. Urusan Pertanian

Berikut Capaian Kinerja dalam disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil pada urusan Pertanian Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanian

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian per hektar per tahun	266.093,4	565,29	%	Dinas Pangan dan Pertanian
		luas panen	47.072			

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Batang, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Pertanian sepanjang tahun 2024 memiliki 1 indikator yaitu indikator prokduktifitas pertanian perhektar pertahun, Jumlah produksi pertanian per hektar per tahun sebesar 266.093,4 dibagi luas panennya 47.072 capaian sebesar 565,29% setiap Tahun, urusan pertanian dalam kategori sangat tinggi (≥90%).

Z. **Urusan Pariwisata**

Capaian indikator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan pariwisata tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pariwisata

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)	725	104,2	%	DISPARPORA
		Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1	693			
2	Persentase Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota a	991.759	149,8	%	DISPARPORA
		Jumlah wisatawan tahun n-1	662.041			
3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	N/A	N/A	%	BPS
		Jumlah kamar yang tersedia	N/A			
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	3.114.091.500	N/A	%	DISPARPORA
		Total PBRB Berlaku	N/A			
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota	Total realisasi PAD dari sektor Pariwisata	6.885.449.508	0.03	%	DISPARPORA
		Jumlah total PAD	1.952.527.881.452.30			

Sumber: Dinas Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Batang, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Pariwisata sepanjang tahun 2024 memiliki 5 indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 104,2% kategori sangat tinggi (≥90%), Persentase Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 149% kategori sangat tinggi (≥90%), sedangkan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota masih 0,03% kategori sangat rendah (<50%).

AA. Urusan Perindustrian

Capaian indikator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan perindustrian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perindustrian

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n-1)	1.497	13.09	%	Dinas perindagkop UMKM
		Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-1	11.440			
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Capaian realisasi sasaran pembangunan industrri Tahun 2024	110	%	Dinas perindagkop UMKM
		Jumlah izin yang dikeluarkan	PERDA RPIK			
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100	%	Dinas perindagkop UMKM
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1			
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	2	100	%	Dinas perindagkop UMKM
		Jumlah izin yang dikeluarkan	2			

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota					
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		Tersedia	1	dok	Dinas perindagkop UMKM
	1. Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 0 6 bulan					
	2. Tersedianya informasi industri dengan atas waktu 7 12 bulan					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian indikator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan perindustrian tahun 2024 terdapat lima indikator secara umum sudah maksimal seperti Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK terdiri Pertumbuhan sektor non, Kontribusi industri non mogas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industry non migas, Jumlah Tenaga Kerja di sektor indust dan Nilai investasi di sektor industry migas dengan rata-rata skor kinerja mencapai 110,44% dalam kategori sangat tinggi (≥90%).

BB. Urusan Perdagangan

Capaian indikator kinerja kunci hasil (IKK Outcome) pada urusan perdagangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Perdagangan

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	121	100	%	Disperind agkop UMKM
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/k ota	121			
2		Realisasi	19.254.885	69,66	%	Disperind

	Persentase kinerja realisasi pupuk	pupuk				agkop UMKM
		Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	27.639.435			
3	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	1893	83.98	%	Disperind agkop UMKM
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/k ota	2254			

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Perdagangan sepanjang tahun 2024 memiliki 3 indikator dengan capaian sebesar 100% Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) atau dalam kategori sangat tinggi (≥90%) Sedangkan Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku mencapai 83,98% dan pada Persentase kinerja realisasi pupuk 69,66%.

CC. Urusan Kelautan dan Perikanan

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024:

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan kelautan dan Perikanan

No	IKK Outcome	Rumus	Data LPPD			Sumber Data
			Elemen Data	Capaian	STN	
1	Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya dari seluruh kabupaten	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten atau kota	30.542,54	97	%	Dislutkanak
		Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya yang ditetapkan)	31. 464			

Sumber: Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Batang, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil urusan Kelautan dan perikanan dengan Produksi Perikanan Tangkap dan

budidaya dari seluruh kabupaten mencapai 97% hail dari Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten atau kota 30.542,54 dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya yang ditetapkan) 31.464, urusan Kelautan dan perikanan dalam kategori sangat tinggi (≥90%).

2.2.3. Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang

A. Perencanaan Keuangan

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Perencanaan Keuangan Kabupaten Batang tahun 2024:

Tabel 2.70

Indikator Kinerja Kunci Hasil Perencanaan Keuangan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	26,09	BPKAD
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18,37	BPKAD
		Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,18	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil Penunjang Perencanaan Keuangan memiliki beberapa indikator dengan capaian masing-masing: 1) Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan sebesar 26,09%, (2) Rasio PAD sebesar 18,37% (3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masuk kategori 3, (4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masuk kategori 3, (5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure) dengan persentase 66,18%, dan (6) Opini Laporan Keuangan dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. Pengadaan

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Pengadaan Kabupaten Batang tahun 2024:

Tabel 2.71

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pengadaan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bag. PBJ
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	91,66%	Bag. PBJ
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	51,12%	Bag. PBJ BPKPAD
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-7,16%	Bag. PBJ

Sumber: Bag. PBJ & BPKAD Kabupaten Batang, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Penunjang Pengadaan memiliki beberapa indikator dengan rincian masing-masing sebagai berikut: (1) Indikator Kinerja Kunci Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya (yang ditandatangani pada kuartal pertama) memiliki Jumlah 0 pada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024; (2) Indikator Kinerja Kunci Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif memiliki persentase sebesar 91,66%; (3) Indikator Kinerja Kunci Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan memiliki persentase sebesar 51,12%; dan (4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebesar -7,16%.

C. Kepegawaian

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Kepegawaian Kabupaten Batang tahun 2024:

Tabel 2.72

Indikator Kinerja Kunci Hasil Kepegawaian

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62,68	BKD
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,97	BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,17	BKD

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Kepegawaian Daerah telah memenuhi capaian beberapa Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Kepegawaian Kabupaten Batang sepanjang tahun 2023 memiliki rincian sebagai berikut: (1) Indikator Kinerja Kunci Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar memiliki Jumlah pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas memiliki capaian sebesar 62,68%; (2) Indikator Kinerja Kunci Rasio Pegawai Fungsional memiliki capaian sebesar 19,97% (3) Indikator Kinerja Kunci Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi memiliki capaian sebesar 91,17%.

D. Manajemen Keuangan

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan Kabupaten Batang tahun 2024:

Tabel 2.73

Indikator Kinerja Kunci Hasil Manajemen Keuangan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Manajemen Keuangan	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0,70	BPKAD
		Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,99	BPKAD
		Manajemen Aset	100%	BPKAD
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,98	BPKAD

Sumber: BPKAD Kabupaten Batang, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Penunjang Manajemen Keuangan memiliki beberapa indikator dengan capaian masing-masing: (1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar -0,70%, (2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 13,99%, (3) Manajemen asset yang memiliki daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, dan proses inventarisasi tahunan, dan nilai aset yang tercantum dalam anggaran 100% semua; (4) serta Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 7,98%.

E. Transparansi dan Partisipasi Publik

Berikut disajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) untuk Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Batang tahun 2024:

Tabel 2.74

Indikator Kinerja Kunci Hasil Transparansi dan Partisipasi Publik

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	97,20%	Diskominfo dan BPKPAD
		Akses public terhadap informasi keuangan daerah	100%	Diskominfo dan BPKPAD

Sumber: Diskominfo & BPKAD Kabupaten Batang, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) Penunjang Tranparansi dan Partisipasi Publik memiliki beberapa indikator dengan capaian masing-masing: (1) Indikator Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan memiliki Capaian kinerja sebesar 97,20%; (2) Indikator Akses publik terhadap informasi keuangan daerah memiliki capaian kinerja sebesar 100%.

2.3. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. Akuntabilitas Kepala Daerah

Akuntabilitas Kepala Daerah Kabupaten Batang dilihat dari evaluasi atas indikator pada tujuan sasaran yang termuat didalam RPD Kabupaten Batang pada tahun evaluasi 2024 dimana hasil evaluasi pada keseluruhan capaian Tujuan menunjukkan rerata capaian pada tahun 2024 sebesar 83,56% atau masuk dalam kategori tinggi (76% - 90%), sementara itu, rerata capaian kinerja sasaran secara keseluruhan sebesar 73,53% atau masuk dalam kategori sedang (66% - 75%).

Adapun indikator sasaran yang masih perlu untuk ditingkatkan meliputi indeks ketahanan daerah dimana capaian kinerja di tahun 2024 masih berada pada angka 70,73% atau berada pada kategori sedang (66% - 75%) dan angka kriminalitas yang capaiannya masih sangat rendah yaitu -106,67% di tahun 2024.

Selengkapnya, hasil evaluasi capaian tujuan sasaran Kabupaten Batang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Evaluasi Capaian Tujuan Sasaran RPD Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Stn	Realisasi 2022	Kinerja Tahun 2023			Kriteria
						Target	Realisasi	%	
1	Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan		PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rp	33,64	22,3	33,64*	150,85	Sangat Tinggi
			Indeks Daya saing Daerah	Indeks	3,32	3,50	3,32*	94,86	Sangat Tinggi
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	70,20	70,00	70,73	101,04	Sangat Tinggi
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,88	91,98	92,48	101,54	Sangat Tinggi
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,44	63,96	65,63	102,61	Sangat Tinggi
		2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,53	5,10	5,53*	108,43	Sangat Tinggi
			Tingkat Pengeluaran Per Kapita	(Rp.000/ tahun)	10.470	9.803	10.919	111,38	Sangat Tinggi
		3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	20,17	21,60	20,17*	93,38	Sangat Tinggi
			Persentase Penduduk Miskin	%	8,92	8,34	8,73	95,32	Sangat Tinggi
			Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,06	5,60	5,67	98,75	Sangat Tinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Stn	Realisasi 2022	Kinerja Tahun 2023			Kriteria
						Target	Realisasi	%	
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Indeks Infrastruktur	Indeks	202,68	197,04	204,43	103,75	Sangat Tinggi
		5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,61	65,04	69,91	107,49	Sangat Tinggi
Rerata Capaian Tujuan 1								105,70	Sangat Tinggi
2	Tujuan 2: Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66,61	68,66	80,60	117,39	Sangat Tinggi
		1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	Skor	68,06	70,50	68,95	97,80	Sangat Tinggi
			Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	Level 2	level 3 (3,00)	Level 2 (2,919)	97,30,66	Sangat Tinggi
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	77,95	79,00	80,11	101,41	Sangat Tinggi
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui agile governance	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	86,24	85,45	86,91	101,71	Sangat Tinggi
Rerata Capaian Tujuan 2								103,12	Sangat Tinggi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Stn	Realisasi 2022	Kinerja Tahun 2023			Kriteria
						Target	Realisasi	%	
3	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif		Indeks Resiko Bencana	Indeks	143,13	155	143,13*	92,34	Sangat Tinggi
			Indeks rasa aman	Indeks	NA	4,2	4,47	106,43	Tinggi
		1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,47	0,81	0,57	70,37	Sedang
		2. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	83,18	72	83,18	115,53	Sangat Tinggi
		3. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	Angka Kriminalitas	%	0,03	0,015	0,02	66,67	Sedang
Rerata Capaian Tujuan 3								90,27	Sangat Tinggi
Total Rerata Tujuan								99,70	Sangat Tinggi

Sumber: buku kinerja perangkat daerah 2025, memori pelaksanaan tugas pejabat bupati batang 2022-2025 (diolah)

*) Angka Capaian tahun sebelumnya

2.3..1. Skala Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan tujuan adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Teknis analisis data yang digunakan dalam pengukuran capaian indikator kinerja yaitu analisis perbandingan. Pada analisis perbandingan ini digunakan untuk membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja sasaran. Penghitungan capaian kinerja setiap indikator sasaran menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.76
Rumus Perhitungan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Rumus
1	Indikator yang bersifat positif	Capaian = Realisasi dibagi target dikali 100%
2	Indikator yang bersifat negatif	Capaian = (2 x target) dikurangi realisasi dibagi target dikali 100%

Hasil perhitungan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja, diberikan status ketercapaian kinerja dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.77
Status Ketercapaian Kinerja

Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
>/ = 100%	Tercapai / Sesuai Target	

Selanjutnya untuk memberikan predikat kinerja atas capaian kinerja secara rata-rata dari masing – masing capaian kinerja, dan diberikan predikat kinerja atas rata – rata capaian kinerja tersebut dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja (Gradasi nilai/ skala intensitas) kinerja menggunakan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Status Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja
1	Lebih atau sama dengan 91% sampai dengan 100%	Sangat Tinggi
2	Lebih atau sama dengan 76% sampai dengan 90%	Tinggi
3	Lebih atau sama dengan 66% sampai dengan 75%	Sedang
4	Lebih atau sama dengan 51% sampai dengan 65%	Rendah
5	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

2.3.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja

Analisis dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang secara langsung mendukung ketercapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi Tahun 2024 serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Gambaran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Batang dalam mencapai sasaran strategis diperlihatkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 hasil

pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.79
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Targ et	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaika n / penurun an
					2024	2023			
1	Meningka t nya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	1	Indeks Pembang u nan Manusia (IPM)	70	70,73	70,20	100	Tercapa i/ Sesuai Target	0,74
		2	Indeks Pembang u nan Gender (IPG)	91,98	92,48	91,88	100	Tercapa i/ Sesuai Target	0,64
		3	Indeks Pemberd ayaan Gender (IDG)	63,93	65,63	64,44	100	Tercapa i/ Sesuai Target	1,81
							100		
2	Menguat kan perekono mian daerah dan kontribus i ekonomi kerakyat an bagi kemajua n daerah	1	Pertumb uhan Ekonomi	5,01 – 5,10	6,03	5,53	100%	Tercapa i/ Sesuai Target	8,29
		2	Tingkat Pengelua ran Per Kapita	Rp.9. 803,0 0/ Tahu n	Rp.1 0.919 ,-/ Tahu n	Rp.1 0.470 ,-/ Tahu n	100%	Tercapa i/ Sesuai Target	4,11
							100%		
3	Meningka t nya kesejahte raan masyarak	1	Angka Ketimpan gan (berdasar kan	21,6	19,13	20,17	100	Tercapa i/ Sesuai Target	-5,43

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Targ et	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / penurunan
					2024	2023			
	at yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran		kriteria Bank Dunia)						
		2	Presentase Penduduk Miskin	8,34 – 7,92	8,73	8,92	95,32	Tidak Tercapai	-2,17
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	5,67	6,06	98,75	Tidak Tercapai	-6,87
							98,02		
4	Meningkatnya Penyediaan dan pemerataan infrastuktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi	1	Indeks Infrastuktur	197,04	204,43	202,68	100	Tercapai / Sesuai Target	0,85
							100		
5	Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	69,91	68,61	100	Tercapai / Sesuai Target	1,85

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Targ et	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaika n / penurun an
					2024	2023			
	daya alam yang lestari dan berkelanj utan								
							100		
6	Meningka t nya efektifitas dan efesiensi kinerja dan akuntabil i tas kinerja instansi pemerint ah	1	Nilai SAKIP	70	68,95	68,06	98,5	Tidak Tercapa i	1,29
		2	Indeks Penerapa n Manajem en Resiko (MRI)	Level 3	Level 2 2,919	Level 2 2,860	97,3	Tidak Tercapa i	2.02
		3	Indeks Pengelo laan Keuanga n Daerah	79	80,11	77,95	100	Tercapa i/ Sesuai Target	2,69
							98,6		
7	Meningka tnya kualitas pelayana n publik melalui agile governan ce	1	Indeks Kepuasa n Masyarak at	85,45	86,91	86,24	100	Tercapa i/ Sesuai Target	0,31
							100		
8	Meningka t nya ketahana n daerah dalam penanggu langan	1	Indeks Ketahana n Daerah	0,81	0,57	0,47	70,37	Tidak Tercapa i	17,54

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Targ et	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / penurunan
					2024	2023			
	bencana								
							70,37		
9	Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1	Indeks Demokrasi	72	83,18	83,18	100	Tercapai / Sesuai Target	0
							100		
10	Berkurangnya angka kriminalitas di kabupaten Batang	1	Angka Kriminalitas	0,015	0,02	0,03	66,66	Tidak Tercapai	-1,45
							-66,66		
Rata-rata capaian kinerja (jumlah capaian per indikator dibagi jumlah indikator)							93,36		

Berdasarkan tabel di atas, secara kumulatif rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 93,36% Indikator kinerja yang mencapai target maupun melebihi target ada 11 (sebelas) indikator yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengeluaran Perkapita, Angka Ketimpangan, Indeks Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Ideks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Demokrasi Sedangkan indikator yang tidak mencapai target sejumlah 6 (enam) indikator yakni Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), Indeks Ketahanan Daerah dan Angka Kriminalitas. Predikat nilai capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Analisis atas realisasi dan capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang ditemui, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran tahun berikutnya. Analisis dilakukan dengan menganalisa atas *performance gap* yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

a. **Tujuan** Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut mencakup 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.80
Capaian Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang Semakin Berkualitas Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70	70,73	70,20	100	Tercapai / Sesuai Target	0,74
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98	92,48	91,88	100	Tercapai / Sesuai Target	0,64
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,93	65,63	64,44	100	Tercapai / Sesuai Target	1,81
Capaian Kinerja Sasaran (1)					100		

Sumber data : SITIKA.batangkab.go.id

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sasaran Meningkatkan Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas diukur dengan indikator sasaran adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang pada Tahun 2024 adalah sebesar 70,73. Capaian dari indikator IPM di Tahun 2024 adalah sebesar 100%, mengalami kenaikan sebesar 0,74% apabila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk dari 4 (empat) komponen yaitu Usia Harapan Hidup sebesar 75,01, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,17, Rata-rata Lama Sekolah 7,08 dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan sebesar 10,92 juta rupiah per tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Batang merupakan keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan komponen pembentuk nilai IPM.

Meskipun nilai IPM Kabupaten Batang mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi dalam proses peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Batang tetap menghadapi beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala yang harus dihadapi diantaranya :

1. Dalam Bidang Kesehatan
 - Permasalahan : masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting di Kabupaten Batang.
 - Kendala : masih sulitnya dalam melakukan pendataan jumlah kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan jumlah balita stunting sehingga bantuan kesehatan yang diberikan belum seluruhnya tepat sasaran
2. Dalam Bidang Pendidikan
 - Permasalahan : masih rendahnya angka rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk di Kabupaten Batang, rata - rata penduduk di Kabupaten Batang baru mampu menempuh Pendidikan sampai dengan lulus SD dan putus sekolah di kelas I SMP.
 - Kendala : sulitnya melakukan pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta sulitnya melakukan pendataan peserta didik yang kurang mampu sehingga bantuan pendidikan yang diberikan belum seluruhnya tepat sasaran.

3. Dalam Bidang Ekonomi

- Permasalahan : masih rendahnya pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Batang. Berdasarkan pola pengeluaran, jika dibandingkan antara pengeluaran konsumsi non pangan dengan pengeluaran untuk pangan, konsumsi non pangan masih cenderung lebih rendah yang artinya masyarakat Kabupaten Batang masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan dengan kebutuhan non pangan seperti perumahan, pakaian, dan barang/ jasa lainnya.

Berangkat dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Batang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batang berupaya dengan melaksanakan program kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator tersebut.

Di bidang Kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup menjadi faktor yang meningkatkan Usia Harapan Hidup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batang berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Batang dengan melaksanakan program kegiatan pendukung penyediaan fasilitas kesehatan seperti pembangunan dan renovasi pusat layanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan makanan minuman bergizi dan penyediaan sumber daya manusia kesehatan/ tenaga medis, selain itu juga program kegiatan pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berperan meningkatkan angka Harapan Hidup masyarakat miskin di Batang.

Untuk mengatasi kendala pendataan penerima bantuan jaminan kesehatan, mulai Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Batang telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), dengan demikian penduduk Kabupaten Batang yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai peserta UHC akan langsung mendapatkan layanan kesehatan. Penduduk yang didaftarkan tersebut diprioritaskan bagi penduduk yang sedang membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan di rawat inap, menderita penyakit kronis, lanjut usia, ibu hamil, bayi dan penyandang disabilitas. Dalam hal pelayanan UHC ini dilaksanakan secara lintas sektoral antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, dan BPJS.

Di bidang Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Batang berusaha memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dari perkotaan sampai dengan pedesaan dan memenuhi ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam peningkatan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata

Lama Sekolah penduduk Kabupaten Batang. Untuk membantu penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya sehingga tidak putus sekolah. Bagi penduduk yang mengalami putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan pendidikan non formal melalui pemberian kursus – kursus ketrampilan.

Di bidang ekonomi untuk meningkatkan pengeluaran perkapita masyarakat Batang maka Pemerintah Kabupaten Batang melalui perangkat daerah terkait melaksanakan program kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Batang diantaranya dengan fasilitasi dan bantuan modal bagi pertumbuhan industri kecil atau UMKM, pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi angkatan kerja, pemberian bantuan sosial dan lain-lain.

Rencana aksi untuk kedepannya, pembangunan di bidang kesehatan, Pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat Batang akan terus ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya sehingga semua masyarakat Batang dapat merasakan pelayanan kesehatan, Pendidikan dan ekonomi dengan kualitas baik dan merata.

- Untuk penghitungan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang Tahun 2024 masih menggunakan angka realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023 karena untuk angka IPG Tahun 2024 belum direlease dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sumber data dari *website* BPS Prov.Jawa Tengah update terbaru Tanggal 27 April 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2023 adalah sebesar 92,48. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 91,88, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kenaikan sebesar 0,64. Peningkatan IPG Kabupaten Batang tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan gender di Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik dimana kesenjangan atau *gap* antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Keberhasilan dalam pencapaian pembangunan gender tidak lepas dari keberhasilan pembangunan manusia (IPM) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. IPM perempuan sebesar 68,34 dan IPM laki-laki sebesar 73,9 (Sumber Data: BPS Kab. Batang update 27 April 2024).
- Perhitungan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang Tahun 2024 juga masih menggunakan angka realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2023 karena untuk angka IDG Tahun 2024 belum direlease dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sumber data dari *website* BPS Kab. Batang update terbaru

Tanggal 27 April 2024. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang adalah sebesar 65,63. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 64,44, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami kenaikan sebesar 1,81. Komponen- komponen pembentuk IDG Kabupaten Batang yaitu :

- a. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
Ketelibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Batang berdasarkan data dari *website* BPS sebesar 17,78 dari keterlibatan laki-laki sebesar 82,22. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 15,56 naik sebesar 12,48. (*Sumber Data: BPS Kabupaten Batang update 27 April 2024*). Jumlah ini masih kurang dari ketentuan dimana jumlah kuota perempuan dalam parlemen yang sekurang – kurangnya 30% (Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2018).
- b. Sumbangan Pendapatan Perempuan
Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Batang berdasarkan data dari *website* BPS sebesar 28,36 naik dari tahun sebelumnya sebesar 27,96 (*Sumber Data : BPS update 27 April 2024*).
- c. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional
Perempuan sebagai tenaga professional di Kabupaten Batang berdasarkan data dari *website* BPS sebesar 59,02 naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 48,68 (*Sumber Data: BPS Prov. Jawa Tengah update 27 April 2024*).

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPJMD:

Tabel 2.81
Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

N o	Indikator Kinerja	Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahun 2024	Targe t Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,65	68,92	69,45	70,20	70,73	70,68
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,47	91,86	91,88	92,48	Blm Releas e	92,47

3	Indeks Pemberdayaa n Gender (IDG)	63,81	64,43	64,44	65,63	Blm Releas e	63,99
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------

Sumber data : *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas tersebut didukung oleh :

- a) Program Pengelolaan Pendidikan;
- b) Program Pengembangan Kurikulum;
- c) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- d) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- g) Program Pengendalian Penduduk;
- h) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks);
- i) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
- j) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- k) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
- l) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
- m) Program Perlindungan Khusus Anak;
- n) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- o) Program Perlindungan Perempuan;
- p) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- q) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- r) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- s) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- t) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- u) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- v) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- w) Program Pembinaan Perpustakaan;
- x) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,73	75,02	73,87
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,48	91,85	92,87
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,63	76,90	74,18

Sumber data : *jateng.bps.go.id*

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk perbandingan capaian realisasi indikator IPM Tahun 2024, Kabupaten Batang masih lebih rendah dari capaian realisasi IPM nasional dan Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Nilai IPM dari kabupaten/ kota sekitar sebagai berikut : Kabupaten Kendal 74,34, Kabupaten Pekalongan : 71,95, Kabupaten Pemalang 68,65 dan Kabupaten Tegal 71,70. Jika dibandingkan dengan nilai IPM dari kabupaten/ kota sekitar tersebut, IPM Kabupaten Batang lebih tinggi dari Kabupaten Pemalang dan lebih rendah dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Tegal.

Untuk perbandingan IPG, Kabupaten Batang masih lebih tinggi dari nilai IPG Nasional tetapi masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Nilai IPG dari kabupaten/ kota sekitar sebagai berikut : Kabupaten Kendal 94,29, Kabupaten Pekalongan : 92,83, Kabupaten Pemalang 87,14 dan Kabupaten Tegal 88,64. Jika dibandingkan dengan nilai IPM dari kabupaten/ kota sekitar tersebut, IPG Kabupaten Batang lebih tinggi dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, lebih rendah dari Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.

Untuk perbandingan IDG, Kabupaten Batang masih lebih rendah dari nilai IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Apabila dibandingkan dengan Nilai IDG dari kabupaten/ kota sekitar sebagai berikut : Kabupaten Kendal 77,58, Kabupaten Pekalongan : 69,78, Kabupaten Pemalang 81,48 dan Kabupaten Tegal 73,43. Jika dibandingkan dengan nilai IDG dari kabupaten/ kota sekitar tersebut, IDG Kabupaten Batang lebih rendah dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)sebagai berikut :

Tabel 2.83
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG),
dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Tahun 2024

No	Pogram Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	166.155.665.994	58.230.735.328	107.924.929.666
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.750.000.000	2.723.049.000	26.951.000
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.300.000.000	2.172.367.800	127.632.200
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.194.849.074	180.404.150.500	19.790.698.574
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.537.331.500	1.416.876.090	120.455.410
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	632.031.000	555.127.000	76.904.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.847.383.000	1.743.221.000	104.162.000
8	Program Pengendalian Penduduk	602.116.000	602.075.500	40.500
9	Program Pemberdayaan	4.613.700.000	4.613.700.000	0

	Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)			
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.760.853.528	6.473.175.551	287.677.977
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0	0	0
12	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	59.565.000	59.565.000	0
13	Program Perlindungan Khusus Anak	47.450.000	47.126.500	323.500
14	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.850.000	24.850.000	0
15	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000	10.000.000	0
16	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.535.000	129.518.600	16.400
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.835.000.000	1.577.841.407	257.158.593
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.141.041.922	6.652.835.359	488.206.563
19	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	0
20	Program Pembinaan Perpustakaan	523.071.579	517.869.000	5.202.579
21	Program Pelatihan	1.259.745.850	1.233.530.567	26.215.283

	Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Jumlah		398.624.189.447	269.387.614.202	129.236.575.245

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.129.236.575.245 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 398.624.189.447. Sisa anggaran terbesar dari Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis dalam proses pencairan anggaran dan adanya keterlambatan turunnya juknis pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh pada proses penyerapan anggaran.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.84

Perbandingan Penganggaran Pendukung Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang Semakin Berkualitas Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	166.155.665.994	178.931.485.378
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.750.000.000	1.425.600.000
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.300.000.000	2.338.300.000
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	200.194.849.074	214.054.155.778,78
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.537.331.500	1.723.203.000
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	632.031.000	539.764.000
7	Program Pengendalian Penduduk	1.847.383.000	412.214.000
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	602.116.000	4.379.625.000

9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	4.613.700.000	8.463.113.790
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.760.853.528	1.090.174.000
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0	0
12	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	59.565.000	45.000.000
13	Program Perlindungan Khusus Anak	47.450.000	37.340.000
14	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.850.000	0
15	Program Perlindungan Perempuan	10.000.000	156.720.000
16	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.535.000	55.000.000
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.835.000.000	2.712.500.000
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.141.041.922	8.758.000.000
19	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	250.000.000
20	Program Pembinaan Perpustakaan	523.071.579	474.540.800
21	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.259.745.850	1.587.183.510
Jumlah		398.624.189.447	425.097.957.556,78
Selisih (3-4)		-26.473.768.109,78	

Sumber data : BPKPAD Kab.Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada selisih pengurangan anggaran sebesar Rp.26.473.768.109,78. Pengurangan anggaran tersebut sebagai bentuk efisiensi anggaran dari program kegiatan yang dilaksanakan, untuk dialihkan pada program kegiatan prioritas lainnya.

- 2) Meningkatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah

Gambaran ketercapaian sasaran Menguatkan perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.85
Capaian Sasaran Menguatkan Perekonomian Daerah dan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Bagi Kemajuan Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,01-5,10	6,03	5,53	100%	Tercapai	8,29
2	Tingkat Pengeluaran Per Kapita	Rp.9.803,00/ Tahun	Rp.10.919 / Tahun	Rp.10.470 / Tahun	100%	Tercapai	4,11
Capaian Kinerja Sasaran (2)					100%		

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Menguatkan perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah Tahun 2024 sebesar 100%, capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja sasaran tersebut diukur dari indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Per Kapita

- Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita dan perubahan pada struktur ekonomi seperti contohnya pada pembangunan Kawasan industri. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditentukan artinya bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian telah berhasil memberikan dampak nyata di masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. PDRB Kabupaten Batang di Tahun 2024 didukung

oleh beberapa lapangan usaha. 5 (lima) besar lapangan usaha pendukung PDRB Kabupaten Batang di Tahun 2024 adalah (1) Pengadaan listrik dan gas sebesar 14,69, (2) Konstruksi sebesar 13,22, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,36 (4) Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,16 dan (5) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya sebesar 8.06. Realisasi PDRB pada lapangan usaha tersebut tidak lepas dari keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang sudah mulai beroperasi. Beberapa perusahaan sudah mulai menjalankan proses produksinya. Hal ini yang menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang sangat tinggi. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023 meningkat sebesar 8,29%.

- Tingkat Pengeluaran Per Kapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia. Tingkat pengeluaran per kapita adalah rata – rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap orang dalam satu periode waktu. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Tingkat pengeluaran per kapita Kabupaten Batang Tahun 2024 sebesar Rp.10.919,- meningkat sebesar 4,11% apabila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran per kapita Tahun 2023 sebesar Rp.10.470,-. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Batang semakin meningkat. Pengeluaran per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka semakin tinggi tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat. Semakin membaiknya ekonomi, maka semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor pendukung meningkatnya tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Batang diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang semakin meningkat, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk Batang semakin baik;
2. Pendapatan penduduk Kabupaten Batang semakin tinggi. Dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan berimbas pada semakin tingginya tingkat pengeluaran;
3. Tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Batang yang semakin tinggi, sehingga penduduk Batang menjadi lebih produktif.

Faktor penghambat tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Batang diantaranya :

1. Adanya kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa;
2. Kelangkaan atau tidak adanya substitusi barang kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPJMD:

Tabel 2.86
Perkembangan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Ekonomi	-1,29	4,88	5,97	5,53	6,03	5,30-5,50
2	Tingkat Pengeluaran Per Kapita	Rp.10.531,-	Rp.10.655,-	Rp.9.972,-	Rp.10.470,-	Rp.10.919,-	Rp.9.989,-

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Menguatkan perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah didukung oleh :

- a) Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- d) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- e) Program Pemasaran Pariwisata;
- f) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- g) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- h) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- i) Program Promosi Penanaman Modal;
- j) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- k) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- l) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- m) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- n) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- o) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- p) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- q) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- r) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- s) Program Penyuluhan Pertanian;
- t) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- u) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;

- v) Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- w) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- x) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- y) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
- z) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
- aa) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- bb) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
- cc) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- dd) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- ee) Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM;
- ff) Program Pengembangan UMKM;
- gg) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- hh) Program Pengembangan Ekspor;
- ii) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- jj) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri;
- kk) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- ll) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- mm) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- nn) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- oo) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- pp) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- qq) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- rr) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- ss) Program Perizinan Usaha Pertanian.
- tt) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- uu) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- vv) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- ww) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- xx) Program Aplikasi Informatika.

Capaian realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,03	4,95	5,02

2	Tingkat Pengeluaran Per Kapita	Rp.10.919,-	Rp.12.340,-	Rp12.276,-
---	--------------------------------	-------------	-------------	------------

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Dari tabel perbandingan capaian realisasi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024, realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai angka paling tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Apabila dibandingkan dengan realisasi kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang merupakan yang tertinggi maka artinya bahwa pembangunan perekonomian yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk tingkat pengeluaran per kapita, Kabupaten Batang masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan nasional, karena tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Batang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pendapatan penduduk Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Memperkuat perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.88
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

N o	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	430.000.000	430.000.000	0
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.375.000.000	1.365.000.000	10.000.000
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	399.820.000	180.000
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.459.518.056	3.904.548.421	554.969.635

5	Program Pemasaran Pariwisata	248.198.210	247.862.350	335.860
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175.270.105	175.087.227	182.878
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	87.330.000	87.264.845	65.155
8	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	87.200.000	86.587.600	612.400
9	Program Promosi Penanaman Modal	84.000.000	82.557.716	1.442.284
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	540.718.760	533.674.260	7.044.500
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.547.000	424.470.000	6.077.000
12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89.746.400	89.339.842	406.558
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	2.522.450.968	2.437.714.700	84.736.268

	Pertanian			
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.581.449.747	7.424.590.695	156.859.052
16	Program Pengendalian Dan Penanggulanga n Bencana Pertanian	45.000.000	42.965.000	2.035.000
17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	276.500.000	271.493.850	5.006.150
18	Program Pengawasan Keamanan Pangan	37.510.000	37.308.400	201.600
19	Program Penyuluhan Pertanian	697.959.950	661.305.650	36.654.300
20	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.152.855.000	1.135.603.972	17.251.028
21	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.000.000	3.000.000	0
22	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.375.700	13.669.700	6.706.000
23	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	209.265.650	202.049.150	7.216.500

24	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	188.827.950	182.769.950	6.058.000
25	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	7.179.500.000	6.914.117.800	265.382.200
26	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kot a	0	0	0
27	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000	44.621.000	5.379.000
28	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	22.400.000	21.244.500	1.155.500
29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.511.013.148	4.402.314.462	108.698.686
30	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000	17.415.000	7.585.000
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	208.613.400	194.528.579	14.084.821
32	Program Pengembangan UMKM	29.624.300	28.394.800	1.229.500
33	Program Stabilisasi Harga Barang	109.725.000	106.527.310	3.197.690

	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
34	Program Pengembangan Ekspor	66.905.000	65.985.000	920.000
35	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	102.166.500	101.894.590	271.910
36	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	0	0	0
37	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.715.307.800	1.714.244.200	1.063.600
38	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	38.000.000	36.978.500	1.021.500
39	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	888.725.100	787.306.500	101.418.600
40	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	0	0	0
42	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	300.000.000	299.866.650	133.350
43	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000	10.000.000	0
Jumlah		36.599.703.744	34.984.122.219	1.615.581.525

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Memperkuat perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.615.581.525,- dari target anggaran sebesar Rp.36.599.703.744,-. Sisa anggaran terbesar ada pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar Rp. 554.969.635,- .

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.89
Perbandingan Penganggaran Pendukung
Memperkuat Perekonomian Daerah dan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan Bagi
Kemajuan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	430.000.000	405.000.000
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.375.000.000	1.101.500.000
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	100.000.000
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.459.518.056	2.256.075.367
5	Program Pemasaran Pariwisata	248.198.210	415.000.000
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175.270.105	215.000.000
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	87.330.000	150.000.000

	Ekonomi Kreatif		
8	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	87.200.000	61.265.500
9	Program Promosi Penanaman Modal	84.000.000	73.734.500
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	540.718.760	894.618.250
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	430.547.000	437.650.800
12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	89.746.400	89.746.400
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.522.450.968	1.559.278.250
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.581.449.747	1.453,100.499
15	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	245.000.000	257.150.000
16	Program Penanganan Kerawanan Pangan	276.500.000	34.100.000
17	Program Pengawasan Keamanan Pangan	37.510.000	587.626.000
18	Program Penyuluhan Pertanian	697.959.950	210.750.000
19	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.152.855.000	11.102.447
20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.000.000	55.000.000

21	Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi	20.375.700	314.848.250
22	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	89.746.400	110.000.000
23	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	209.265.650	10.307.000.000
24	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	188.827.950	0
25	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	7.179.500.000	0
26	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0	25.600.000
27	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	50.000.000	3.367.858.624
28	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	22.400.000	0
29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4.511.013.148	44.640.400
30	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	25.000.000	139.000.000
31	Program Pengembangan UMKM	208.613.400	133.450.000
32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	29.624.300	82.250.000
33	Program Pengembangan	109.725.000	189.165.513

	Ekspor		
34	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	66.905.000	0
35	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	102.166.500	2.402.104.600
36	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0	62.243.250
37	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.715.307.800	420.428.300
38	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	38.000.000	275.000.000
39	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	888.725.100	34.464.250
40	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	0	458.642.471
41	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	300.000.000	0
42	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000	405.000.000
		36.599.703.744	29.139.393.671
	Selisih (3-4)	7.460.310.073	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Menguatkan perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp.7.460.310.073,- . Kenaikan jumlah anggaran pendukung ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dibidang perekonomian untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batang.

- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.90
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata Serta Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	21,6	19,13	20,17	100	Tercapai/ Sesuai Target	-5,43
2	Persentase Penduduk Miskin	8,34	8,73	8,92	95,32	Tidak Tercapai	-2,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	5,67	6,06	98,75	Tidak Tercapai	-6,87
Capaian Kinerja Sasaran (3)					98,02		

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran mencapai 98,02% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja tersebut diukur dari indikator kinerja Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

- Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) Kabupaten Batang pada Tahun 2024 sebesar 19,13 dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar 5,43%, dalam hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Batang telah berhasil dalam menurunkan Angka Ketimpangan. Indikator Angka Ketimpangan diukur

dari Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Angka ketimpangan (Gini Ratio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk dan distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia. Angka Ketimpangan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Apabila hal ini terjadi, berarti pembangunan yang dilaksanakan masih lebih berpihak kepada segelitik orang (orang kaya), sedangkan yang lain (orang miskin) belum dapat menikmatinya. Dalam rangka untuk menekan Angka Ketimpangan di Kabupaten Batang, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang berusaha untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari proses perencanaan untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan program kegiatan di lapangan. Dalam rangka untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Batang harus melalui serangkaian tahap kegiatan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dan kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal dokumen perencanaan dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam proses pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran dan merata dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

- Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebesar 8,73% dengan capaian kinerja sebesar 95,32% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Realisasi indikator Presentase Penduduk Miskin Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terdapat penurunan angka kemiskinan sebesar 2,17%. Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2024 ini belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masih menghadapi kendala dan masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang, antara lain :
 4. Pemerintah Kabupaten Batang belum mempunyai kebijakan strategis mengenai pengentasan kemiskinan;
 5. Masih terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial;
 6. Masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah;
 7. Akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan;
 8. Database kemiskinan yang belum terintegrasi dan kurang *terupdate*, kondisi database kemiskinan yang belum terintegrasi dan *terupdate* menimbulkan perbedaan dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan tidak tepat sasaran;

9. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah, masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks sehingga memerlukan upaya yang besar dalam penanganannya termasuk di dalamnya adalah faktor anggaran. Dengan terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang maka intervensi terhadap upaya pengentasan kemiskinan menjadi terbatas tidak semua program yang mendukung sasaran pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan optimal. Strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengintervensi pengentasan kemiskinan diantaranya :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
 - a. Pembebasan biaya pendidikan untuk siswa PAUD, SD dan SMP;
 - b. Bantuan biaya pendidikan non formal;
 - c. Pemberian jaminan kesehatan;
 - d. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, BPNT dan PKH;
 - e. Bantuan sosial lanjut usia dan disabilitas;
 - f. Bantuan sandang untuk korban bencana;
 - g. Bantuan modal usaha dan alat bantu bagi disabilitas;
 - h. Bantuan cadangan pangan beras.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin
 - a. Penyediaan kesempatan kerja;
 - b. Peletihan bagi UMKM;
 - c. Pelatihan berbasis kompetensi;
 - d. Bantuan alat bagi UMKM / wirausaha baru;
 - e. Kemitraan dengan koperasi dan KUB
3. Mengurangi kantong kemiskinan
 - a. Pembangunan akses jalan dan jembatan yang mendukung akses perekonomian;
 - b. Pengurangan Kawasan kumuh;
 - c. Perbaikan RTLH;
 - d. Bantuan bibit/ benih;
 - e. Pelatihan kewirausahaan;
 - f. Hibah kepada kelompok tani, peternak dan nelayan;
 - g. Bantuan keuangan kepada desa.

- Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Batang Tahun 2024 sebesar 5,67 dengan capaian kinerja sebesar 98,75% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Batang Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 6,06 maka terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 6,87%, meskipun realisasi kinerja tersebut belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2024 yaitu sebesar 5,6.

Dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Batang beberapa tantangan harus dihadapi diantaranya masih terdapat penduduk usia

produktif atau angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena tidak semua keahlian yang dimiliki penduduk usia produktif atau angkatan kerja tersebut dibutuhkan dalam pasar kerja atau karena keterbatasan modal penduduk usia produktif atau angkatan kerja tidak bisa mengimplementasikan ketrampilan yang dimilikinya untuk menciptakan usaha mandiri. Disamping itu, terjadinya bonus demografi menjadi tantangan dalam penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan pembangunan daerah.

Berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Batang, namun hal ini perlu disertai dengan berbagai upaya, diantaranya dengan peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batang. Strategi dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengatasi masalah pengangguran, diantaranya:

1. Pengadaan data base tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri, Pemerintah Kabupaten Batang telah menerbitkan Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Sistem Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Batang. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Ketenagakerjaan melakukan pendataan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam hal ini SDM yang dibutuhkan di KITB;
2. Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) beserta sarana prasarana pendukungnya; penduduk usia produktif atau angkatan kerja yang ada diberikan berbagai pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka sebelum memasuki dunia kerja;
3. Mendorong angkatan kerja muda menjadi wirausaha mandiri, memberikan stimulus bagi angkatan kerja muda yang akan berwirausaha sendiri dengan memberikan bantuan ketrampilan, peralatan sampai dengan modal usaha.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.91
Perkembangan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata serta Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	21,26	21,79	22,41	20,17	19,13	21,8
2	Presentase Penduduk Miskin	9,13	9,68	8,98	8,92	8,73	8,21-7,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,59	6,64	6,06	5,67	4,94

Sumber data: *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran didukung oleh :

- a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- b) Program Kawasan Permukiman;
- c) Program Pengembangan Perumahan;
- d) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- e) Program Penanganan Bencana;
- f) Program Rehabilitasi Sosial;
- g) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- h) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- i) Program Pemberdayaan Sosial;
- j) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- k) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- l) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- m) Program Hubungan Industrial;
- n) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- o) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- p) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat

- Dan Masyarakat Hukum Adat;
- q) Program Penataan Desa;
 - r) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - s) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - t) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Capaian realisasi indikator kinerja Angka Kegtimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.92
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia),
Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun
2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	19,13	18,41	19,13
2	Presentase Penduduk Miskin	8,73	8,57	9,58
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,67	4,91	4,78

Sumber data : *Jateng.bps.go.id*

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja diatas dapat diperbandingkan bahwa untuk indikator Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia) Kabupaten Batang sama apabila dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan lebih tinggi dari realisasi Nasional, untuk itu diperlukan upaya lebih dalam rangka menekan angka ketimpangan di Kabupaten Batang di Tahun selanjutnya.

Untuk indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2024 sebesar 8,73% lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka di Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,58% dan lebih tinggi dari realisasi Nasional sebesar 8,57% (*kondisi September 2024*), dan apabila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota sekitar maka Persentase

Penduduk Miskin di Kabupaten Batang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kendal sebesar 9,35%, Kabupaten Pemalang sebesar 14,92%, Kabupaten Pekalongan sebesar 8,95%, Kabupaten Brebes sebesar 15,60% dan lebih tinggi dari Kota Pekalongan sebesar 6,71% dan Kabupaten Tegal sebesar 6,81%

Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka di Tahun 2024, Kabupaten Batang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yang berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Batang masih tinggi dan butuh usaha yang terintegrasi antar perangkat daerah dan *stakeholders* dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Batang. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota sekitar maka tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Batang masih lebih tinggi dari Kabupaten Kendal dengan angka sebesar 5,01, Kabupaten Pekalongan sebesar 3,30 dan lebih rendah dari Kabupaten Pemalang sebesar 6,63, Kabupaten Tegal sebesar 7,53 dan Kabupaten Brebes sebesar 8,35.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran sebagai berikut :

Tabel 2.93
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase
Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

N o	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.111.564.980	3,876.604.445	234.960.535
2	Program Kawasan Permukiman	9.484.623.640	9.101.202.700	383.420.940
3	Program Pengembangan Perumahan	217.500.000	210.499.800	7.000,200
4	Program Penyelesaian	32.000.000	31.599.750	400.250

	Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
5	Program Penanganan Bencana	623.075.100	587.354.600	35.720.500
6	Program Rehabilitasi Sosial	319.976.300	285.087.787	34.888,513
7	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.500.000	3.180.000	320.000
8	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.238.190.400	3.955.971.010	282.219.390
9	Program Pemberdayaan Sosial	568.014.400	543.241.416	24.772.984
10	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	87.980.200	87.716.200	264.000
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	298.404.399	288.620.600	9.783.799
12	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	0
13	Program Hubungan Industrial	230.479.665	228.450.064	2.029.601
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	108.786.500	108.556.175	230.325
15	Program Administrasi Pemerintahan Desa	29.049.720.500	28.843.655.832	206.064.668
1	Program Pemberdayaan	4.017.608.400	3.960.679.665	56.928.735

6	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
17	Program Penataan Desa	35.000.000	35.000.000	0
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	199.398.000	191.761.500	7.636.500
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.031.962.550	3.018.441.600	13.520.950
20	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.644.093.400	1.562.463.564	81.629.836
Jumlah		58.301.878.434	56.920.086.708	1.381.791.726

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.381.791.726,-dari target anggaran sebesar Rp. 58.301.878.434,-. Sisa anggaran terbesar ada pada Program Kawasan Permukiman dan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dimana penyerapan anggaran pada program ini terkendala pada teknis penyaluran bantuan dana sosial. Keterlambatan proposal yang masuk dari penerima bantuan dan adanya persyaratan – persyaratan yang tidak terpenuhi menjadikan penyerapan anggaran pada program tersebut tidak maksimal.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.94
Perbandingan Penganggaran Pendukung
Menguatkan Perekonomian Daerah dan Kontribusi Ekonomi Kerakyatan
Bagi Kemajuan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.111.564.980	3.034.612.400
2	Program Kawasan Permukiman	9.484.623.640	8.006.889.609
3	Program Pengembangan Perumahan	217.500.000	37.500.000
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	32.000.000	30.000.00
5	Program Penanganan Bencana	623.075.100	619.475.100
6	Program Rehabilitasi Sosial	319.976.300	239.976.300
7	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.500.000	0
8	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.597.030.400	4.551.964.800
9	Program Pemberdayaan Sosial	568.034.400	526.886.000
10	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	87.980.200	276.484.200
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	298.404.399	334.142.900
12	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	21.695.000
13	Program Hubungan Industrial	230.479.730	252.361.750
14	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	108.786.500	0
15	Program Administrasi	3.612.902.780	35.217.060.345

	Pemerintahan Desa		
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.777.608.400	3.121.315.550
17	Program Penataan Desa	35.000.000	55.500.000
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.041.962.550	3.439.056.600
19	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	209.398.000	245.747.500
20	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.638.093.400	1.539.666.500
Jumlah		34.997.920.779	61.550.334.554
Selisih (3-4)		-26.552.413.775	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.26.552.413.775,- . Penurunan jumlah anggaran pendukung disebabkan karena menyesuaikan dengan ketersediaan jumlah pagu anggaran yang terbatas, sehingga perangkat daerah harus melaksanakan program kegiatannya lebih efektif dan efisien.

- 4) Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.95

Capaian Sasaran Meningkatnya Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur yang Mendukung Aksesibilitas dan Mobilitas Masyarakat serta Mendukung Pertumbuhan Kawasan Ekonomi dan Non Ekonomi Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Infrastuktur	197,04	204,43	202,68	100	Tercapai / Sesuai Target	0,85
Capaian Kinerja Sasaran (4)					100		

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi diukur dari indikator kinerja Indeks Infrastuktur. Pada Tahun 2024 capaian Indeks Infrastruktur sebesar 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Predikat capaian Indeks Infrastruktur dihitung dari 5 (lima) komponen pembangunan infrastruktur yaitu :

1. Pembangunan jalan, melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan indeks sebesar 35,16, meliputi pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan trotoar dan drainase, peningkatan jalan, pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jalan.
2. Pembangunan akses air minum yang layak dan aman, melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indeks 36,88, meliputi pembangunan, perluasan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan air minum untuk rumah tangga.
3. Pembangunan sanitasi, melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indeks 42,82, meliputi pembangunan tangki septitank skala individual untuk rumah tangga.
4. PKPI, melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indeks 39,19, meliputi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian di lokasi perumahan.
5. Internet, melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indeks 50,37, meliputi pembangunan jaringan intra pemerintah atau penggunaan akses internet yang diamankan dan saling terkoneksi

antar perangkat daerah.

Pada Tahun 2024 capaian dari indikator indeks infrastruktur telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan nilai apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,85%.

Faktor pendukung tercapainya kinerja indikator Indeks Infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen yang kuat dari Perangkat Daerah yang menangani pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kinerjanya dan terus berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun mendatang;
2. Adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dan *stakeholders* yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur;
3. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Meskipun target kinerja Indeks Infrastruktur di Kabupaten Batang telah tercapai akan tetapi dalam proses pembangunannya masih terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat. Faktor – faktor penghambat tersebut, diantaranya :

1. Keterbatasan sumber daya baik jumlah anggaran maupun sumber daya manusia (SDM) pelaksana, karena adanya keterbatasan pada jumlah anggaran sehingga tidak semua infrastruktur yang dibutuhkan dapat terbangun dan tidak semua infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki;
2. Masih ada ketergantungan pada sumber anggaran dari pusat Dana Alokasi Khusus (DAK), sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah sangat terbatas sehingga dalam proses pembangunan terutama pembangunan infrastruktur masih bergantung pada sumber anggaran dari pusat;
3. Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kondisi infrastruktur, panas dan hujan dapat menyebabkan kerusakan pada obyek infrastruktur. Bahkan terjadinya bencana seperti banjir dan longsor menyebabkan kerusakan obyek infrastruktur dalam jumlah besar.

Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang ada terutama masalah penganggaran, Pemerintah Kabupaten Batang mengupayakan penanganan permasalahan infrastruktur dengan skala prioritas. Infrastruktur yang benar – benar dibutuhkan oleh masyarakat dan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah dan harus segera mendapat perbaikan maka yang akan lebih diutamakan penanganannya.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja

dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.96
Perkembangan Realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Infrastuktur	-	-	-	202,68	204,43	201

Sumber data: *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi didukung oleh :

- a) Program Penyelenggaraan Jalan;
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c) Program Penataan Bangunan Gedung;
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- e) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- f) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- g) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- h) Program Pengembangan Permukiman;
- i) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- j) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- k) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- l) Program Informasi dan Komunikasi Publik;.

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Infrastruktur apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.97
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Infrastruktur	204,43	-	-

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi sebagai berikut :

Tabel 2.98
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Infrastruktur Tahun 2024

N o	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraa n Jalan	56.933.470.276	56.530.931.382	402.538.894
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.164.317.936	9.865.769.536	298.548.400
3	Program Penataan Bangunan Gedung	11.674.296.204	11.533.690.410	140.605.794
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.639.279.900	5.334.777.298	304.502.602
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	8.507.786.378	7.632.143.099	875.643.279

	Penyediaan Air Minum			
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	75.000.000	0	75.000.000
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	801.000.000	342.368.250	458.631.750
8	Program Pengembangan Perumahan	217.500.000	210.499.800	7.000.200
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.239.363.936	4.153.925.255	85.438.681
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.928.338.400	1.671.256.041	257.082.359
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.777.574.050	6.635.424.256	142.149.794
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.304.244.000	1.292.391.094	11.852.906
Jumlah		108.262.171.080	105.203.176.421	3.058.994.659

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.058.994.659,- dari target anggaran sebesar Rp.108.262.171.080,-. Sisa anggaran terbesar merupakan sisa anggaran yang tidak terserap dari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum sebesar Rp. 875.643.279,- dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional sebesar Rp. 458.631.750,-.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.99
Perbandingan Penganggaran
Meningkatnya Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur yang Mendukung Aksesibilitas dan Mobilitas Masyarakat serta Mendukung Pertumbuhan Kawasan Ekonomi dan Non Ekonomi Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	56.933.470.276	40.619.012.720
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.164.317.936	6.915.955.338
3	Program Penataan Bangunan Gedung	11.674.296.204	8.610.716.206
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.639.279.900	6.439.508.833
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.507.786.378	8.636.562.381
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	75.000.000	0
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	801.000.000	897.360.000
8	Program Pengembangan Permukiman	217.500.000	0
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.239.363.936	0
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.922.338.400	2.201.422.000

11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.777.574.050	4.629.051.050
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.304.244.000	1.358.550.000
Jumlah		108.256.171.080	80.308.138.528
Selisih (3-4)		27.948.032.552	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan Kawasan ekonomi dan non ekonomi Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.948.032.552,00. Kenaikan jumlah anggaran ini untuk mendukung program prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Batang dalam hal ini untuk mendukung infrastruktur di Kawasan Industri Terpadu Batang.

- 5) Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan

Gambaran ketercapaian sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.100

Capaian Sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan / Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	69,91	68,61	100	Tercapai/ Sesuai Target	1,85
Capaian Kinerja Sasaran (5)					100		

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan

sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan di Tahun 2024 adalah 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian kinerja tersebut diukur dari indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKLH Tahun 2023 sebesar 68,61 maka ada kenaikan nilai IKLH di Tahun 2024 sebesar 1,85%. Perhitungan IKLH dihitung dari 3 (tiga) indikator/ parameter yaitu (1) Kualitas air sungai, (2) Kualitas udara dan (3) Kualitas lahan, dengan rincian nilai sebagai berikut : Indeks Pencemaran Air : 17,10, Indeks Pencemaran Udara : 25,38 dan Indeks Tutupan Lahan : 27,42.

Tercapainya target indikator IKLH karena didukung beberapa faktor pendukung diantaranya :

1. Secara umum kesadaran masyarakat Batang akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan telah meningkat;
2. Adanya Peraturan Perundangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagai payung hukum dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Batang yang sudah tertata.

Dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Batang selain memiliki faktor pendukung juga masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai faktor penghambat, diantaranya :

1. Masih adanya beberapa pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan limbah. Beberapa pelaku usaha masih membuang limbah mereka ke sungai – sungai, hal ini menyebabkan sungai menjadi tercemar dan berdampak pada turunnya kualitas air;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, Beberapa masyarakat masih ada yang membuang limbah atau sampah mereka tidak pada tempatnya atau masih ada yang membuang sampah dengan cara dibakar. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara dan berdampak pada penurunan kualitas udara;
3. Masih adanya penebangan liar yang dilakukan oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, oknum – oknum masyarakat ini belum sadar akan pentingnya tutupan lahan untuk menghindari terjadinya bencana yang tidak diinginkan.

Beberapa upaya dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, diantaranya :

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat umum dan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan semakin meningkat;
2. Melakukan pengawasan secara preventif kepada para pelaku usaha

- dalam pengelolaan limbah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. Menambah fasilitas sarana dan prasarana pembuangan sampah bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan atau membakar sampah;
 4. Mengadakan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali area lahan gundul.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.101
Perkembangan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,44	68,45	68,59	68,61	69,91	65,24

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan didukung oleh :

- a) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- b) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
- e) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h) Program Pengelolaan Persampahan.

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.102
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	73,07	60,8

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Dari tabel perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024, IKLH Kabupaten Batang sebesar 68,91 lebih tinggi dari IKLH Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,8 tetapi lebih rendah dari IKLH nasional sebesar 73,07.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 2.103
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	0	0
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	0	0
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	417.042.700	416.439.608	603.092
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan	83.522.400	83.096.900	425.500

	Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	202.395.500	199.703.580	2.691.920
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	0	0	0
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.849.900	88.189.400	2.660.500
8	Program Pengelolaan Persampahan	1.896.626.100	1.878.200.347	18.425.753
Jumlah		2.690.436.600	2.665.629.835	24.806.735

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.806.735,- dari target anggaran sebesar Rp. 2.690.436.600,-. Sisa anggaran merupakan sisa program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai efisiensi. Tanpa mengurangi kinerja dari masing-masing indikator.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.104
Perbandingan Penganggaran Pendukung
Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang
lestari dan berkelanjutan Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	10.105.640	
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	243.105.000	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	417.042.700	353.403.200	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	83.522.400	47.557.400	
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	200.395.500	216.763.500	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	0	0	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	90.849.900	87.049.900	
8	Program Pengelolaan Persampahan	1.896.626.100	3.495.751.596	
Jumlah		2.688.436.600	4.453.736.236	4.453.736.236
Selisih (3-4)		-1.765.299.636		

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.1.765.299.636,- . Penurunan jumlah anggaran pendukung disebabkan karena menyesuaikan dengan ketersediaan jumlah pagu anggaran yang terbatas, sehingga perangkat daerah harus melaksanakan program kegiatannya lebih efektif dan efisien.

b. Tujuan meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.105
Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP	70	68,95	68,06	98,5	Tidak Tercapai	1,29
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,00 Level 3	2,919 Level 2	2,860 Level 2	97,3	Tidak Tercapai	2,02
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	80,11	77,95	100	Tercapai / Sesuai Target	2,69
Capaian Kinerja Sasaran (6)					98,6		

Sumber data : SITIKA.batangkab.go.id/ batangkab.bps.go.id

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 sebesar 98,6% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dihitung dari 3 (tiga) indikator yaitu (1) Nilai SAKIP (2) Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dan (3) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Nilai SAKIP, pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Kabupaten Batang yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 68,95 dengan capaian kinerja sebesar 98,5%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2023 sebesar 68,06 maka capaian kinerja Tahun 2023 naik sebesar 1,29%. Capaian kinerja Nilai SAKIP pada Tahun 2024 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, karena masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi factor penghambat diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja

- Masih perlu penyempurnaan pada *Logical Framework* yang tidak hanya mengacu pada struktur perencanaan yang ada;
- Masih terdapat perencanaan kinerja yang belum cukup mengawal mandat unit kerja dan memenuhi kriteria cukup.

2. Pengukuran Kinerja

- Monev rencana aksi perangkat daerah belum dikaitkan dengan kinerja level strategis secara berkala (per-triwulan) tapi masih mengukur pada level program dan kegiatan serta penyerapan anggaran;
- Penggunaan media pengukuran kinerja berkala berupa aplikasi belum sepenuhnya efektif membantu mempercepat pengukuran dan publikasi hasil capaian pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Masih adanya pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang analisisnya tidak didukung data yang relevan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Catatan Hasil Evaluasi masih belum spesifik dan merujuk pada akar masalah prioritas yang perlu diperbaiki perangkat daerah.

Meskipun realisasi nilai SAKIP Kabupaten Batang Tahun 2024 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan nilai . Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Adanya komitmen yang kuat dalam proses pembangunan SAKIP mulai dari Kepala Daerah sampai dengan Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya;
2. Adanya kolaborasi antara perangkat daerah dalam melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;

3. Adanya kebijakan terintegrasi yang mengatur tentang SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga dalam proses pembangunan SAKIP terdapat kesepahaman dan persamaan persepsi antara perangkat daerah dan Tim Evaluator Internal;

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor penghambat, beberapa langkah perbaikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai langkah tindak lanjut dari rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian PANRB. Langkah perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Melakukan perbaikan perencanaan kinerja mulai dari penyusunan *logical framework* dan cascading kinerja pada penyusunan dokumen perencanaan berikutnya;
2. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi SITIKA sebagai aplikasi pengukuran capaian kinerja yang terintegrasi agar lebih efektif dalam membantu mempercepat pengukuran dan publikasi hasil capaian pengukuran kinerja;
3. Mengadakan bimbingan teknis bagi petugas penyusun laporan kinerja, untuk meningkatkan kompetensinya sehingga laporan kinerja yang disusun lebih berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditentukan;
4. Memberikan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan kinerja (LKjIP) perangkat daerah, dengan melakukan reviu terhadap laporan kinerja perangkat daerah dan merekomendasikan kepada perangkat daerah untuk melakukan perbaikan pada laporan kinerjanya;
5. Mengadakan bimbingan teknis bagi tim evaluator SAKIP agar kualitas dalam melaksanakan evaluasi menjadi meningkat.

- Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kabupaten Batang pada Tahun 2024 ada pada Level 2 dengan nilai 2,919 dengan capaian sebesar 97,3% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, meskipun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Level 3. Realisasi di tahun 2024 apabila diperbandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 2,860 ada peningkatan nilai sebesar 2,02% walaupun belum ada peningkatan level masih ada pada Level 2. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2024, pada komponen Struktur dan Proses yang merupakan pembentuk nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) masih terdapat kekurangan yang menjadi faktor – faktor penghambat diantaranya adalah :

1. Pengendalian intern belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Batang;

2. Kualitas register risiko (termasuk risiko kecurangan dan kemitraan serta rencana tindak pengendalian belum optimal);
3. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang pengelolaan risiko sehingga risiko – risiko utama tidak teridentifikasi.

Dalam rangka meningkatkan implementasi Manajemen Risiko, Pemerintah Kabupaten Batang akan melaksanakan rekomendasi sebagai langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP, diantaranya :

1. Melaksanakan pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis sampai risiko operasional perangkat daerah;
 2. Melakukan identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/ kerjasama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh proses bisnis;
 3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan komponen sumber daya manusia di bidang manajemen risiko;
 4. Meningkatkan kualitas di bidang manajemen risiko meliputi pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional serta meningkatkan kualitas revidi manajemen risiko.
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah 80,11. Capaian kinerja indikator IPKD ini sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 79. Realisasi IPKD Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2023 sebesar 79.95 maka ada kenaikan sebesar 2,69%.

Dalam penilaian IPKD ini, aspek yang dinilai terdiri dari 6 dimensi yaitu :

1. Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan penganggaran;
2. Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan keuangan daerah;
4. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran;
5. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah;
6. Dimensi 6 Opini Pemeriksaan Keuangan atas LKPD.

Dari hasil penilaian IPKD, Pemerintah Kabupaten Batang mendapat capaian skor maksimal pada Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 20 dan Dimensi 6 Opini pemeriksaan keuangan atas LKPD dengan skor 15 sedangkan pada 4 dimensi lain belum mendapatkan skor maksimal sehingga masih diperlukan upaya yang optimal.

Faktor penghambat yang menyebabkan belum maksimalnya capaian nilai IPKD Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran belum

- optimal;
2. Penyerapan anggaran belum optimal;
 2. Kondisi keuangan daerah masih rendah meliputi kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka Panjang, dan solvabilitas layanan.

Untuk meningkatkan nilai IPKD di tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan beberapa upaya perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan tersebut diantaranya :

1. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, meliputi ketepatan waktu dan keteraksesan laporan pengelolaan keuangan daerah;
3. Opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.106
Perkembangan Realisasi Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP	66,14	66,30	67,27	68,06	68,95	72,35
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	-	-	-	Level 2 2,860	Level 2 2,919	Level 3
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	70,49	75,37	77,95	80,11	81

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didukung oleh :

- a) Program Pengelolaan Arsip;
- b) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;

- c) Program Perizinan Penggunaan Arsip;
- d) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- e) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
- f) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- j) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- k) Program Administrasi Umum (Setda);
- l) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;.
- m) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Capaian realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Perbandingan Realisasi
Indikator Kinerja Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP	68,95	-	82,63
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 2	-	-
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,11	73,18	-

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Dari tabel perbandingan capaian realisasi indikator Nilai SAKIP, nilai SAKIP Kabupaten Batang masih tertinggal jauh dari nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah meraih kategori A dengan nilai 82,63. Apabila dibandingkan dengan realisasi nilai SAKIP Kabupaten / Kota lain, Kabupaten Batang menempati urutan ke-13 (tiga belas) dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Jawa Tengah dibawah Kabupaten Banyumas 81,79, Kabupaten Kendal 69,79 dan Kabupaten Boyolali 68,96 dan berada diatas Kota Tegal 68,57, Kabupaten Pemalang 68,42, dan

Kabupaten Pekalongan 65,69. Pemerintah Kabupaten Batang telah berupaya keras untuk dapat meningkatkan nilai SAKIP di tahun depan dengan melaksanakan semua rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Untuk realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 sebesar 80,11 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata – rata nasional untuk klaster kemampuan keuangan daerah sedang yaitu 73,18. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar dengan klaster yang sama maka lebih rendah dari Kabupaten Grobogan 87,03, Kabupaten Tegal 82,08 dan Kabupaten Boyolali 80,26. Dan masih lebih tinggi dari Kabupaten Klaten 78,98, Kabupaten Banjarnegara 76,03 dan Kabupaten Banyumas 75,34.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel 2.108
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), dan Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Arsip	341.006.350	339.321.000	1.685.350
2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	4.923.400	4.776.397	147.003
3	Program Pembinaan Perpustakaan	523.071.579	517.869.000	5.202.579
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.394.936.198	2.235.526.682	159.409.516
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	778.069.700	762.699.100	15.370.600

6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	357.997.488.190	347.808.092.258	10.189.395.932
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.264.005.150	1.997.781.119	266.224.031
8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.654.597.500	3.257.531.370	397.066.130
9	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.263.300	1.167.846.503	28.416.797
10	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	826.000.000	822.314.761	3.685.239
11	Program Administrasi Umum (Setda)	0	0	0
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	103.916.000	96.304.500	7.611.500
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.007.495.676.988	904.787.951.843	102.707.725.145
Jumlah		1.377.579.954.355	1.263.798.014.533	113.781.939.822

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang 113.781.939.822

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 113.781.939.822,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.377.579.954.355,-. Sisa anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp. 102.707.725.145,- hal ini disebabkan karena

terdapat efisiensi pada belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.109
Perbandingan Penganggaran Pendukung
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Arsip	341.006.350	511.825.800
2	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	4.923.400	41.735.100
3	Program Pembinaan Perpustakaan	523.071.579	0
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.394.936.198	3.002.190.700
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	778.069.700	584.206.750
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	357.997.488.190	348.932.598.298
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.264.005.150	2.130.111.250
8	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.584.565.500	3.370.753.350
9	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.263.300	899.879.800
10	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	826.000.000	737.000.000
11	Program Administrasi Umum (Setda)	0	0
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.616.000	64.375.000

13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.006.559.247.15 6	861.107.416.101
Jumlah		1.376.576.192.52 3	1.221.382.092.149
Selisih (3-4)		155.194.100.374	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada kenaikan jumlah anggaran sebesar 155.194.100.374,-. Kenaikan jumlah anggaran yang signifikan ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada Belanja Pegawai. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah ASN baik CPNS maupun PPPk di sebagian besar perangkat daerah. Penambahan jumlah ASN ini untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang ada di perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance* diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.110
Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik
melalui *agile governance* Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45	86,91	86,64	100	Tercapai/ Sesuai Target	0,31
Capaian Kinerja Sasaran (7)					100		

Sumber data : SITIKA.batangkab.go.id/batangkab.bps.go.id

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance* sebesar 100% capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Realisasi kinerja Indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat Tahun 2024 sebesar 86,91 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar 0,31%. Faktor pendorong tercapainya kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi survei kepuasan masyarakat, sosialisasi diikuti oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Sosialisasi dilaksanakan sebelum Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan, dengan tujuan agar Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlaksana dengan baik;
2. Adanya komitmen bersama dari setiap unit pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik;
3. Adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan;
4. Inovasi oleh unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Untuk faktor penghambat dari indikator ini adalah:

1. Belum semua Unit Pelayanan Publik (UPP) yang ada melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Belum semua penerima layanan mengikuti Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Masih ada keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada beberapa Unit Pelayanan Publik.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.111
Perkembangan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	85,14	85,27	86,64	86,91	85,75

Sumber data: *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui

agile governance didukung oleh :

- a) Program Pendaftaran Penduduk;
- b) Program Pencatatan Sipil;
- c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d) Program Aplikasi Informatika;
- e) Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- g) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
- h) Program Kepegawaian Daerah;
- i) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- l) Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- m) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.112
Perbandingan Capaian Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,91	-	87,25

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Tabel perbandingan capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 diatas dapat dilihat bahwa hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten Batang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Batang perlu upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Batang lebih baik sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance* sebagai berikut :

Tabel 2.113
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pendaftaran Penduduk	468.326.000	427.272.016	41.053.984
2	Program Pencatatan Sipil	414.808.000	414.393.400	414.600
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.032.507.700	964.395.577	68.112.123
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.511.178.600	1.503.357.268	7.821.332
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	100.000.000	96.958.200	3.041.800
6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	327.137.950	324.054.277	3.083.673
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.750.052.423	18.067.249.522	1.682.802.901
8	Program Kepegawaian Daerah	2.282.933.947	2.090.837.086	192.096.861
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.356.750	831.917.245	43.439.505
10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.102.000	94.162.900	1.939.100

11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	306.730.600	302.259.700	4.470.900
12	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.164.245.960	2.010.549.734	153.696.226
13	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.658.193.350	33.581.510.454	2.076.682.896
Jumlah		64.981.268.579	60.708.917.379	4.272.351.200

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance* terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.272.351.200,- dari target anggaran Rp. 64.981.268.579,-. Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan program kegiatan pendukung tanpa mengurangi kinerja dari masing-masing indikator contohnya pada kegiatan perjalanan dinas.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114
Perbandingan Penganggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*
Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pendaftaran Penduduk	468.326.000	553.392.200,00
2	Program Pencatatan Sipil	414.808.000	422.365.800,00
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.032.507.799	1.061.655.893,00
4	Program Aplikasi Informatika	1.511.178.600	2.726.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	100.000.000	100.000.000,00

	pengamanan informasi		
6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	327.137.950	252.137.950,00
7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.750.052.423	23.644.891.319,00
8	Program Kepegawaian Daerah	2.282.933.947	2.226.256.260,00
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.356.750	1.015.356.750,00
10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	101.102.000	51.693.500,00
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	295.425.800	227.550.102,00
12	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.164.245.960	2.241.165.010,00
13	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.658.193.350	43.757.343.441,00
Jumlah		64.981.268.579	78.279.808.225,00
	Selisih (3-4)	-13.298.539.646	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance* Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada penurunan jumlah anggaran sebesar Rp.13.298.539.646,-. Penurunan jumlah anggaran pendukung disebabkan karena menyesuaikan dengan ketersediaan jumlah pagu anggaran yang terbatas, sehingga perangkat daerah harus melaksanakan program kegiatannya lebih efektif dan efisien.

b. Tujuan meningkatkan ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif

Tujuan tersebut mencakup 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu:

- 1) Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Gambaran ketercapaian sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.115
Capaian Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,81	0,57	0,47	70,37	Tidak Tercapai	17,54
Capaian Kinerja Sasaran (8)					70,37		

Sumber data : SITIKA.batangkab.go.id/ batangkab.bps.go.id

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana Tahun 2024 adalah sebesar 70,37% dengan predikat kinerja Sedang. Capaian kinerja Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 belum maksimal sehingga hanya pada kategori capaian kinerja Sedang. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala - kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang, kendala – kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Beberapa regulasi tentang kebencanaan dan dokumen rencana Kontinjensi (Renkon) belum tersedia. BPBD Kabupaten Batang baru memiliki 1 rencana Kontinjensi (Renkon) yaitu Renkon gas beracun, yang seharusnya Renkon disusun per jenis bencana yang ada, karena belum tersedianya anggaran untuk penyusunan renkon yang dimaksud;
2. Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penanggulangan Bencana yang masih kurang;
3. Wawasan/pengetahuan masyarakat tentang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana yang masih kurang;
4. Jejaring pelibatan pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha belum dikembangkan secara optimal;
5. Kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Batang juga didorong beberapa faktor pendorong diantaranya :

1. Tingkat kepedulian masyarakat akan darurat bencana cukup tinggi

- 2. Komitmen Pimpinan Daerah akan Penanggulangan Bencana
- 3. Koordinasi antar rekan seluruh jajaran, relawan dan dinas teknis yang menangani bencana cukup baik
- 4. Dukungan Anggaran APBD
- 5. Teknologi Informasi tentang Kebencanaan yang semakin canggih.

Dengan mengoptimalkan factor pendorong dan dalam rangka mengatasi kendala-kendala dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Batang maka Pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas terkait mengambil langkah – langkah perbaikan diantaranya :

- 1. Memaksimalkan proses penyusunan dokumen Regulasi tentang Kebencanaan;
- 2. Mengupayakan program penyusunan Renkon per Jenis Bencana
- 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui pelaksanaan diklat dan pelatihan;
- 4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana agar masyarakat Batang lebih siap dalam menghadapi resiko terjadinya bencana;
- 5. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan bencana;
- 6. Berusaha melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.116
Perkembangan Realisasi Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0,4	0,47	0,57	0,85

Sumber data: *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana didukung oleh :

- a) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;

b) Program Penanggulangan Bencana.

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indeks Ketahanan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.117
Perbandingan Capaian Realisasi
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Kabupaten Kendal	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,72	0,80	0,79	0,67

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Capaian Realisasi Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan daerah Kabupaten sekitar seperti tabel diatas masih tertinggal berada dibawah capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kendal 0,72, Kabupaten Pemalang 0,80, Kabupaten Banjarnegara 0,79 dan Kabupaten Pekalongan 0,67.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana sebagai berikut :

Tabel 2.118
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.791.345.600	3.770.182.672	21.162.928
2	Program Penanggulangan Bencana	1.407.327.400	1.341.771.750	65.555.650

Jumlah	5.198.673.000	5.111.954.422	86.718.578
--------	---------------	---------------	------------

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 86.718.578,- dari target anggaran Rp. 5.198.673.000,-. Sisa anggaran merupakan sisa program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai efisiensi tanpa mengurangi kinerja dari masing-masing indikator.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119
Perbandingan Penganggaran
Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.791.345.600	1.769.323.600
2	Program Penanggulangan Bencana	1.407.327.400	991.285.460
Jumlah		5.198.673.000	2.760.609.060
Selisih (3-4)		2.438.063.940	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.438.063.940,- . Kenaikan anggaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan.

- 2) Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- Gambaran ketercapaian sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik

didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.120
Capaian Sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Demokrasi	72	83,18	83,18	100	Tercapai/ Sesuai Target	0
Capaian Kinerja Sasaran (9)					100		

Sumber data : SITIKA.batangkab.go.id/ batangkab.bps.go.id

Capaian kinerja sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tahun 2024 adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Penghitungan Indeks Demokrasi Pemerintah Kabupaten Batang baru dilaksanakan di Tahun 2024 karena Indeks Demokrsi menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Batang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Realisasi Indeks Demokrasi Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebesar 83,18 dengan kategori Sangat Tinggi. Indeks Demokrasi Kabupaten Batang dihitung dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek Kebebasan
- Meliputi : terjaminnya kebebasan berkeyakinan sebesar 97,5, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara dengan nilai sebesar 97, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dengan nilai 96,3, pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya 96,05, terbebas dari hambatan/ gangguan dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan nilai 89,7, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antar masyarakat dengan nilai 73,5 dan pemenuhan hak – hak pekerja dengan nilai 46,05.
2. Aspek Kesetaraan
- Meliputi : anti monopoli sumber daya ekonomi dan indikator akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial dengan nilai 97,3, akses masyarakat terhadap informasi publik dengan nilai 95,85,

kesetaraan dalam pelayanan dasar dengan nilai 95,5, kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah sebesar 90,95, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui Lembaga perwakilan dengan nilai 61,95 dan kesetaraan gender dengan nilai 45,65.

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Meliputi : kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dengan nilai sebesar 97,3, kinerja Lembaga Yudikatif dengan nilai 97, netralitas penyelenggara pemilu dengan nilai 96,05, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah dengan nilai 95,85, jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat dengan nilai 90,95, kinerja lembaga legislative dengan nilai 62,12, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah dengan nilai 54,3 dan pendidikan politik pada kader partai dengan nilai 53,7.

Faktor pendorong demokrasi di Kabupaten Batang :

1. Pendidikan politik / Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan politik secara konsisten dilakukan oleh pemerintah maupun Organisasi masyarakat baik dalam ranah Pendidikan formal, informal maupun nonformal.

2. Perlindungan hukum yang baik kepada masyarakat

Hal ini terlihat dari minimnya kasus yang berkaitan dengan dibungkamnya kebebasan masyarakat Batang.

3. Pemerintah yang berorientasi kepada kerakyatan

Pemerintah Kabupaten Batang dalam menjalankan kebijakan berorientasi untuk kebutuhan masyarakat umum.

4. Kebebasan pers dan media

Pemerintah Kabupaten Batang mendukung adanya kebebasan pers sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia.

5. Budaya politik yang jujur

Pemerintah Kabupaten Batang telah menerapkan beberapa pembudayaan politik jujur dan berhasil diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor penghambat demokrasi di Kabupaten Batang :

1. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi

Hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang disebabkan perbedaan ekonomi, yang akan berdampak besar pada penerapan sistem demokrasi.

2. Polarisasi politik atau perbedaan pilihan politik

Adanya pilihan pendapat masyarakat yang tidak toleran berisiko menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.121
Perkembangan Realisasi Indeks Demokrasi Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Demokrasi	0	0	0	83,18	83,18	76

Sumber data: SITIKA.batangkab.go.id

Capaian kinerja sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat didukung oleh :

- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
- b) Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- c) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- e) Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Capaian realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.122
Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Demokrasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Demokrasi	83,18	79,51	80,87

Sumber data : BPS Prov. Jateng

Tabel perbandingan capaian realisasi indikator Indeks Demokrasi Tahun 2024, Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menggunakan nilai Indeks Demokrasi Tahun 2023, karena dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Demokrasi Tahun 2024 belum direlease sampai dengan laporan kinerja ini disusun. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Kabupaten Batang lebih tinggi dari Indeks Demokrasi Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.123
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Indeks Demokrasi Tahun 2024

N o	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.164.963.764	1.133.540.764	31.423.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.138.114.833	18.112.364.925	25.749.908
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	43.280.000	42.358.800	921.200
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan	203.544.950	200.629.950	2.915.000

	Budaya			
5	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	994.064.000	921.911.346	72.152.654
Jumlah		20.543.967.547	20.410.805.785	133.161.762

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 133.161.762,- dari target anggaran sebesar Rp. 20.543.967.547,-. Sisa anggaran merupakan sisa anggaran dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai efisiensi, tanpa mengurangi kinerja dari masing-masing indikator.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.124
Perbandingan Penganggaran
Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.164.963.764	765.100.000,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.138.114.833	24.782.244.650,00
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	43.280.000	308.555.350,00

	Organisasi Kemasyarakatan		
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	203.544.950	225.000.000,00
5	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	994.064.000	1.247.685.800,00
Jumlah		20.543.967.547	27.328.585.800,00
	Selisih (3-4)	-6.784.618.253	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada penurunan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.784.618.253,-. Penurunan jumlah anggaran pendukung disebabkan karena menyesuaikan dengan ketersediaan jumlah pagu anggaran yang terbatas, sehingga perangkat daerah harus melaksanakan program kegiatannya lebih efektif dan efisien.

3) Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang

Gambaran ketercapaian sasaran Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.125

Capaian Sasaran Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi		% Capaian	Status Capaian Kinerja	% Kenaikan /Penurunan
			2024	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(7)	(8)
1	Angka Kriminalitas	0,015	0,02	0,031	66,66	Tidak Tercapai	-1,45

Capaian Kinerja Sasaran (10)	66,66		
------------------------------	-------	--	--

Sumber data : polres batang

Capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebesar -100% dengan predikat kinerja Sedang. Bertambah banyaknya kejadian kriminalitas menjadi faktor penyebab tingginya angka kriminalitas. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana di tahun 2024 dilaksanakan pilpres dan pilkada. Hal ini mempengaruhi kondisi keamanan di masyarakat, suhu politik yang memanas dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas. Selain itu tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai latar belakangnya seperti pendidikan, penegakan hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tingkat Pendidikan yang rendah, penegakan hukum yang tebang pilih, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendapatan atau upah yang rendah secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas.

Untuk menekan tingkat kriminalitas di wilayah Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang tidak dapat bekerja sendiri, bersama dengan pihak terkait dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Batang akan melaksanakan beberapa program kegiatan bersama, diantaranya adalah lebih meningkatkan aktivitas kegiatan patroli gabungan ke daerah – daerah rawan kriminalitas untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, selain itu Pemerintah Kabupaten Batang juga bekerjasama dengan Polres Batang dalam rangka ikut membantu penanganan dan penyelesaian tindak kriminalitas agar cepat terselesaikan.

Upaya jangka Panjang dalam rangka mengurangi tindak kriminalitas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang adalah dengan mengatasi masalah yang memicu atau menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas, yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batang dan menjamin kesetaraan masyarakat Batang dalam Pendidikan dan hukum. Program Kegiatan *cross cutting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Batang berbanding terbalik dengan penurunan angka kriminalitas.

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan realisasi kinerja dari Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Target akhir RPD :

Tabel 2.126
Perkembangan Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir RPD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Akhir RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Kriminalitas	0,02	0,019	0,023	0,031	0,02	0,013

Sumber data: *SITIKA.batangkab.go.id*

Capaian kinerja sasaran Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang didukung oleh :

- a) Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Capaian realisasi indikator kinerja Angka Kriminalitas apabila dibandingkan dengan capaian realisasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.127
Perbandingan Capaian Realisasi
Angka Kriminalitas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kabupaten Batang	Nasional	Provinsi Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kriminalitas	0,02	-	-

Sumber data : *BPS Prov. Jateng*

Dengan realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dari sasaran Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang sebagai berikut :

Tabel 2.128
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator
Angka Kriminalitas Tahun 2024

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Ketenteraman,	7.893.761.760	7.637.100.950	256.660.810

	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Jumlah		7.893.761.760	7.637.100.950	256.660.810

Sumber data: BPKPAD Kab. Batang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi anggaran pendukung sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terdapat sisa anggaran sebesar Rp.256.660.810,- dari target anggaran sebesar Rp. 7.893.761.760,- . Sisa anggaran merupakan sisa program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai efisiensi, tanpa mengurangi kinerja dari masing-masing indikator.

Dengan perbandingan jumlah penganggaran dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.129
Perbandingan Penganggaran Pendukung
Berkurangnya Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2024 dan 2023

No	Program Pendukung	Tahun 2024	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.893.761.760	2.099.546.605
	Selisih (3-4)	5.794.215.155	

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang

Dari perbandingan penganggaran Sasaran Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Tahun 2024 dan 2023 seperti tabel diatas, ada kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp.5.794.215.155,-. Kenaikan jumlah anggaran yang cukup besar di Tahun 2024 adalah karena di tahun tersebut ada pemilu dan pilkada sehingga diperlukan anggaran yang besar untuk proses pengamanannya.

REALISASI ANGGARAN

Gambaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.130

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	1.944.219.139.590	1.952.458.264.966,30	100,42
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335.410.556.590	359.622.139.582,30	107,22
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.608.328.583.000	1592.356.125.384	99,01
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	480.000.000	480.000.000	100
	Jumlah Pendapatan	1.944.219.139.590	1.952458.264.966,30	100,42
II	BELANJA	2.080.435.986.668	1.943.823.722.517	93,43
1	BELANJA OPERASI	1.517.175.243.513	1.396.145.368.414	92,02
2	BELANJA MODAL	181.898.933.963	176.347.933.860	96,95
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.669.716.371	1.257.261.878	16,39
	Jumlah Belanja	1.706.743.893.847	1.573.750.564.152	92,21
4	TRANSFER	373.692.092.821	370.073.158.365	99,03
	Surplus/Defisit	136.216.847.078	8.634.542.449	6,34
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	143.716.847.078	143.720.933.073,43	100
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	7.500.000.000	100
	Pembiayaan Netto	136.216.847.078	136.223.654.545,43	100
	Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran	-	144.858.196.994,73	-

Sumber data : BPKPAD Kab. Batang (unaudit)

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp.1.944.219.139.590,- dan dapat direalisasikan Rp. 1.952.458.264.966,30 atau 100,42%.
- Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah Perubahan sebesar Rp. 2.080.435.986.668 dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.943.823.722.517,- atau 93,43%
- Surplus / Defisit anggaran sebesar Rp. 136.216.847.078 dan realisasinya sebesar 8.634.542.449,-.
- Penerimaan Pembiayaan anggaran sebesar Rp. 143.716.847.078,- dan realisasinya sebesar Rp. 143.720.933.073,43,-.
- Pengeluaran Pembiayaan anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.500.000.000,-.
- Pembiayaan Netto anggaran sebesar Rp.136.216.847.078 dan realisasinya sebesar Rp. 136.223.654.545,43.
- Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasinya sebesar Rp. 144.858.196.994,73.

2.3.2. Akuntabilitas Perangkat Daerah

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, Akuntabilitas Dinas Pendidikan dna kebudayaan dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.130
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan	1.	Rata-Rata Lama sekolah	7,10	7,08	99,72
		2	Harapan lama sekolah	12,40	12,17	98,15
		3.	Angka pendidikan yang ditamatkan penduduk	80,00	85,20	106,50
2	Meningkatnya upaya pengelolaan, perlindungan, pemajuan, pemanfaat dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal	4	Persentase terlestariannya Cagar Budaya	100,00	100	100,00
		5	Jumlah festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan	70,00	65,24	93,20
3	Meningkatnya profesional dan efektivitas kerja aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan	6	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	90,21	101,65
		7	SAKIP Disdikbud	77,50	76,5	98,71
Rerata						99,70

Sumber : Disdikbud Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas pendidikan dan kebudayaan terdiri dari 7 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 99,70% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.131
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	7,07	7,1	7,08	99,72	Sangat Tinggi
2	Angka Harapan Sekolah	tahun	12,15	12,4	12,17	98,15	Sangat Tinggi
3	Angka Partisipasi Sekolah	%	87,35	100	95,54	95,54	Sangat Tinggi
4	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	86,76	80	85,2	106,50	Sangat Tinggi

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
5	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	100	89,5	89,50	Tinggi
6	Persentase capaian SPM Pendidikan	%	100	100	96,73	96,73	Sangat Tinggi
7	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100	90	100	111,11	Sangat Tinggi
8	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100,00	100	Sangat Tinggi
9	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	65	70	56,12	80,17	Tinggi
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,25	88,5	89,24	100,83	Sangat Tinggi
11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	75	76,5	78,24	102,27	Sangat Tinggi
Rerata Kinerja Urusan						98,23	Sangat Tinggi

Sumber: Disdikbud Kab, Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Batang sebanyak 11 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 98,23% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.132
Program dan Kinerja Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
A	Urusan Pendidikan							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	166.215.664.994	162.128.832.568	97,54	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	100	95,54	95,54
					Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	100	96,73	96,73
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.750.000.000	2.723.049.000	99,02	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	100	100	100,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.300.000.000	2.172.367.800	94,45	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	100	89,50	89,50
B	Urusan Kebudayaan							
1	Program Pengembangan Kebudayaan	430.000.000	430.000.000	100,00	Persentase Festival seni yang dilaksanakan	100	100	100,00
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.375.000.000	1.365.000.000	99,27	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	70	100	142,86
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	400.000.000	399.820.000	99,96	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	80	100	125,00
Total /Rerata		173.470.664.994	169.219.069.368	97,55				107,09

Sumber: Disdikbud Kab, Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 adalah sebesar 107,09% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan capaian realisasi anggaran adalah sebesar 97,55% atau masuk kategori sangat tinggi (76% - 90%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.173.470.664.994 sepanjang tahun 2024 terserap sebesar Rp.169.219.069.368.

B. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mengampu urusan kesehatan di Kabupaten Batang, Akuntabilitas Dinas Kesehatan dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.133
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	136	98,4	72,35
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 100.000 kelahiran hidup	8,08	13,99	173,14
		3	Angka prevalensi balita stunting (%)	13,72	9,58	69,83
		4	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	89	98,82	111,03
		5	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	80,95	66,67	82,36
		6	Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	70	70	100,00
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat	7	Persentase desa siaga aktif strata mandiri	11,69	11,69	100,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	8	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	79,6	99,50
Rerata						101,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas kesehatan tahun 2023 terdiri dari 8 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 101,03,27% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.134
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	125,68	136,00	98,40	127,65	Sangat Tinggi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	10,28	8,08	13,99	26,86	Sangat Rendah
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 KH	14,18	15,00	17,17	85,53	Tinggi
4	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,36	0,14	0,56	- 200,00	Sangat Rendah

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
5	Case Notification Rate (CNR) kasus TB Baru	Per 100.000 pend	173	115,00	132,28	115,03	Sangat Tinggi
6	Kesembuhan Pengobatan TB BTA Positif (CR/cure rate)	%	85,68	90,00	80,00	88,89	Tinggi
7	Angka prevalensi balita stunting	%	10,68	13,72	9,58	130,17	Sangat Tinggi
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,84	74,89	74,85	99,95	Sangat Tinggi
9	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	95,43	89,00	98,82	111,03	Sangat Tinggi
10	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	66,66	80,95	66,67	82,36	Tinggi
11	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	96	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi
12	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK /X/2010	%	33,90	11,69	11,69	100,00	Sangat Tinggi
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,21	88,75	83,61	94,21	Sangat Tinggi
14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	77,7	80,00	79,60	99,50	Sangat Tinggi
Rerata Kinerja Urusan						88,04	Tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Kesehatan di Kabupaten Batang sebanyak 14 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 88,04% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (76% - 90%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebesar 97,32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran, tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 94.166.650.448 dan sepanjang tahun 2024 terserap Rp 91.324.421.501 sekitar 96,98% atau masuk pada kategori sangat tinggi (91%-100%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.135
Program dan Kinerja Program Dinas Kesehatan

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.149.904.948	87.609.197.411	97,18	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	100	100	100,00
					Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	21	14	68,71
					CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	115	132	115,03
					Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).	4	4	88,25
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.537.331.500	1.416.876.090	92,16	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	99	99	100,00
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	632.031.000	555.127.000	87,83	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	100	100	100,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.847.383.000	1.743.221.000	94,36	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	12	13	109,23
Total /Rerata		94.166.650.448	91.324.421.501	96,98				97,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

C. RSUD Batang

Akuntabilitas RSUD Batang dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja RSUD Batang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.136
Perjanjian Kinerja RSUD Batang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Terlayannya kesehatan masyarakat secara aman dan bermutu	1.	Tercapainya standart pelayanan minimal rumah sakit	86	80,20	93,26
		2	Tercapainya standart peningkatan mutu dan keselamatan pasien	86	87,53	101,78
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit	99,25	89,75	90,43
2	Peningkatan Kualitas tata kelola RSUD yang akuntabel	4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	67,30	84,13
Rerata						92,40

Sumber : RSUD Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas RSUD Batang tahun 2024 terdiri dari 4 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 92,40% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja RSUD Batang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.137
Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Batang tahun sebelumnya

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Tercapainya standart pelayanan minimal rumah sakit	%	76.25	86,00	80,20	93,26	Sangat Tinggi
2	Tercapainya standart peningkatan mutu dan keselamatan pasien	%	80.48	86,00	87,53	101,78	Sangat Tinggi
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit	Index	92.67	99,25	89,75	90,43	Sangat Tinggi
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	60.45	80,00	67,30	84,13	Sangat Tinggi
Rerata Kinerja RSUD Batang						92,40	Sangat Tinggi

Sumber : RSUD Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja RSUD Batang adalah 92,40% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja RSUD Batang pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana rerata kinerja RSUD Batang adalah 88,72% atau masuk dalam kategori tinggi (76%-90%). Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 97,09%. Yaitu dari target sebesar Rp. 81.534.820.972 terserap sebesar Rp. 79.158.477.707. sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.138
Program dan Kinerja Program RSUD Batang

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81.534.820.972	79.158.477.707	97,09	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun	86	76,3	88,72
Total /Rerata		81.534.820.972	79.158.477.707	97,09				88,72

Sumber : RSUD Batang tahun 2025

D. RSUD Limpung

Akuntabilitas RSUD Limpung dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja RSUD Limpung sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.139
Perjanjian Kinerja RSUD Limpung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Terlayannya kesehatan masyarakat secara aman dan bermutu	1.	Tercapainya standart peningkatan mutu dan keselamatan pasien	85	83,71	98,48
2	Peningkatan Kualitas tata kelola RSUD yang akuntabel	2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	69,70	98,17
Rerata						98,33

Sumber : RSUD Limpung tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas RSUD Limpung tahun 2024 terdiri dari 2 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 98,33% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja RSUD Limpung jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.140
Perbandingan Capaian Kinerja RSUD Limpung tahun sebelumnya

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	81,31	85	83,71	98,48	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	59,26	71	69,70	98,17	Tinggi
Rerata Kinerja RSUD Limpung						98,33	Sangat Tinggi

Sumber : RSUD Limpung tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja RSUD Limpung adalah 98,33% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja RSUD Limpung pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana rerata kinerja program RSUD limpung adalah 98,48% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 104,04%. Yaitu dari target sebesar Rp. 28.510.123.154 terserap sebesar Rp. 29.661.220.134. Pada sub kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, penyerapan anggaran lebih dari 100% dikarenakan RSUD perpedoman pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa RSUD bisa menggunakan anggaran pada ambang batas maksimal 10% dari total belanja jika mengalami surplus pendapatan selama 2 tahun berturut-turut. sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.141
Program dan Kinerja Program Limpung

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	28.510.123.154	29.661.220.134	104,04	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	85	83,71	98,48
Total /Rerata		28.510.123.154	29.661.220.134	104,04				98,48

Sumber : RSUD Limpung Kab.Batang tahun 2025

E. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	1.	Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	69,87	68,43	97,94
2	Jalan dan Jembatan Kondisi Baik	2	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	88,50	85,31	96,40
3	Ruang terbuka hijau yang ditertibkan	3	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	77,01	77,01	100,00
		4	Ketaatan terhadap RTRW	28,87	25,60	88,67
		5	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	66,56	79,60	119,59
Rerata						100,52

Sumber : Dinas PUPR Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 5 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 100,52% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.142
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	74,96	71,2	70,57	99,12	Sangat Tinggi
2	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,52	69,87	68,43	97,94	Sangat Tinggi
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	83,36	88,5	85,31	96,40	Sangat Tinggi
4	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	77,01	77,01	77,01	100,00	Sangat Tinggi
5	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	11,07	11,07	11,7	105,69	Sangat Tinggi
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	25,51	28,87	25,6	88,67	Tinggi
7	Rasio luas daerah irigasi	%	6,45	4,25	3,92	92,24	Sangat

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
	kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						Tinggi
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak (SPM)	%	100	100	88,88	88,88	Tinggi
9	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman (SPM)	%	100	100	50,98	50,98	Rendah
10	Persentase TPA dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	92,69	100,00	Sangat Tinggi
12	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	84,66	64,41	63,79	99,04	Sangat Tinggi
13	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	50,04	56	57,7	103,04	Sangat Tinggi
14	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
15	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	105,13	60,5	68,04	112,46	Sangat Tinggi
16	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	na	100	0	0,00	Sangat Rendah
17	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	100	52,4	52,4	100,00	Sangat Tinggi
Rerata Kinerja Urusan						90,26	Tinggi

Sumber : Dinas PUPR Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Batang sebanyak 17 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 90,26% atau masuk dalam kategori tinggi (75%-90%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebesar 93,93% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥90%). Selanjutnya berkaitan dengan capaian serapan anggaran sebesar 97,20% yang masuk dalam kategori tinggi (91%-100%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.143
Program dan Kinerja Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.164.317.936	9.865.769.536	97,06	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	4,25	3,92	92,24
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.239.363.936	4.153.925.255	97,98	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	64,41	63,79	99,04
3	Program Pengelolaan Dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	8.507.786.378	7.632.143.099	89,71	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	100	88,88	88,88
					Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	100	50,98	50,98
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.639.279.900	5.335.052.298	94,61	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	100	92,69	92,69
5	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	801.000.000	342.368.250	42,74	Persentase TPA dalam kondisi baik	100	100	100
6	Program Pengembangan Permukiman	484.550.000	484.378.000	99,96	Prosentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	56	58	103,04
7	Program Penataan Bangunan Gedung	11.674.296.204	11.533.890.410	98,80	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	100	100	100
8	Program Penyelenggaraan Jalan	56.933.470.276	56.545.442.092	99,32	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	60,5	68,04	112,46
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.928.338.400	1.671.256.041	86,67	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	52,4	52,4	100,00
Total /Rerata		100.372.403.030	97.564.224.981	97,20				93,93

Sumber : Dinas PUPR Kab.Batang tahun 2025

F. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.144
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas DPRKP	1	Nilai Sakip DPRKP	66,00	75,46	114,33
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60,00	80,342	133,90
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi pembangunan yang berkelanjutan	3	Prosentase Rumah Layak Huni	81,00	80,45	99,32
		4	Prosentase Pengurangan Permukiman Kumuh	62,50	77,30	123,68
		5	Prosentase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	78,00	77,99	99,99
		6	Prosentase Infrastruktur Pemenuhan Dasar Perumahan dan Permukiman yang layak	61,00	68,70	112,62
3	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	7	Tingkat Penurunan Kasus Sengketa Pertanahan	80,00	80,00	100
		8	Persentase Penyelesaian Kasus Pertanahan	100	100	100
Rerata						110,48

Sumber : Dinas PRKP Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024 terdiri dari 8 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 110,48% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.145
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	75	80	80	100	Sangat Tinggi
2	Persentase penyelesaiankasus pertanahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
3	Persentase Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	70	80	100	100	Sangat Tinggi
Rata Rata Kinerja Urusan						100	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas PRKP Kab.Batang tahun 2025

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Batang sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2024 adalah sebesar 98,75% atau masuk dalam kategori tinggi (76% - 90%). Selanjutnya capaian penyerapan anggaran sebesar 98,75% yang masuk dalam kategori sangat tinggi (91%-100%). Yaitu dari target sebesar Rp. 32.000.000 terserap sebesar Rp 31.599.750 sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.146
Program dan Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	32.000.000	31.599.750	98,75	Persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan	100	98,75	98,75
Total /Rerata		32.000.000	31.599.750	98,75				98,75

Sumber : Dinas PRKP Kab.Batang tahun 2025

G. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Akuntabilitas Satpol PP dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Satpol PP sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.147
Perjanjian Kinerja Satpol PP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	75	100	133,33
2	Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	2	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	72	100	138,89
3	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja	3	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	77,50	77,60	100,13
Rerata						124,12

Sumber : Satpol PP Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Satpol PP tahun 2024 terdiri dari 3 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 124,12% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Satpol PP jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.148
Perbandingan Capaian Kinerja Satpol PP dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	82,08	75	85,56	114,08	Sangat Tinggi
2	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	75	100	133,33	Sangat Tinggi
3	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	0,013	4	0,35	191,25	Sangat Tinggi
4	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	100	72	100	138,89	Sangat Tinggi
5	Persentase gangguan ketenteraman dan	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
	ketertiban umum Yang tertangani (SPM)						
6	Persentase waktu tanggap "respon time" (SPM)	%	63,97	100	81,47	81,47	Tinggi
Rerata Kinerja Urusan						126,50	Sangat Tinggi

Sumber : Satpol PP Kabupaten Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Satpol PP di Kabupaten Batang sebanyak 6 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 126,50% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Satpol PP pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Satpol PP tahun 2024 adalah sebesar 119,45% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Selanjutnya realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,00% juga masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.149
Program dan Kinerja Program Satpol PP

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.893.761.760	7.637.100.950	96,75	Persentase gangguan ketenteraman danketertiban umum yang tertangani	100	100	100
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	4.241.345.600	3.770.182.672	88,89	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	72	100	138,89
Total /Rerata		12.135.107.360	11.407.283.622	94,00				119,45

Sumber : Satpol PP Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

H. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol)

Akuntabilitas Badan Kesbangpol dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.150
Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya kinerja akuntabilitas badan kesbangpol	1	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	76,65	76,70	100,07
2	Menciptakan stabilitas politik di masyarakat dan terpeliharanya suasana aman, nyaman dan tertib	1	Persentase Demo Tertangani	100	100	100
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas penanganan konflik sosial	1	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	100	100	100
Rerata						100,02

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Batang, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Badan Kesbangpol tahun 2024 terdiri dari 3 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 100,02% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Tidak ada indikator Badan Kesebangpol yang masuk dalam RPD. Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Badan Kesbangpol tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 20.543.967.547sepanjang tahun 2023 terserap Rp. 20.411.230.785 sekitar 99,35% atau masuk pada kategori sangat tinggi (90% - 100%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.151
Program dan Kinerja Program Badan Kesbangpol

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.164.963.764	1.133.540.764	97,30	persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	100	100	100
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.138.114.833	18.112.789.925	99,86	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	43.280.000	42.358.800	97,87	Persentase Demo Tertangani	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	203.544.950	200.629.950	98,57	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	100	100	100
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	994.064.000	921.911.346	92,74	Persentase penurunan konflik sosial	100	100	100
Total /Rerata		20.543.967.547	20.411.230.785	99,35				100

Sumber : Badan Kesbangpol Kab.Batang tahun 2025

I. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.152
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Mewujudkan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi saat prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	1	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	67,44	100	100
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja BPBD	1	Nilai SAKIP BPBD	80	73,80	92,25
Rata-Rata						120,26

Sumber : BPBD Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas BPBD terdiri dari 2 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 120,26% atau berada pada kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja BPBD jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.153
Perbandingan Capaian Kinerja BPBD dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	96	67,44	100	148,28	Sangat Tinggi
2	Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	%	100	100	100	100,00	Sangat Rendah
3	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD)	skor	73,90	80	73,80	92,25	Sangat Tinggi
Rerata						108,11	Sangat Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja BPBD terhadap target RPD pada tahun 2024 adalah 108,11% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja BPBD pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana terdapat 1 program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan capaian kinerja program tahun 2024 adalah sebesar 100,00% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 599.079.000 sepanjang tahun 2024 terserap sebesar Rp.557.059.106 sekitar 92,99% atau masuk pada kategori sangat tinggi (76% - 90%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.154
Program dan Kinerja Program BPBD

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penanggulangan Bencana	599.079.000	557.059.106	92,99	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	100	100	100
					Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	100	100	100
Total /Rerata		599.079.000	557.059.106	92,99				100

Sumber : BPBD Kab.Batang tahun 2025

J. Dinas Sosial

Akuntabilitas Dinas Sosial dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Sosial sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.155
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	1	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	74	100	135,14
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2	Prosentasi PSKS yang aktif dalam pembangunan kesos	85	100	117,65
3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas dinas sosial	3	Nilai SAKIP Dinas sosial	86	76,95	89,48
Rerata Kinerja Dinas Sosial						114,09

Sumber : Dinas Sosial Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas sosial tahun 2024 terdiri dari 3 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 114,09% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Dinas Sosial jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.156
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Persentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak- haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	100	74	100	135,14	Sangat Tinggi
2	Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	100	85	100	117,65	Sangat Tinggi
3	Cakupan pengembangan Potensi sumber	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
	Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (SPM)						
4	Persentase Warga Negara Migran korban tidak Kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	100	40	100	250,00	Sangat Tinggi
5	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
6	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
7	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
8	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	Sangat Rendah
Rerata Kinerja Urusan						125,35	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Sosial Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Sosial di Kabupaten Batang sebanyak 8 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 125,35% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (>90%). Semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan.

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Sosial pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana pada Dinas Sosial terdapat 5 program dengan rata-rata kinerja 130,00% masuk kategori sangat tinggi (>90%). Sedangkan pada sisi anggaran pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 5.899.930.600 dan terealisasi sebesar Rp.5.798.404.611 atau 98,28% masuk dalam kategori sangat tinggi (91% - 100%). Sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.157
Program dan Kinerja Program Dinas Sosial

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.500.000	3.180.000	90,86	Persentase Warga Negara Migran korban tidak Kekerasan yang berhasil dipulangkan	40	100	250,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	481.414.400	466.914.418	96,99	Potensi Pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial daerah kabupaten (indikator SPM)	100	100	100
3	Program Rehabilitasi Sosial	239.976.300	227.692.933	94,88	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.551.964.800	4.508.062.660	99,04	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPPM)	100	100	100
5	Program Penanganan Bencana	623.075.100	592.554.600	95,10	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	100	100	100
Total /Rerata		5.899.930.600	5.798.404.611	98,28				130,00

Sumber : Dinas Sosial Kab.Batang, 2025 (diolah)

K. Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu urusan tenaga kerja dan transmigrasi, Akuntabilitas Dinas Ketenagakerjaan dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.158
Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Target RPD dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Tenaga Kerja	1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kereja yang layak	30,37	32	105
2	Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	Prosentase Pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	97	93,94	96,8
3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat dan Responsif	3	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	70	75	107
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat OPD	85	86,75	102
4	Meningkatnya kualitas Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	31,17	36	115
5	Meluasnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	6	Prosentase pencari pekerjaan yang mendapat pekerjaan	36	97,20	270
6	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cerdas, Cepat, dan Responsif	7	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	80	100	125
		8	Indeks kepuasan masyarakat OPD	85	88,82	104
Rerata						170,8

Sumber : Disnaker Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Disnaker

terdiri dari 8 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 170,8% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$).

Capaian Kinerja Disnaker jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.159
Perbandingan Indikator Ketenagakerjaan

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,75	85	88,82	104,4	Sangat tinggi
2	Tingkat kesempatan kerja	%	93,34	97	94,33	97,24	Sangat tinggi
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	32	31,17	36	115,4	Sangat tinggi
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	75,31	70	-	0	Sangat rendah
5	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	75	80	-	0	Sangat rendah
	Rata Rata Kinerja Urusan					62,54	Rendah

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 62,54% atau masuk dalam kategori Rendah (51%-65%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.160
Program dan Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
A	Urusan Ketenagakerjaan							
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	0	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	100	95,54	95,54
						100	96,73	96,73
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.259.745.850	1.233.530.567	97,92	Persentase Rasio Penduduk yang Bekerja	100	100	100,00
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	298.404.399	288.620.600	103,38	Persentase Pencari Pekerja yang Mendapat Pekerjaan	100	89,50	89,50
4	Program Hubungan Industrial	230.479.665	228.450.064	99,12	Persentase Penurunan Jumlah Selisih Hubungan Industrial			
Total /Rerata		596.209.971	583.533.743	97,87				107,09

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 adalah sebesar 107,09% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan capaian realisasi anggaran adalah sebesar 97,87% atau masuk kategori sangat tinggi (76% - 90%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.173.470.664.994 sepanjang tahun 2024 terserap sebesar Rp.169.219.069.368.

L. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Perlindungan Khusus Anak kesehatan di Kabupaten Batang, Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.161
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Terwujudnya pembangunan berwawasan kependuduksn melalui keluarga berencana	1	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	3	1,32	44
2	Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	2	Terpenuhinya indiaktor Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA – Pratama	KLA - Madya	200
				APE – Madya	APE – Pratama	50
		3	Meningkatnya tenaga kerja perempuan	1,64	3,2	195
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan OPD	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75	85,89	99,50
		5	Nilai SAKIP Perangda	80	73,76	92,2
Rerata Kinerja						113,45

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 terdiri dari 4=5 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 113,45% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.162
Perbandingan Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1	Terpenuhinya indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori	KLA - Madya	KLA Pratama	KLA-Madya	200	Sangat Tinggi
			APE Pratama	APE Madya	APE-Pratama	50	Sangat rendah
2	Meningkatnya Angkatan Kerja Perempuan	%	1,63	1,63	3,2	105,52	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,54	88,75	85,89	96,77	Sangat tinggi
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	73,76	80	73,76	92,2	Sangat tinggi
Rata-rata kinerja						108,89	Sangat tinggi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang sebanyak 4 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 108,89% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 adalah sebesar 97,32% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran, tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 336.550.000 dan sepanjang tahun 2024 terserap Rp 272.804.600 sekitar 81% atau masuk pada kategori tinggi (76%-90%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.163

Program dan Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Batang

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pengerustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	129.535.000	156.113.100	120	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan APBD	3,20	2,50	78,12
2	Program Perlindungan Perempuan	10.0000.000	10.000.000	100	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100,00
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	59.565.000	59.565.000	100	Cakupan Kecamatan Layak Anak	100	100	100,00
4	Program Perlindungan Khusus Anak	47.450.000	47.126.500	99,31	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100,00
Total /Rerata		336.550.000	272.804.600	81,05				94,53

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Batang 2025 (diolah)

M. Dinas Lingkungan Hidup

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.164
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya penghargaan lingkungan hidup	1.	Prosentase penghargaan yang diperoleh	100	100	100
2	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	2	Prosentase tempat pembuangan sampah	95	95	100
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	Nilai IKLH	68,62	68,62	100
Rerata						100

Sumber : DLH Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang terdiri dari 3 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.165
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	23	25	25	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Penanganan Sampah	%	55	60	60	100	Sangat Tinggi
3	Pemantauan status mutu air	%	0,8	0,9	0,9	100	Sangat Tinggi
Rata-rata kinerja						100	Sangat Tinggi

Sumber : DLH Kab.Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja di atas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Batang sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (>91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebesar 100,68% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥90%).

Selanjutnya berkaitan dengan capaian serapan anggaran sebesar 99,05% yang masuk dalam kategori tinggi (91%-100%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.166
Program dan Kinerja Program Lingkungan Hidup

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Persampahan	3.495.751.596	3.459.374.700	98,95	Persentase Penanganan Sampah (Kab)	100	100	100
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	243.106.200	242.140.000	99,60	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	100
					Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi lingkungan hidup	100	100	100
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	216.763.500	213.223.400	96,21	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan	100	100	100
					Uji sampel kualitas air	100	100	100
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	353.403.200	352.978.110	99,88	Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan	100	100	100
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya (B3)	10.105.640	9.898.640	97,95	Tingkat Pengelolaan limbah	95	95	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	47.557.900	47.375.900	99,61	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100	100	100
					Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah hutan kota dan TPA	100	100	100

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Targe t	Realisa si	%
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	87.049.900	86.210.500	99,04	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia pendidikan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100
					Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan	100	100	100
Total /Rerata		4.453.737.936,00	4.411.200.610,00	99,05%				100

Sumber : DLH Kab.Batang tahun 2025

N. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Akuntabilitas Disdukcapil dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.167
Perjanjian Kinerja Dukcapil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Nilai SAKIP Disdukcapil	62	77,40	124
2	Meningkatnya Penduduk yang memiliki data administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lengkap.	1	Prosentase Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten	85	84,46	99,3
3	Terwujudnya pengendalian penduduk dan meningkatnya validitas database kependudukan	1	Prosentase menurunnya data ganda dan anomali	2,3	2	87
Rerata						103,4

Sumber : Disdukcapil Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Disdukcapil tahun 2024 terdiri dari 3 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 103,4% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Dalam upaya pencapaian kinerja Disdukcapil pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana capaian kinerja program Badan Kesbangpol tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 20.543.967.547sepanjang tahun 2023 terserap Rp. 20.411.230.785 sekitar 99,35% atau masuk pada kategori sangat tinggi (90% - 100%). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.168

Program dan Kinerja Program Disdukcapil

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	1.164.963.764	1.133.540.764	97,30	persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bagus	100	100	100
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.138.114.833	18.112.789.925	99,86	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah	100	100	100
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	43.280.000	42.358.800	97,87	Persentase Demo Tertangani	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	203.544.950	200.629.950	98,57	Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud	100	100	100
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	994.064.000	921.911.346	92,74	Persentase penurunan konflik sosial	100	100	100
Total /Rerata		20.543.967.547	20.411.230.785	99,35				100

Sumber : Disdukcapil Kab.Batang tahun 2025

O. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dispermades sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.168
Perjanjian Kinerja Dispermades

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Mewujudkan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi saat prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	1	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	67,44	100	100
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja BPBD	1	Nilai SAKIP BPBD	80	73,80	92,25
Rata-Rata						120,26

Sumber : Dispermades Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dispermades terdiri dari 2 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 120,26% atau berada pada kategori sangat tinggi (≥91%).

Capaian Kinerja Dispermades jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.170
Perbandingan Capaian Kinerja Dispermades dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	%	100	0	0	0	Sangat rendah
2	PKK Aktif	%	100	0	0	0	Sangat rendah
3	Posyandu Aktif	%	100	0	0	0	Sangat rendah
4	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	81	0	0	0	Sangat rendah
Rata-rata Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						0	Sangat rendah

Sumber : Dispermades Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja Dispermades terhadap target RPD pada tahun 2024 adalah n/a (nihil)

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Disepermades pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana terdapat 3 program pada Dispermades dengan capaian kinerja program tahun 2024 adalah sebesar 99,07% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Selanjutnya berkaitan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 599.079.000 sepanjang tahun 2024 terserap sebesar Rp.557.059.106 sekitar 92,99% atau masuk pada kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.171
Program dan Kinerja Program Dispermades

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Desa	35.000.000	35.000.000	100	Persentase budaya desa yang dilestarikan	25	25	100
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	29.094.720.500	28.843.655.832	99	Persentase desa tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	239	239	100
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	4.017.608.400	3.962.029.665	98,62	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	239	239	100
Total /Rerata		11.049.109.633	10.946.895.165	99,07				100

Sumber : Dispermades Kab.Batang tahun 2025

P. Dinas Perhubungan

Akuntabilitas Dinas Perhubungan (Dishub) dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dishub sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.172
Perjanjian Kinerja Dishub

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya penataan transportasi dan keselamatan lalu lintas	1	Rasio ijin trayek	0,00012	0,00012	100
2	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas dishub	2	Nilai SAKIP dishub	69,80	73,66	105
Rerata Kinerja						102,5

Sumber : Dishub Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dishub tahun 2024 terdiri dari 2 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 102,5% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Dishub jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.173
Perbandingan Capaian Kinerja Dishub dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	Rasio ijin trayek	Rasio	81	0,00012	0,00012	100	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP Dishub	Indeks	-	69,80	74,60	105,8	Sangat Tinggi
Rerata						102,9	Sangat Tinggi

Sumber: Dishub Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Batang sebanyak 2 (dua) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 102,9% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Ini menunjukkan penyelenggaraan Urusan Perhubungan sudah berjalan dengan sangat baik.

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dishub pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana pada Dishub terdapat 1 program dengan rata-rata kinerja 100,00% masuk kategori sangat tinggi (>90%). Sedangkan pada sisi anggaran pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 298.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 274.899.870

atau 97,77% masuk dalam kategori sangat tinggi (91% - 100%). Sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.174
Program dan Kinerja Program Dishub

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	298.500.000	274.899.870	92,09	Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	100	100	100
Total /Rerata		298.500.000	274.899.870	92,09				100

Sumber : Dishub Kab.Batang, 2025 (diolah)

Q. Dinas Komunikasi dan Informatika

Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Dishub sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Perjanjian Kinerja Diskominfo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Diskominfo	1	Nilai SAKIP	BB (Nilai 70 s/d 80)	BB (Nilai 78,65	98
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan SPBE dan berbasis smart city	2	Indeks SPBE	69,80	73,66	105
		3	Indeks smart city	3,47	3,59	103
4	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik	4	Persentase informasi dan komunikasi publik yang bias diakses lewat media komunikasi	100	100	100
5	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sectoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase pemanfaatan statistik sectoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100
6	Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan sistem elektronik		Persentase kemaan informasi atau hasil nilai evaluasi Indeks KAMI	100	100	100
Rerata Kinerja						101

Sumber : Diskominfo Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Diskominfo tahun 2024 terdiri dari 6 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 101% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Diskominfo jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.176
Perbandingan Capaian Kinerja Diskominfo dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah jaringan komunikasi	Titik	130	130	130	100	Sangat Tinggi
2	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	78	78	78	100	Sangat Tinggi
4	Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment)	Skor	3,53	3,53	3,53	100	Sangat Tinggi
5	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase capaian kinerja anggaran program perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					100	Sangat Tinggi

Sumber: Diskominfo Kab. Batang, 2025 (diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Batang sebanyak 7 (tujuh) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Ini menunjukkan penyelenggaraan urusan komunikasi sudah berjalan dengan sangat baik.

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Dishub pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program dimana pada Diskominfo terdapat 2 program dengan rata-rata kinerja 100,00% masuk kategori sangat tinggi (>90%). Sedangkan pada sisi anggaran pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.407.711.300 dan terealisasi sebesar Rp.

1.397.874.181 atau 99,30% masuk dalam kategori sangat tinggi (91% - 100%).

Sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.177

Program dan Kinerja Program Diskominfo

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Program informasi dan komunikasi publik	1.304.244.000	1.292.391.094	99,09	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100
2	Program aplikasi informatika	1.511.178.600	1.503.357.268	99,48	Persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
Total /Rerata		1.407.711.300	1.397.874.181	99,30				100

Sumber : DISKOMINFO Kab.Batang, 2025 (diolah)

R. Dinas Perindagkop dan UKM

Dinas Perindagkop dan UKM Pmengampu 3 urusan pemerintahan yaitu perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, Akuntabilitas Perindagkop dan UKM dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Perindagkop dan UKM sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.178
Perjanjian Kinerja Dinas PERINDAGKOP DAN UKM

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pertumbuhan kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	68	64,39	94,6
2	Meningkatnya daya saing umkm	Persentase produk umkm	15	54,44	100
3	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase pertumbuhan industri	13,26	12,53	94,49
4	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negri pdrb (adhb)	Persentase perdagangan besa, kecil, reparasi mobil dan speda montor	0,78	13,09	100
5	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas disperindagkop umkm	Nilai saki	0,68	77,22	100

Sumber : Dinas PERINDAGKOP DAN UKM Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas dinas PERINDAGKOP DAN UKM terdiri dari 5 indikator dengan rerata capaian kinerja sebesar 100,78% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%). Capaian Kinerja Dinas PERINDAGKOP DAN UKM jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.179
Perbandingan Capaian Kinerja PERINDAGKOP DAN UKM dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	12,2	12,75	12,57	98,59	Sangat Tinggi
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	77,02	67	77,02	114,96	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	IDK	84,23	81	84,23	103,99	Sangat Tinggi

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
	(IKM) Perangkat Daerah						
4	Persentase Verifikasi Teknis	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	36,36	36,36	36,36	100,00	Sangat Tinggi
6	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	100	75	75	100,00	Sangat Tinggi
7	nilai ekspor perdagangan	USD	61.419.729	57.877.183	58.590.133	101,23	Sangat Tinggi
8	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	133,33	75	84,2	112,27	Sangat Tinggi
9	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
10	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	1,25	0,87	1	114,94	Sangat Tinggi
11	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	82	84	84	100,00	Sangat Tinggi
12	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	100	84	100	119,05	Sangat Tinggi
Rata Rata Kinerja Urusan						111,33	Sangat Tinggi

Sumber : PERINDAGKOP DAN UKM Kab.Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja Dinas PERINDAGKOP DAN UKM mencapai 111% artinya kategori sangat tinggi (≥91%) dalam upaya pencapaian kinerja Dinas PERINDAGKOP DAN UKM pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.180
Program dan Kinerja Program PERINDAGKOP DAN UKM

No	Program	Anggaran (Rp)		(%)	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
A	Urusan Koperasi UMKM						
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	187.327.950	181.269.950	96,77	45,21	45,21	100
2	Program Penilaian Kesehatan Koperasi	20.375.700	13.669.700	67,09	68	67,5	104
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	209.265.650	202.049.150	96,55	90	90	100
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	36.850.000	22.450.000	60,92	90	90	100
5	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000	16.130.000	64,52	13	13	100
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	193.313.400	179.228.579	92,71	10	10	100
7	Program Pengembangan Umkm	29.624.300	29.394.800	99,23	15	15	100
	Urusan Koperasi UMKM	681.381.300	630.522.479	92,5			100,57
B	Urusan Perdagangan						
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	22.400.000	21.244.500	94,84	75	75	100

No	Program	Anggaran (Rp)		(%)	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.511.013.148	4.402.314.462	97,59	36,36	36,36	100
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	109.725.000	106.527.310	97,09	75	75	100
4	Program Pengembangan Ekspor	66.905.000	65.985.000	98,62	60215421	58590113	97,3
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	102.166.500	101.894.590	99,73	75	75	100
	Urusan Koperasi UMKM	4.812.209.648	4.697.965.862	97,6			99,46
C	Urusan Industri						
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	7.179.500.000	6.914.117.800	96,3	0,78	1,02	130,77
2	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	50.000.000	44.621.000	89,24	0,84	1,02	121,43
	Urusan Industri	7.229.500.000	6.958.738.800	96,2			126,1
	Rerata A+B+C	12.723.090.948	12.287.227.141	96,5			103,35

Sumber : PERINDAGKOP DAN UKM Kab.Batang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Program PERINDAGKOP DAN UKM tahun 2024 dengan rata-rata adalah sebesar 96,5% atau kategori sangat tinggi (≥91%) Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp. 12.723.090.948 dengan realisasi anggarannya 12.287.227.141 dengan target kinerjanya 103% atau kategori sangat tinggi (≥91%). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan PERINDAGKOP DAN UKM dalam rangka pencapaian kinerja sudah sangat baik. dan masuk dalam kategori tinggi.

S. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan atau DISLUTKANNAK mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu urusan perikanan dan kelautan dan Urusan Peternakan, Akuntabilitas DISLUTKANNAK dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.181
Perjanjian Kinerja Dislutkannak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI KINERJA	KET
1.	Tersedianya sarpras pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum guna peningkatan kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN);	Prosentase penyerapan Anggaran pada Program/Kegi atan Non Urusan (Rutin)	97	93	95,8%
2.	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	27.504,00	26.402,00	95,9%
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3960	4.140,64	104,5%
		Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	37,6	36,89	98,1%
3.	Terwujudnya ketersediaan pangan asal hewan yang aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Produksi Hasil Ternak :			
		- Daging (kg)	12.900.000	17.758.967	137,6%
		- Susu (Liter)	120.400	218.709	181,6%
		- Telur (kg)	14.685.000	19.407.389	132,1%
Rerata kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan					120,8%

Sumber : Dislutkannak Kab. Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dengan enam indikator kerja rerata capaian kinerja sebesar 120,8% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.182

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan target RPD tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	84	84,4	87,08	103,18	Sangat Tinggi
2	Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	21,7	21,9	19,89	90,82	Sangat Tinggi
3	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	95	93,3	100,01	107,19	Sangat Tinggi
4	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	95	95	95,98	101,03	Sangat Tinggi
5	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	95	100	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	95	96	95,98	99,98	Sangat Tinggi
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor		80	68,6	85,75	Tinggi
Rata Rata Kinerja Urusan						97,99	Sangat Tinggi

Sumber : Dislutkannak Kab.Batang tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rerata kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 97,99 % atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%). Secara keseluruhan capaian kinerja yang dilakukan oleh dinas tersebut sudah maksimal dari capaian kinerjanya. dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.183

Program dan Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program/Indikator Program	Anggaran		%	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.715.307.800	1.714.244.200	99,94	98	96	97,95
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	123.000.000	122.802.600	99,84	150 Orang	150 Orang	100
2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	14.000.000	14.000.000	100,00	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100
3	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.553.307.800	1.552.441.600	99,94	6 Layanan	24 Layanan	400
4	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	25.000.000	25.000.000	100,00	40 Dokumentasi	40 Dokumentasi	100
	Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	300.000.000	299.866.650	99,96	93	104	111,8
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	47.355.000	47.333.850	99,96	5 Kelompok	5 Kelompok	100
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	185.645.000	185.585.000	99,97	1 Unit	2 Unit	200
2	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	67.000.000	66.947.800	99,92	100 Orang	100 Orang	100
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	76.000.000	73.957.000	99,57			100
1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.000.000	36.978.500	97,31	1000 Ton	1000 Ton	100

No	Program/Indikator Program	Anggaran		%	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	87.500.000	87.446.000	99,94	1200 Straw	1200 Straw	100
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hiajuan Pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/kota	22.500.000	22.496.000	99,98	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	452.053.300	451.644.080,00	99,91			100
	Pembangunan Prasarana Pertanian	20.000.000	20.000.000	100,00	1 Paket	1 Paket	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	115.000.000,00	114.710.780	100	1 Unit	1 Unit	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	67.053.300	67.053.300	100	1 Unit	3 Unit	300
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000	249.880.000	99,95	3 Kelompok	3 Kelompok	100
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	250.000.000	249.880.000	99,95	3 Kelompok	3 Kelompok	100
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	888.725.100	787.306.500	88,59			100
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	129.992.400	99,99	2500 Ekor	2500 Ekor	100

No	Program/Indikator Program	Anggaran		%	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	130.000.000	129.992.400	99,98	2500 Ekor	2500 Ekor	100
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	628.000.000	527.633.100	83,92	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	628.000.000	527.633.100	83,92	12 Laporan	12 Laporan	100
	Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan produk Hewan daeah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	110.000.000	109.681.000	100	12 Laporan	12 Laporan	100
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	110.000.000	109.681.000	99,98	12 Laporan	12 Laporan	100
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	200,000.000	199.185.000,00	99,59			100
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	200.000.000	199.185.000	99,42	1 Paket	1 Paket	100
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	200.000.000	200.000.000	99,42	1 Paket	1 Paket	100
	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000	10.000.000	100	1 Paket	1 Paket	100
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00	1 Paket	1 Paket	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	10.000.000	10.000.000	100	1 Paket	1 Paket	100

No	Program/Indikator Program	Anggaran		%	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
		3.632.086.200	3.526.203.430	97,08			101,39

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Batang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Program Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan tahun 2024 dengan rata-rata adalah sebesar 97,08% atau kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$) Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar 3.632.086.200,00 realisasi 3.526.203.430,00 dengan target kinerjanya 101% atau kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam rangka pencapaian kinerja sudah sangat baik. dan masuk dalam kategori tinggi

W. Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan Dan Pertanian mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu urusan panagn dan Pertanian dan Urusan Petrenakan, Akuntabilitas Dinas Pangan Dan Pertanian dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.184

Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan utama (Food Avaibility)	Ketersediaan Pangan Utama			
		Beras	119615	160298	134
		Jagung	71156	87365	122
		Cadangan pangan daerah	10,6	123,023	1160
2	Meningkatnya produksi pertanian	Prosentase peningkatan produksi pertanian	80	67,30	84,12
3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas dispaperta	Nilai sakip	66,8	77,10	115,2
Rata Rata Kinerja Urusan					136,94

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Batang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dengan enam indikator kerja rerata capaian kinerja sebesar 136,94% atau masuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 90%).

Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.185

Perbandingan Capaian Kinerja Dispaperta Batang dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1	Ketersediaan pangan utama						
	- Beras	Ton	230.762	119.615	160.298	817,2	Sangat Tinggi
	- Jagung	Ton	54.363	71.156	87.365	122,7	Tinggi
2	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Cadangan pangan	Ton	18,746	10,60	123,023	1160,5	Sangat Tinggi

No	Indikator Urusan	Stn	Realisasi 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
	daerah						
4	Skor pola pangan harapan (SPPH) daerah	%	96,30	89,50	97,4	108,8	Sangat Tinggi
Rata-rata kinerja						461,84	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Batang Tahun 2025

Berdasarkan data hasil capaian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat indikator pada urusan pangan tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 461,84% atau dapat dikategorikan sangat tinggi ($\geq 91\%$)

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja dinas pangan dan pertanian pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.186

Program dan Kinerja Program Dinas Pangan dan Pertanian

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
A	Urusan Pangan							
1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.000.000	3.000.000	100	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	0,024	5,56	231,6
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	17.962.750	16.819.375	93,3	Skor pola pangan harapan	89,50	97,4	108,8
3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	276.500.00	271.493.850	99,01	Rasio desa mandiri pangan	16	15,6	100
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	37.510.000	37.308.400	99,46	Persentase pengawasan keamanan pangan	100	100	100
Total /Rerata		388.861.000	379.079.750	97				100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kab.Batang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Program Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024 dengan rata-rata adalah sebesar 100% atau kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$) Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 388.861.000 realisasi Rp 379.079.750 dengan target kinerjanya 97% atau kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka pencapaian kinerja sudah sangat baik. dan masuk dalam kategori tinggi.

X. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu urusan penunjang Perencanaan Pembangunan dan urusan Litbang. Akuntabilitas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.187
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
2	Terwujudnya perencanaan yang holistik, tematik dan terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah	2. Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya efektivitas pembangunan daerah berbasis hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi	3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
		4. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Bapelitbang	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	87,76	100,30%
Rata-rata Capaian					100,06%

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas badan perencanaan, penelitian dan pengembangan terdiri terdiri 5 indikator dengan rerata capaian kinerja 100,06%.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.188
Perbandingan Capaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
A. Perencanaan Pembangunan							
1	Indeks Perencanaan	Indeks	91,63	78	78	100,00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
2	Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	90	90,5	90,5	100,00	Sangat Tinggi
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	78,15	62,5	80,05	78,08	Tinggi
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,76	87,7	88,78	98,78	Sangat Tinggi
B. Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,76	60,1	57,46	95,61	Sangat Tinggi
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					97,34	Sangat Tinggi

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan sebanyak 9 (sembilan) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 97,34% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja badan perencanaan, penelitian dan pengembangan pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.189

Program dan Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
A	Urusan Penelitian dan Pengembangan						
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	826.000.000	822.314.761	95,55	100	100	100
B	Urusan Perencanaan Pembangunan						
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.196.263.300	1.167.846.503	97,62	100	100	100
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.644.093.400	1.562.463.564	95,03	100	100	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.970.320.966	4.741.386.594	95,39	100	100	100
	Total / Rerata	8.656.677.666	8.313.995.600	96,04			100

Sumber : Bapelitbang Kab.Batang Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 8.665.677.666 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 8.313.995.600 atau 96,04% yang termasuk kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan dalam rangka pencapaian kinerja sudah sangat baik.

Y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mengampu satu urusan pemerintahan yaitu urusan Penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.180

Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	1. Nilai SAKIP BKD	79%	80,50%	101,90%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	2. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	89%	90,07%	103,75%
		3. Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria ” baik”	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	4. Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria ”baik” dan ”sangat baik”	100	108	108%
Rata-rata Capaian					102,78%

Sumber : BKD Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri 4 indikator dengan rerata capaian kinerja 102,78%.

Capaian Kinerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.181

Perbandingan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Nilai SAKIP BKD	%	78	69	80,5	116,67	Sangat Tinggi
2	Nilai Sistem Merit	Skor	274,5	200	274,5	137,25	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	88,19	86	90,07	104,73	Sangat Tinggi
4	Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
5	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	100	70	100	142,86	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					120,30	Sangat Tinggi

Sumber : BKD Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebanyak 5 (lima) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 120,30% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.182

Program dan Kinerja Program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
1	Program Kepegawaian Daerah	2.133.951.747	1.952.528.091	91,50	100	100	100
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.356.750	830.217.245	94,84	100	100	100
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.829.003.626	4.649.222.438	96,28	100	100	100
	Total / Rerata	7.838.312.123	7.431.967.774	94,82			100

Sumber : Bapelitbang Kab.Batang Tahun 2025 ((Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 7.838.312.123 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 7.431.967.774 atau 94,82% yang termasuk kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pencapaian kinerja sudah sangat baik.

Z. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah mengampu satu unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.183

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitas	1. Akuntabilitas Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP
		2. Presentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Realisasi Penerimaan PAD	3. Presentase Peningkatan Pendapatan Daerah	0,5	7,71	1542%
		4. Presentase Peningkatan PAD	2,03	9,68	476,85%
3	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	5. Nilai SAKIP BPKPAD	77,50	79,25	102,26%
Rata-rata Capaian					403,89%

Sumber : BPKAD Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah terdiri 5 indikator dengan rerata capaian kinerja 403,89%.

Capaian Kinerja badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.184

Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	3,23	0,5	7,71	1542	Sangat Tinggi
4	Persentase Peningkatan PAD	%	8,91	2,03	9,68	476,85	Sangat Tinggi
5	Nilai SAKIP BPKPAD	%	77,14	64	79,25	123,83	Sangat Tinggi
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	86,05	86	86,17	100,20	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					407,15	Sangat Tinggi

Sumber : BPKAD Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sebanyak 6 (enam) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 407,15% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.185

Program dan Kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.447.357.036	27.712.592.060	26,53	100	100	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	357.997.488.190	347.808.092.258	97,15	100	100	100
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.264.005.150	1.997.781.119	88,24	100	100	100
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.654.597.500	3.257.531.370	89,14	100	100	100
	Total / Rerata	468.393.447.876	380.775.996.807	81,30			100

Sumber : BPKPAD Kab.Batang Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 468.393.447.876 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 380.775.996.807 atau 81,30% yang termasuk kategori tinggi (75% - 90%). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka pencapaian kinerja sudah baik.

AA. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai peranan penting dalam menunjang kinerja para anggota dewan, mulai dari proses Perencanaan, Administrasi, Pengaturan Persiapan, hingga pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Akuntabilitas Sekretariat DPRD dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.186
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Setwan sebagai unsur pendukung pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP SKPD	65	78,55	120,85
2	Meningkatnya fasilitasi tugas,wewenang dan hak DPRD	2. Indeks Kepuasan anggota DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD	79%	83%	105,06%
Rata-rata Capaian					112,96%

Sumber : Sekretariat DPRD Kab.Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Sekretariat DPRD terdiri 2 indikator dengan rerata capaian kinerja 112,96%.

Capaian Kinerja sekretariat DPRD daerah jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187

Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan jasa (Peraturan Perundang-Undangan)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi

2	Prosentase SDM yang mengikuti kegiatan Asosiasi Sekwan se Indonesia	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Prosentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi
4	Banyaknya Promperda	Perda	9	15	12	80,00	Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					95,00	Sangat Tinggi

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD sebanyak 4 (empat) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 95% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.188
Program dan Kinerja Program Sekretariat DPRD

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	39.536.251.566	38.699.101.017	97,88	100	100	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.750.052.423	18.364.474.170	92,98	100	100	100
	Total / Rerata	59.286.303.989	57.063.575.187	96,25			100

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 59.286.303.989 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 57.063.575.187 atau 96,25% yang termasuk kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian kinerja sangat baik.

BB. Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Sekretariat Daerah dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Sskretariat Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.189
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
A	Bagian Hukum				
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	510 Dokumen/laporan	1299 Dokumen/laporan	254,71%
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati yang disusun	200 Produk hukum	677 Produk hukum	338,5%
3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kajian hukum dan perkara hukum yang terselesaikan baik litigasi maupun non litigasi	100%	100%	100%
4	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan terkelola (baik software maupun hardware)	300 dokumen	661 dokumen	220,33%
B	Bagian Organisasi				
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%
		Tingkat Kematangan OPD Sekretariat Daerah	Sedang (32)	Tinggi (39,40)	122%
C	Bagian Administrasi Pembangunan				
1	Meningkatnya capaian Program Pembangunan yang sesuai target	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	96%	97,5%	101,56%
D	Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa				
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyusunan kebijakan daerah serta meningkatnya kualitas produk hukum	Jumlah paket Pengadaan Barang dan Jasa yang ditenderkan	70 paket	96 paket	137,14%

E	Bagian Perekonomian				
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Monev dan pelaporan kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2	Meningkatnya efektivitas kebijakan Sumber daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Sumber Daya Alam	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
H	Bagian Prokompim				
1	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggara-an Kegiatan Pimpinan Daerah	Terlaksananya kegiatan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Kepala Daerah	100%	100%	100%
I	Bagian Umum				
1	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	90%	100%	111%
		Persentase capaian kinerja anggaran program perangkat daerah	90%	94,44%	104%
		Cakupan layanan operasional kantor	85%	100%	117%
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	90%	100%	111%
		Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	90%	100%	111%
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	90%	100%	111%
Rata-rata Capaian					136,39%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab.Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas Sekretariat Daerah terdiri 17 indikator dengan rerata capaian kinerja 136,39%.

Capaian Kinerja sekretariat daerah daerah jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.190

Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	97,72	90	98	108,58	Sangat Tinggi

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Indeks	87,33	85	88,37	103,96	Sangat Tinggi
3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	80	79	80	101,27	Sangat Tinggi
4	Nilai EKKPD	Skor	3,08	2,98	3,08*	103,36	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					104,29	Sangat Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah sebanyak 4 (delapan) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 104,29% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.191
Program dan Kinerja Program Sekretariat Daerah

N o	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
A	Bagian Hukum						
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	998.695.050	977.988.119	97,93	95	100	105,26
B	Bagian Kesra						
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	33.928.938.300	31.938.214.911	94,13	100	100	100
C	Bagian Organisasi						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (RPD)	616.335.000	589.656.350	95,67	100	111,56	111,56
D	Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Program Perekonomian Pembangunan	535.080.000	518.535.653	96,91	100	100	100
E	Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	662.551.800	653.277.582	98,60	100	100	100
F	Bagian Perekonomian						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	966.614.160	885.028.488	91,56	100	100	100
G	Bagian Prokompim						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	716.174.600	706.641.024	98,67	100	274,77	274,77
H	Bagian Umum						

N o	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	24.300.135.541	22.988.543.337	94,60	90	100	111
	Total / Rerata	62.724.524.451	59.257.885.464	94,47			128,97

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah sebesar 128,97% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 62.724.524.451 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 59.257.885.464 atau 94,47% yang termasuk kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja sangat baik.

CC. Inspektorat Daerah

Inspektorat mengampu urusan pemerintahan yaitu urusan Penunjang Pengawasan. Adapun, Akuntabilitas Inspektorat dapat dilihat dari Perjanjian Kinerja Inspektorat sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.192
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa	1. Prosentase pencapaian peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	85	102,82	120,96
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kinerja Inspektorat Daerah	88,5	88,3	99,77
2	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	3. Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan	85	85	100
		4. Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat	85	84,44	99,35
		5. Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		6. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	80	80,20	100
Rata-rata Capaian					99,86%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian akuntabilitas inspektorat daerah terdiri 2 indikator dengan rerata capaian kinerja 99,86%. Capaian Kinerja inspektorat daerah jika dibandingkan dengan target dalam RPD dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.193
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah dengan target RPD dan tahun sebelumnya

No	Indikator	Stn	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024			
			2023	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Prosentase pencapaian peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	%	100	85	102,82	120,96	Sangat Tinggi
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kinerja Inspektorat Daerah	Indeks	85	88,75	88,3	99,49	Sangat Tinggi
3	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan	%	80	85	85	100,00	Sangat Tinggi
4	Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat	%	80	85	84,44	99,34	Sangat Tinggi
5	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor	77,8	80	80,2	100,25	Sangat Tinggi
	Rata Rata Kinerja Urusan					104,01	Sangat Tinggi

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 2025 (Data diolah)

Berdasarkan data hasil capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa indikator yang menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD sebanyak 6 (enam) indikator dengan rata-rata capaian realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 104,01% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥91%).

Sementara itu, dalam upaya pencapaian kinerja inspektorat daerah pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan pencapaian target kinerja program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.194
Program dan Kinerja Program Inspektorat

No	Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9.384.094.742	8.958.082.308	95,46	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.394.936.198	2.235.526.682	93,34	100	100	100
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	778.069.700	762.699.100	98,02	100	100	100
	Total / Rerata	12.557.100.640	11.956.308.090	95,22			100

Sumber : Inspektorat Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja program inspektorat daerah tahun 2024 adalah sebesar 100% atau masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Sedangkan jika dilihat dari penyerapan anggaran dapat dilihat bahwa dari target anggaran sebesar Rp 12.557.100.640 terserap sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 11.956.308.090 atau 95,22% yang termasuk kategori sangat tinggi ($\geq 91\%$). Artinya efisiensi sumberdaya yang dilakukan inspektorat daerah dalam rangka pencapaian kinerja sangat baik.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan Tugas Pembantuan yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada instansi yang memberikan penugasan. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah atas APBN yang digunakan untuk kegiatan Tugas Pembantuan. Tujuan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya.

Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat

Tahun Anggaran 2023-2024 Pemerintah Kabupaten Batang tidak mendapatkan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023-2024 yaitu:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dilaksanakan Kabupaten
Batang 2024

No	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	PD	Program	Anggaran (Rp)		%	Kinerja		%	Permasalahan
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Tahun 2023											
		Pemprov Jawa Tengah	Dispermadesdukcapil Prov. Jateng	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							
				Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
				Sub Kegiatan TMMD Sengkuyung	1.850.000.000	1.850.000.000	100	4 Desa	4 Desa	100	
Tahun 2024											
		Pemprov Jawa Tengah	Dispermadesdukcapil Prov. Jateng	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							

No	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	PD	Program	Anggaran (Rp)		%	Kinerja		%	Permasalahan
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		
				Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
				Sub Kegiatan TMMD Sengkuyung	1.975.000.000	1.975.000.000	100	4 Desa	4 Desa	100	

Sumber: Buku kinerja Perangkat Daerah, 2025 (diolah)

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
 - a) miskin atau tidak mampu;
 - b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c) kondisi bencana; dan/atau
 - d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan RPD;
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD;
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya;
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
- b) memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Adapun pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan minimal (SPM) urusan pendidikan tertuang di dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Jenis pelayanan dasar dalam SPM kabupaten/kota meliputi :

- 1. Pendidikan anak usia dini
- 2. Pendidikan dasar, dan
- 3. Pendidikan kesetaraan

SPM urusan pendidikan diuraikan selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Pendidikan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	23.992	23.992	100	80,00	6.552.120.028
2	Pendidikan Dasar	84.627	84.627	100	80,00	50.414.750.903
3	Pendidikan Kesetaraan	4.936	4.936	100	80,00	1.257.727.535

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP Penerima layanan dasar SPM bidang pendidikan anak usia dini adalah sebesar 80,00%, sedangkan anggaran yang di alokasikan dalam rangka mendukung pancapaian SPM Pendidikan Anak usia Dini adalah sebesar Rp.6.552.120.028. adapun IP Penerima layanan pendidikan dasar adalah sebesar 80,00% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.414.750.903. begitu juga IP layanan dasar pendidikan kesetaraan sebesar 80,00% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.257.727.535.

Sedangkan capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM
Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Layanan Dasar (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
Pendidikan Anak Usia Dini					
1	Angka partisipasi sekolah	100	95,81	95,81	19,16
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	86,01	86,01	17,20
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	89,71	89,71	17,94
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	0,76	0,76	100,00	20,00
5	Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100,00	20,00
6	Indeks distribusi guru	0,36	0,3	83,33	16,67
7	Proporsi PTK bersertifikat	57,64	57,64	100,00	20,00
8	Proporsi PTK penggerak	4,93	4,93	100,00	20,00
9	Pengalaman pelatihan guru	100	85	85,00	17,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					18,66
Pendidikan Dasar					
	SD				
1	Angka partisipasi kasar	100	103,94	103,94	20,79
2	Angka partisipasi sekolah	100	98,92	98,92	19,78
3	Angka partisipasi murni	100	95,27	95,27	19,05
4	Kemampuan literasi	100	86,14	86,14	17,23
5	Kemampuan numerasi	100	76,26	76,26	15,25
6	Perbedaan Skor Literasi	7,29	7,29	100,00	20,00
7	Perbedaan Skor numerasi	2,62	2,62	100,00	20,00
8	Indeks iklim keamanan	100	76,98	76,98	15,40
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	76,60	76,60	15,32
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	95,23	95,23	19,05
11	Indeks distribusi guru	0,34	0,33	97,06	19,41
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	26,42	26,42	5,28
13	Proporsi PTK penggerak	100	26,42	26,42	5,28
14	Pengalaman pelatihan guru	100	85,00	85,00	17,00
	SMP				
1	Angka partisipasi kasar	100	109,18	109,18	21,84
2	Angka partisipasi sekolah	100	96,24	96,24	19,25
3	Angka partisipasi murni	100	80,81	80,81	16,16
4	Kemampuan literasi	100	88,15	88,15	17,63
5	Kemampuan numerasi	100	83,94	83,94	16,79
6	Perbedaan Skor Literasi	7,53	7,53	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		($\%$)	IP Mutu Minimal Layanan Dasar (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
7	Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100,00	20,00
8	Indeks iklim keamanan	100	76,01	76,01	15,20
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	77,78	77,78	15,56
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	51,17	51,17	10,23
11	Indeks distribusi guru	1,00	0,53	53,00	10,60
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	49,46	49,46	9,89
13	Proporsi PTK penggerak	100	49,46	49,46	9,89
14	Pengalaman pelatihan guru	100	85,00	85,00	17,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					15,86
Pendidikan Kesetaraan					
1	Angka partisipasi kasar	100	98,89	98,89	19,78
2	Angka partisipasi sekolah	100	91,17	91,17	18,23
3	Angka partisipasi murni	100	77,63	77,63	15,53
4	Kemampuan literasi	100	58,13	58,13	11,63
5	Kemampuan numerasi	100	50,00	50,00	10,00
6	Perbedaan Skor Literasi	5,49	5,49	100,00	20,00
7	Perbedaan Skor numerasi	3,5	3,5	100,00	20,00
8	Indeks iklim keamanan	100	63,41	63,41	12,68
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	62,21	62,21	12,44
10	Kecukupan formasi guru ASN	100	67	67,00	13,40
11	Indeks distribusi guru	100	67	67,00	13,40
12	Proporsi PTK bersertifikat	100	76,9	76,90	15,38
13	Proporsi PTK penggerak	100	100	100,00	20,00
14	Pengalaman pelatihan guru	100	85	85,00	17,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					15,67

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IP mutu minimal layanan dasar SPM bidang pendidikan anak usia dini adalah sebesar 18,66%. Bidang pendidikan dasar sebesar 15,86% dan bidang pendidikan kesetaraan sebesar 15,67%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	98,66	TUNTAS UTAMA
2	Pendidikan Dasar	95,86	TUNTAS UTAMA
3	Pendidikan Kesetaraan	95,68	TUNTAS UTAMA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan data di atas, maka rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 adalah sebesar **96,73%** atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**.

4.2. URUSAN KESEHATAN

SPM urusan kesehatan terdiri dari 12 Jenis Layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota urusan kesehatan, jenis pelayanan dasar SPM urusan kesehatan meliputi:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4. Pelayanan kesehatan balita
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Adapun indeks pencapaian (IP) penerima layanan dasar SPM urusan kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Kesehatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.664	9.664	100	80,00	972.237.500
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.153	9.153	100	80,00	249.149.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.146	9.146	100	80,00	159.508.000
4	Pelayanan kesehatan balita	46.311	46.311	100	80,00	87.469.500
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	116.503	116.503	100	80,00	368.606.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	470.849	470.849	100	80,00	22.050.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	109.299	109.299	100	80,00	24.985.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	157.008	157.008	100	80,00	15.090.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	17.446	17.446	100	80,00	1.085.179.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.096	2.096	100	80,00	13.525.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	8.885	8.885	100	80,00	879.680.750
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	14.973	14.973	100	80,00	287.065.000

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP Penerima layanan dasar SPM bidang Kesehatan secara keseluruhan pada 12 jenis pelayanan adalah sebesar 80%. Adapun untuk alokasi anggaran paling besar adalah pada jenis pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu sebesar Rp.1.085.179.000 sedangkan alokasi paling sedikit adalah jenis Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu sebesar Rp. 13.525.000.

Sedangkan capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM
Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	9.664	9.664	100,00	20,00
2	Tablet tambah darah	1.739.520	1.739.520	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9.664	9.664	100,00	20,00
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	9.664	9.664	100,00	20,00
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.664	9.664	100,00	20,00
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	28	28	100,00	20,00
7	Bidan	21	21	100,00	20,00
8	Perawat	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
1	Formulir Partograf	9.153	9.153	100,00	20,00
2	Kartu ibu (rekam medis)	9.153	9.153	100,00	20,00
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	1	100,00	20,00
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	28	28	100,00	20,00
5	Bidan	21	21	100,00	20,00
6	Perawat	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
1	Vaksin Hepatitis B0	9.146	9.146	100,00	20,00
2	Vitamin K1 injeksi	9.146	9.146	100,00	20,00
3	Salep/tetes matantibiotic	9.146	9.146	100,00	20,00
4	Formulir bayi baru lahir	9.146	9.146	100,00	20,00
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	27.438	27.438	100,00	20,00
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	21	21	100,00	20,00
7	Dokter/dokter spesialis Anak	25	25	100,00	20,00
8	Bidan	21	21	100,00	20,00
9	Perawat	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Balita					
1	Kuisisioner Pra Skrining perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	46.311	46.311	100,00	20,00
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	46.311	46.311	100,00	20,00
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	21	21	100,00	20,00
4	Vitamin A Biru	46.311	46.311	100,00	20,00
5	Vitamin A Merah	46.311	46.311	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib, Campak, Rubella	46.311	46.311	100,00	20,00
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV,DPT-HB-Hib,Campak, Rubella	46.311	46.311	100,00	20,00
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	46.311	46.311	100,00	20,00
9	Peralatan Anafilaktik	46.311	46.311	100,00	20,00
10	Bidan	21	21	100,00	20,00
11	Dokter	21	21	100,00	20,00
12	Perawat	21	21	100,00	20,00
13	Ahli Gizi	21	21	100,00	20,00
14	Guru PAUD	21	21	100,00	20,00
15	Kader Kesehatan	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
1	Buku raport kesehatanku	116.503	116.503	100,00	20,00
2	Buku pemantauan kesehatan	116.503	116.503	100,00	20,00
3	Kuesioner skrining kesehatan	116.503	116.503	100,00	20,00
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	116.503	116.503	100,00	20,00
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	21	21	100,00	20,00
6	Dokter/Dokter gigi	41	41	100,00	20,00
7	Bidan	21	21	100,00	20,00
8	Perawat	21	21	100,00	20,00
9	Ahli Gizi	21	21	100,00	20,00
10	hgTenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100,00	20,00
11	Guru	21	21	100,00	20,00
12	Kader Kesehatan	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
1	Pedoman dan media Komunikasi, nformasi, Edukasi (KIE)	21	21	100,00	20,00
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter,Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	614.945	614.945	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		($\%$)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	11.890	11.890	100,00	20,00
4	Dokter	21	21	100,00	20,00
5	Bidan	21	21	100,00	20,00
6	Perawat	21	21	100,00	20,00
7	Ahli Gizi	21	21	100,00	20,00
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100,00	20,00
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	609	609	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	109.299	109.299	100,00	20,00
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	109.299	109.299	100,00	20,00
3	Buku kesehatan lansia	109.299	109.299	100,00	20,00
4	Dokter	21	21	100,00	20,00
5	Bidan	21	21	100,00	20,00
6	Perawat	21	21	100,00	20,00
7	Ahli Gizi	21	21	100,00	20,00
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100,00	20,00
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	100,00	20,00
2	Tensimeter	283	283	100,00	20,00
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	47.375	47.375	100,00	20,00
4	Dokter	21	21	100,00	20,00
5	Bidan	21	21	100,00	20,00
6	Perawat	21	21	100,00	20,00
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus					
1	Glukometer, Strip Tes Gula Darah,Kapas Alkohol, Lancet	340.016	340.016	100,00	20,00
2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	59.265	59.265	100,00	20,00
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	100,00	20,00
4	Dokter	21	21	100,00	20,00
5	Bidan	21	21	100,00	20,00
6	Perawat	21	21	100,00	20,00
7	Ahli Gizi	21	21	100,00	20,00
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	21	21	100,00	20,00
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	5	5	100,00	20,00
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	252	252	100,00	20,00
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	100,00	20,00
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	21	21	100,00	20,00
6	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	0	0	0,00	0,00
7	Tenaga profesional lainnya	0	0	0,00	0,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					15,56
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis					
1	Media KIE (Leaflet, Lemba Balik,Poster,Banner)	24	24	100,00	20,00
2	Reagen Zn TB	24	24	100,00	20,00
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	1.663	1.663	100,00	20,00
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	18.835	18.835	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
5	Catridge tes cepat molekuler	8.885	8.885	100,00	20,00
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	24	24	100,00	20,00
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	24	24	100,00	20,00
8	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	29	29	100,00	20,00
9	Perawat	24	24	100,00	20,00
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	24	24	100,00	20,00
11	Penata Rontgen	3	3	100,00	20,00
12	Tenaga kesehatan masyarakat	24	24	100,00	20,00
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	106	106	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	24	24	100,00	20,00
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	25.000	25.000	100,00	20,00
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	24	24	100,00	20,00
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	24	24	100,00	20,00
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	31	31	100,00	20,00
6	Perawat	24	24	100,00	20,00
7	Bidan	48	48	100,00	20,00
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	24	24	100,00	20,00
9	Tenaga kesehatan masyarakat	21	21	100,00	20,00
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	21	21	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%	TUNTAS PARIPURNA
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	TUNTAS PARIPURNA
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	TUNTAS PARIPURNA
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	TUNTAS PARIPURNA
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	95,56%	TUNTAS UTAMA
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis	100%	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Maka, rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar **99,63%** atau kategori **TUNTAS UTAMA**.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SPM Urusan pekerjaan umum terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yaitu Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota urusan pekerjaan umum, dimana capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	5632	5632	100,00	80,00	7.321.674.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	3992	3992	100,00	80,00	5.050.000.000

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP Penerima layanan dasar SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok ari minum adalah sebesar 80,00%, sedangkan anggaran yang di alokasikan dalam rangka mendukung pancapaiannya adalah sebesar Rp.7.321.674.000. begitu juga jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik adalah sebesar 80,00% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.050.000.000.

Sedangkan capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar
SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1249	1249	100,00	20,00
2	Kualitas air keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1249	1249	100,00	20,00
3	Ukuran kuantitas air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.	159	159	100,00	20,00
4	Ukuran kualitas air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi	159	159	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik					
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	998	998	100,00	20,00
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	998	998	100,00	20,00
3	Kualitas penyediaan pelayanan akses layak	998	998	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebesar **100,00%** atau kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

4.4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota urusan perumahan rakyat. Terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar yaitu:

- 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun indeks pencapaian (IP) penerima layanan dasar SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10

Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2,00	2,00	100,00	80,00	36.167.750
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100,00	80,00	0,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP Penerima layanan dasar SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman jenis pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah sebesar 80,00%, sedangkan anggaran yang di alokasikan dalam rangka mendukung pancapaiannya adalah sebesar Rp.36.167.750. sedangkan jenis pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota tidak ada target dan tidak ada alokasi anggaran yang disediakan karena tidak ada masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah.

Adapun capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar
SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota					
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2	2	100,00	20,00
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	100,00	20,00
3	Permukiman Kembali bagi korban bencana	0	0	100,00	20,00
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program					
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	100,00	20,00
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni	0	0	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Perumahan dan Permukiman pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No .	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 secara keseluruhan adalah **100%** dengan kategori indeks **TUNTAS PARIPURNA** .

4.5. URUSAN KETERNTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diampu oleh tiga perangkat daerah yaitu Satpol PP, Badan Kesbangpol dan BPBD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, SPM urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terdiri dari 5 indikator yaitu:

- 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- 2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- 3. Pelayanan informasi rawan bencana
- 4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13

Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	172	172	100,00	80,00	7.637.100.950
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	767	767	100,00	80,00	3.770.182.672
3	Pelayanan informasi rawan bencana	4979	4562	91,62	73,30	177.797.166
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	213.987	213.987	100,00	80,00	556.250.440
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	14	14	100,00	80,00	390.350.144

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi		
	korban bencana				

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP Penerima layanan dasar SPM urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah sebesar 80,00%, sedangkan pada jenis pelayanan pelayanan informasi rawan bencana capainya sebesar 73,30%. Adapun alokasi anggaran paling besar yaitu pada jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 7.637.100.950, dan yang terkecil pada pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp. 177.797.166.

Adapun capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar
SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum					
1	Standar sarana prasarana Satpol PP	309	309	100,00	20,00
2	Standar operasional prosedur Satpol PP	18	18	100,00	20,00
3	Standar peningkat an kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	211	211	100,00	20,00
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100,00	20,00
5	Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	100,00	20,00
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	767	767	100,00	20,00
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran,penyelamatan dan evakuasi	1	1	100,00	20,00
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	200	200	100,00	20,00
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	70	70	100,00	20,00
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	1	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	1	1	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100,00	20,00
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	179765	179765	100,00	20,00
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	200	200	100,00	20,00
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	16	16	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	67	67	100,00	20,00
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	60	60	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100,00	20,00
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	0	0	100,00	20,00
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100,00	20,00
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
5	Pelaksanaan pencarian,pertolongan evakuasi korban bencana	37	37	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	93,30 %	TUNTAS UTAMA
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024 adalah sebesar **98,66%** atau kategori **TUNTAS UTAMA**

4.6. URUSAN SOSIAL

SPM urusan sosial terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota urusan sosial yaitu:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Adapun Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Sosial tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.16

Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar SPM Urusan Sosial dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	188	188	100,00	80,00	250.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	147	147	100,00	80,00	250.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	80	100,00	80,00	319.976.300
4	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	1.522	1.522	100,00	80,00	1.572.000.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi	3.375	3.375	100,00	80,00	623.075.100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Penerima Layanan Dasar (kolom 5 x 80%)	Alokasi Anggaran
		Target	Realisasi			
	korban bencana					

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa IP layanan dasar SPM urusan Sosial pada 5 jenis pelayanan dasar seluruhnya mencapai 80%. Adapun alokasi anggaran paling besar adalah pada jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti sebesar Rp.1.572.000.000. sedangkan yang terkecil masing-masing pada jenis pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti dan Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti masing-masing sebesar Rp. 250.000.000.

Adapun capaian IP mutu minimal layanan dasar SPM Urusan Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar
SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti					
1	Layanan data dan pengaduan	35	40	100,00	20,00
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	12	12	100,00	20,00
3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	12	12	100,00	20,00
4	Penyediaan permakanan	19	19	100,00	20,00
5	Penyediaan sandang	19	19	100,00	20,00
6	Penyediaan alat bantu	35	35	100,00	20,00
7	Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100,00	20,00
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	12	12	100,00	20,00
9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	35	35	100,00	20,00
10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	15	15	100,00	20,00
11	Akses kelayanan pendidikan	10	10	100,00	20,00
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	15	100,00	20,00
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	15	100,00	20,00
14	Layanan rujukan	25	25	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
1	Layanan data dan pengaduan	65	65	100,00	20,00
2	Penyediaan permakanan	125	125	100,00	20,00
3	Penyediaan sandang	15	15	100,00	20,00
4	Penyediaan alat bantu	9	9	100,00	20,00
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100,00	20,00
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	125	125	100,00	20,00
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	5	5	100,00	20,00
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100,00	20,00
9	Aksek ke layanan pendidikan	125	125	100,00	20,00
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100,00	20,00
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	8	8	100,00	20,00
12	Layanan rujukan	6	6	100,00	20,00
13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
1	Layanan data dan pengaduan	13	13	100,00	20,00
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	13	13	100,00	20,00
3	Penyediaan permakanan	13	13	100,00	20,00
4	Penyediaan sandang	13	13	100,00	20,00
5	Penyediaan alat bantu	0	0	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	13	13	100,00	20,00
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	100,00	20,00
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	10	10	100,00	20,00
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	13	13	100,00	20,00
10	Aksek ke layanan pendidikan	14	14	100,00	20,00
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	100,00	20,00
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	11	11	100,00	20,00
13	Layanan rujukan	14	14	100,00	20,00
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti					
1	Layanan data dan pengaduan	22	22	100,00	20,00
2	Penyediaan permakanan	1.522	1.522	100,00	20,00
3	Penyediaan sandang	1.522	1.522	100,00	20,00
4	Penyediaan alat bantu	0	0	100,00	20,00
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	1.522	1.522	100,00	20,00
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1.522	1.522	100,00	20,00
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1.522	1.522	100,00	20,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		(%)	IP Mutu Minimal Dasar Layanan (kolom 5x20%)
		Target	Realisasi		
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	2	100,00	20,00
9	Akses ke layanan pendidikan	1.522	1.522	100,00	20,00
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	100,00	20,00
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	100,00	20,00
12	Layanan rujukan	0	0	100,00	20,00
13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti pemeliharaan	1	1	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota					
1	Penyediaan permakanan	3.241	3.241	100,00	20,00
2	Penyediaan sandang	120	120	100,00	20,00
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100,00	20,00
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	250	250	100,00	20,00
5	Pelayanan dukungan Psikososial	122	122	100,00	20,00
Rerata IP Mutu Layanan Dasar					20,00

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Sosial Kabupaten Batang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan+Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	TUNTAS PARIPURNA
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %	TUNTAS PARIPURNA
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	100 %	TUNTAS PARIPURNA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	100 %	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Bag. Organisasi Kab. Batang tahun 2025 (diolah)

Indeks Pencapaian (IP) SPM urusan Sosial Tahun 2024 secara keseluruhan adalah **100%** dengan kategori indeks **TUNTAS PARIPURNA**.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** adalah dokumen resmi yang disusun dan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dalam kurun waktu satu tahun. LPPD menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi.

Dalam konteks Kabupaten Batang, perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 telah dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Seluruh program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 telah diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, serta mengalami penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Seiring dengan telah berakhirnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, maka sesuai dengan amanat regulasi, Pemerintah Kabupaten Batang perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Laporan ini akan menjadi dokumen evaluasi yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan selama satu tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Batang 2024, yang pada gilirannya mengacu pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri, mengingat pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran

aktif jajaran eksekutif di tingkat pemerintah daerah, sinergi dengan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD), serta dukungan penuh dari masyarakat yang turut serta dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, selain berbagai pencapaian positif yang telah diraih, masih terdapat sejumlah tantangan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Tantangan tersebut bisa berasal dari berbagai aspek, seperti efektivitas pelaksanaan program, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Batang Tahun 2024, diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan, rekomendasi, dan evaluasi dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.

Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan penting dalam melakukan perbaikan kebijakan serta mengakselerasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, penyusunan LPPD bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, Kabupaten Batang dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera, dengan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan di berbagai sektor strategis.

Batang, Maret 2025

BUPATI BATANG



M. FAIZ KURNIAWAN